

**PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN  
PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN  
(PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN PURSE SEINE  
(STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro  
Program Studi: Magister Manajemen Sumber Daya Pantai**



**Diajukan Oleh:**

**CHRISTINA SUMARNI ABU**

**K4A 000006**

**Kepada**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN  
PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP)  
TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN PURSE SEINE  
(STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

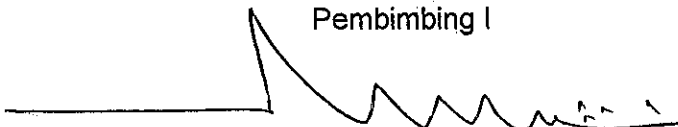
**CHRISTINA SUMARNI ABU**

K4A 000006

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 20 Nopember 2002

Pembimbing I



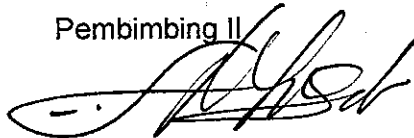
(Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA'RANI)

Penguji I



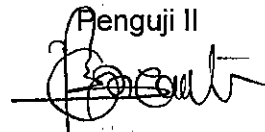
(Dr. Ir. SUBIYANTO, MSc.)

Pembimbing II



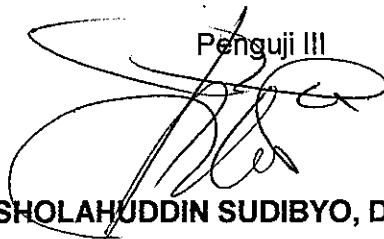
(Dr. Ir. AZIS NUR BAMBANG, MS.)

Penguji II

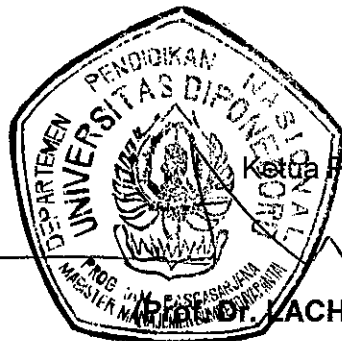


(Dr. Ir. AGUNG SURYANTO, MS.)

Penguji III



(Ir. SHOLAHUDDIN SUDIBYO, DESS.)



Ketua Program Studi



(Prof. Dr. LACHMUDDIN SYA'RANI)

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, September 2002

**CHRISTINA SUMARNI ABU**  
Tandatangan dan nama Terang

## **MOTTO**

**Masa depan bukan tergantung pada pekerjaan  
yang dilakukan, melainkan pada orang yang  
melakukannya**

*(George Crane)*



## PERSEMBAHAN

***Kenangan atas ayahanda tercinta,  
Bingkisan untuk Ibu, Kakak-kakak dan Adik-adik  
Teristimewa buat suamiku "Emas" Leksono,  
beserta buah hatiku Artha, Ayu, dan Artrien.  
Terima kasih atas pengertian dan  
Dorongan semangatnya.***

# APPLICATION INFLUENCES OF PPP AND PHP (FISHERY EXERTION AND RESULT LEVIES) ON PURSE SEINE FISHERMEN'S INCOMES (CASE STUDY IN PEKALONGAN CITY)

## Abstract

In the term of promoting fish resources management to be sustainable and profitable as great as possible for the people welfare, the Government applies the PPP and PHP (Fishery Exploitation Levy and Fish Caught Levy) in giving a fish catching exploitation licence as for adding the state non-tax revenue.

The purpose of study is to examine the fish catch compositions and kinds of fish species of the small pelagic purse seiner boat, the PPP and PHP influences on the purse seiner fishermen incomes, and compare the amount of PHP determined by the Government and of the study result PHP.

Case study method was used the study about existing of purse seiner boat fishermen in Pekalongan City as the study location. The sampling technique was carried out systematically. The data analysis used the qualitative descriptive and t-test statistic analysis. The qualitative descriptive analysis was used for analyzing the fish catch compositions and kind of fish species and determining the fish prices. The t-test was used for analyzing the significant differences of the PPP and PHP influences on determind the small pelagis purse seiner boat fisherman incomes, and comparing the amount of PHP by Government and study result PHP too.

The result of study showed that the fish catch compositions of the 30 GT or more purse seiner boat for the last five years, namely in the 1997 – 2001 in Pekalongan, indicated that there were fluctuations of the production amounts. From the average production amount of each fish kind of purse seiner boat fish catches for the last five years the largest fish kind composition was Layang followed by Lemuru, then Banyar, Tembang, Selar and the other fish kinds have the least compositions. Of the fish kinds the salted fish composition was larger than the fresh or iced fish composition. The highest price of the purse seiner boat fish catches was the species of Banyar/Kembung and the lowest one was Tembang species. Based on the fish quality price of fresh or iced fish price was higher than the salted one. The PPP and PHP influenced the incomes of fishermen, especially of the purse seiner boat owner. Income at the first trip of the boat owner who has paid the PPP and PHP has a negative value or the boat owner suffered a financial loss. Mean while the boat owner who has not paid the PPP and PHP yet has a high income per trip. For the income per trip of captain, motorist, skilled worker, and crew who both has and has not paid PPP and PHP yet was not influenced by the magnitude of fishery levies. The one-year income of the purse seiner boat owner who has paid the PPP and PHP were lower than the owners who have not yet. While the incomes among their captains, motorist, siklled worker, crews were not much different. The PHP value of the government calculation based on the old HPI (Floor Price of Fish; The Decision of Trade and Industry Minister No. 213/2001) was much higher than the one based on the study calculation. But if we compared the PHP calculation based on the new HPI (Decision of Trade and Industry Minister No. 548/2002) with the one based on the study result calculation between them was not much difference. Therefore it need immediately to socialize and iluminate the PHP imposition based on the new HPI calculation.

*Key words: Fishery Exertion Levy (PPP), Fishery Result Levy (PHP), Purse seine Fisherman*

# **PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN PURSE SEINE (STUDI KASUS DI KOTA PEKALONGAN)**

## **Abstrak**

Dalam rangka pengelolaan pemberdayaan sumberdaya ikan yang lestari dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka di dalam pelaksanaan perijinan usaha penangkapan ikan pemerintah menerapkan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebagai usaha untuk menambah penerimaan negara bukan pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil, harga ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil, pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan *purse seine*, dan membandingkan besaran PHP yang ditetapkan pemerintah dengan besaran PHP hasil penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus. Kasus yang diteliti adalah nelayan kapal *purse seine* yang ada di Kota Pekalongan sebagai lokasi penelitian. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara sistematis. Untuk analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis statistik uji t. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan dan penentuan harga ikan. Uji t digunakan untuk menganalisis beda nyata pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan kapal *purse seine* pelagis kecil, dan juga untuk membandingkan besaran PHP Pemerintah dan PHP hasil penelitian.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa komposisi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dengan bobot ukuran lebih dari 30 GT selama lima tahun terakhir yakni tahun 1997-2001 di Pekalongan, memperlihatkan adanya fluktuasi jumlah produksi. Dari rata-rata jumlah produksi selama lima tahun untuk masing-masing jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* diperoleh komposisi jenis ikan paling besar adalah jenis ikan Layang, disusul oleh jenis ikan Lemuru, kemudian ikan Banyar, ikan Tembang, ikan Selar, dan ikan dengan jenis lainnya memiliki komposisi paling kecil. Dari jenis ikan tersebut, komposisi ikan asin lebih besar dibandingkan dengan komposisi ikan segar. Harga ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* yang memiliki harga tertinggi adalah jenis ikan Banyar/Kembung sedangkan harga terendah adalah jenis ikan Tembang. Berdasarkan pada kualitas ikan, harga ikan segar lebih tinggi dibandingkan dengan harga ikan asin. Pungutan perikanan yang berupa PPP dan PHP mempengaruhi pendapatan nelayan khususnya pemilik kapal *purse seine*. Pada pendapatan trip pertama, pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP bernilai negatif atau pemilik kapal tersebut mengalami kerugian, sedangkan untuk pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP memiliki pendapatan per trip yang tinggi. Untuk pendapatan per trip nahkoda, motoris, juru, dan ABK baik yang sudah membayar maupun belum membayar PPP dan PHP tidak dipengaruhi oleh besar pungutan perikanan tersebut. Pendapatan satu tahun baik untuk pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP lebih rendah dibanding dengan pendapatan pemilik kapal yang belum membayar PPP dan PHP. Adapun nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa, pendapatannya tidak jauh berbeda. Nilai PHP berdasarkan perhitungan pemerintah dengan Harga Patokan Ikan (HPI) lama (SK Menperindag No. 213/2001) jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai PHP berdasarkan perhitungan hasil penelitian. Adapun perhitungan PHP dengan HPI baru (SK Menperindag No. 548/2002) dibandingkan dengan perhitungan PHP hasil penelitian tidak jauh berbeda. Untuk itu perlu segera dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan penerapan PHP dengan perhitungan HPI yang baru.

*Kata Kunci: Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP), Pungutan Hasil Perikanan (PHP), Nelayan Purse seine.*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada penulis sehingga tesis dengan judul: "PENGARUH PENERAPAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN (PPP) DAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN PURSE SEINE DI KOTA PEKALONGAN" ini dapat terselesaikan.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sain (Derajat Sarjana, S-2), pada Program Magister Manajemen Sumberdaya Pantai Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Lachmuddin Sya'rani selaku Pembimbing I serta selaku Ketua Program Magister Manajemen Sumber Daya Pantai yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan tesis ini berlangsung.
2. Dr. Ir. Azis Nur Bambang, M.Sc., selaku dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dengan penuh kesabaran selama penulisan berlangsung.
3. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan dan Kepala Kantor Statistik Pekalongan yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan ini.

4. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan yang telah memberikan data-data yang dibutuhkan untuk menyusun tesis ini.
5. Para nelayan Kapal *Purse Seine* yang ada di Kota Pekalongan yang telah bersedia menjadi responden penelitian dan telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis selama penelitian.
6. Suami dan anak-anakku yang telah memberikan perhatian dan dukungan yang sangat berarti dan tak ternilai kepada penulis selama penulisan tesis ini berlangsung.
7. Semua rekan-rekan dan pihak-pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis. Semoga Tuhan membalas segala kebaikannya.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih perlu penyempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca akan semakin melengkapi dan menyempurnakan tulisan ini.

Semarang, September 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT .....	vi
ABSTRAKSI .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR ILUSTRASI .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xx
INDEKS KATA.....	xxi
DAFTAR SINGKATAN.....	xxii
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Originalitas Penelitian .....	9
1.4. Pendekatan Masalah .....	10
1.5. Batasan Masalah .....	10
1.6. Tujuan Penelitian .....	11
1.7. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1. Telaah Kepustakaan .....	12
2.1.1. Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> .....	12
2.1.2. Pendapatan Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> .....	13
2.1.3. Perijinan Usaha Perikanan .....	15
2.1.4. Penerapan Pungutan Perikanan.....	20
2.2. Landasan Teori .....	22

<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
	3.1. Materi Penelitian.....	25
	3.2. Metode Penelitian .....	25
	3.3. Metode Penentuan Sampel .....	25
	3.4. Metode Pengumpulan Data .....	27
	3.5. Analisis Data .....	28
	3.5.1. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkap Kapal <i>Purse Seine</i> .....	28
	3.5.2. Penentuan Harga Ikan .....	28
	3.5.3. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan .....	29
	3.5.4. Besaran PHP Hasil Penelitian .....	30
	3.6. Waktu dan Tempat Penelitian .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
	4.1. Deskripsi Daerah Penelitian .....	31
	4.1.1. Keadaan Geografis .....	31
	4.1.2. Gambaran Umum Perikanan di Kota Pekalongan .....	32
	4.2. Deskripsi Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> .....	37
	4.2.1. Deskripsi Responden .....	37
	4.2.2. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkapan <i>Purse Seine</i> .....	51
	4.2.3. Harga Ikan Hasil Tangkapan <i>Purse Seine</i> .....	65
	4.2.4. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan .....	69
	4.2.5. Perbandingan PHP Hasil Penelitian dengan PHP Pemerintah .....	104
	4.3. Pembahasan .....	112
	4.3.1. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkapan <i>Purse Seine</i> .....	112
	4.3.2. Harga Ikan Berdasarkan IHK.....	115
	4.3.3. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan .....	118

4.3.4. Perbandingan PHP Hasil Penelitian dengan PHP Pemerintah .....	120
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>122</b>
5.1. Kesimpulan .....	122
5.2. Saran .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>126</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>



## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Realisasi Daftar Ulang Perizinan Usaha Perikanan .....	5
Tabel 2	Jumlah Kapal Berbobot Lebih dari 30 GT menurut Daerah .....	6
Tabel 3	Komposisi Hasil Tangkap Alat <i>Purse Seine</i> Berdasarkan Prediksi Departemen Kelautan dan Perikanan .....	8
Tabel 4	Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Perikanan .....	9
Tabel 5	Nama-nama Kecamatan di Kota Pekalongan beserta Luas Wilayah .....	32
Tabel 6	Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kota Pekalongan Tahun 2001 .....	34
Tabel 7	Jenis Alat Tangkap dan Jumlah Kapal Perikanan Tahun 1992 – 2001 .....	35
Tabel 8	Deskripsi Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> .....	36
Tabel 9	Pendidikan Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> di Kota Pekalongan .....	38
Tabel 10	Umur Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> di Kota Pekalongan .....	40
Tabel 11	Bobot Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian .....	42
Tabel 12	Tarif PPP dan PHP di Kota Pekalongan .....	43
Tabel 13	Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian dalam 1 Tahun ..	45
Tabel 14	Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP dalam Satu Tahun .....	46
Tabel 15	Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP dalam Satu Tahun .....	47
Tabel 16	Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian .....	48
Tabel 17	Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut untuk Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	49
Tabel 18	Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut untuk Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	50
Tabel 19	Produksi Perikanan Kapal <i>Purse Seine</i> yang Didaratkan di TPI Kota Pekalongan .....	52
Tabel 20	Hasil Produksi Ikan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1997 ....	54
Tabel 21	Hasil Produksi Ikan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1998 ...	54

Tabel 22	Hasil Produksi Ikan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1999 ...	55
Tabel 23	Hasil Produksi Ikan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 2000 ...	55
Tabel 24	Hasil Produksi Ikan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 2001 ...	56
Tabel 25	Komposisi dan Rata-rata Produksi Per Jenis Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Tahun 1997 – 2001 .....	56
Tabel 26	Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1997 .....	58
Tabel 27	Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1998 .....	58
Tabel 28	Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 1999 .....	58
Tabel 29	Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 2000 .....	59
Tabel 30	Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Per Bulan Tahun 2001 .....	59
Tabel 31	Komposisi Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Tahun 1997 – 2001 .....	60
Tabel 32	Perbandingan Jumlah dan Komposisi Hasil Produksi Antara Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> dengan Alat Tangkap Lain .....	61
Tabel 33	Produksi Kapal <i>Purse</i> Selama Satu Trip .....	62
Tabel 34	Produksi Per Trip Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	63
Tabel 35	Produksi Per Trip Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	64
Tabel 36	Harga Kualitas Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Tahun 1997 – 2001 .....	66
Tabel 37	Harga Per Jenis Ikan Hasil Produksi Kapal <i>Purse Seine</i> Berdasarkan Kualitas Ikan .....	68
Tabel 38	Pendapatan Satu Trip Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	70
Tabel 39	Pendapatan Satu Trip Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	71
Tabel 40	Pendapatan Satu Trip Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	73

Tabel 41	Pendapatan Satu Trip Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	74
Tabel 42	Pendapatan Satu Trip Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	75
Tabel 43	Pendapatan Satu Trip Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	76
Tabel 44	Pendapatan Satu Trip Juru Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	78
Tabel 45	Pendapatan Satu Trip Juru Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	79
Tabel 46	Pendapatan Satu Trip ABK Biasa Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	80
Tabel 47	Pendapatan Satu Trip ABK Biasa Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	81
Tabel 48	Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	83
Tabel 49	Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	84
Tabel 50	Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	86
Tabel 51	Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	87
Tabel 52	Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	89
Tabel 53	Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	90
Tabel 54	Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	92
Tabel 55	Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	93
Tabel 56	Pendapatan Satu Tahun ABK Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	95
Tabel 57	Pendapatan Satu Tahun ABK Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	96

Tabel 58	Hasil Uji Beda Pendapatan Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	98
Tabel 59	Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	99
Tabel 60	Nilai Nominal Pendapatan Nahkoda Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	100
Tabel 61	Nilai Nominal Pendapatan Motoris Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	101
Tabel 62	Nilai Nominal Pendapatan Juru Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	102
Tabel 63	Nilai Nominal Pendapatan ABK Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP .....	103
Tabel 64	PHP Berdasarkan Hasil Penelitian .....	105
Tabel 65	PHP Berdasarkan Kepmen No. 213/MPP/MEP/VIII/2001 .....	106
Tabel 66	PHP Berdasarkan Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002 .....	107
Tabel 67	Perbandingan PHP berdasarkan HPI Kepmen No. 213/MPP/MEP/VIII/2001, HPI Hasil Penelitian, dan HPI Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002 .....	109
Tabel 68	Hasil Uji Beda Terhadap PHP Berdasarkan HPI Kepmen No. 13/MPP/MEP/VIII/2001, HPI Hasil Penelitian, dan HPI Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002 .....	110



## DAFTAR ILUSTRASI

		Halaman
Ilustrasi 1	Pengaruh Penerapan PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> .....	10
Ilustrasi 2	Penerapan PPP dan PHP sebagai Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak .....	23
Ilustrasi 3	Diagram Pendidikan Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> di Kota Pekalongan .....	39
Ilustrasi 4	Diagram Umur Nelayan Kapal <i>Purse Seine</i> di Kota Pekalongan	40
Ilustrasi 5	Diagram Bobot Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian .....	42
Ilustrasi 6	Diagram Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian Dalam Satu Tahun .....	45
Ilustrasi 7	Diagram Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP dalam Satu Tahun .....	46
Ilustrasi 8	Diagram Jumlah Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP dalam Satu Tahun .....	47
Ilustrasi 9	Diagram Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian .....	49
Ilustrasi 10	Diagram Waktu yang Dibutuhkan dalam 1 Trip Melaut untuk Kapal <i>Purse Seine</i> yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	50
Ilustrasi 11	Diagram Waktu yang Dibutuhkan dalam 1 Trip Melaut untuk Kapal <i>Purse Seine</i> yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	51
Ilustrasi 12	Diagram Produksi Perikanan <i>Purse Seine</i> yang Didaratkan di TPI Kota Pekalongan .....	53
Ilustrasi 13	Diagram Diagram Komposisi dan Rata-rata Produksi Per Jenis Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Tahun 1997-2001 ..	57
Ilustrasi 14	Diagram Komposisi Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal <i>Purse Seine</i> Tahun 1997 – 2001 .....	60
Ilustrasi 15	Diagram Perbandingan Jumlah dan Komposisi Produksi Antara Alat Tangkap <i>Purse Seine</i> dengan Alat Tangkap Lain .....	61
Ilustrasi 16	Diagram Produksi Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian Selama Satu Trip .....	62
Ilustrasi 17	Diagram Produksi Per Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	64

Ilustrasi 18	Diagram Produksi Per Trip Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	65
Ilustrasi 19	Diagram Harga Per Jenis Ikan Hasil Produksi Kapal <i>Purse Seine</i> Berdasarkan Kualitas Ikan .....	68
Ilustrasi 20	Diagram Pendapatan Per Trip Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	70
Ilustrasi 21	Diagram Pendapatan Per Trip Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	71
Ilustrasi 22	Diagram Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	73
Ilustrasi 23	Diagram Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	74
Ilustrasi 24	Diagram Pendapatan Per Trip Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	76
Ilustrasi 25	Diagram Pendapatan Per Trip Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	77
Ilustrasi 26	Diagram Pendapatan Per Trip Juru Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	78
Ilustrasi 27	Diagram Pendapatan Per Trip Juru Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	79
Ilustrasi 28	Diagram Pendapatan Per Trip ABK Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	80
Ilustrasi 29	Diagram Pendapatan Per Trip ABK Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	82
Ilustrasi 30	Diagram Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	83
Ilustrasi 31	Diagram Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	85
Ilustrasi 32	Diagram Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	86
Ilustrasi 33	Diagram Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	88
Ilustrasi 34	Diagram Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	90

Ilustrasi 35	Diagram Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	91
Ilustrasi 36	Diagram Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	93
Ilustrasi 37	Diagram Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	94
Ilustrasi 38	Diagram Pendapatan Satu Tahun ABK Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP .....	95
Ilustrasi 39	Diagram Pendapatan Satu Tahun ABK Kapal <i>Purse Seine</i> Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP .....	97
Ilustrasi 40	Diagram PHP Berdasarkan Hasil Penelitian.....	105
Ilustrasi 41	Diagram PHP Berdasarkan Kepmen No. 213/MPP/MEP/VIII/2001.....	106
Ilustrasi 42	Diagram PHP Berdasarkan Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002	108
Ilustrasi 43	Diagram Perbandingan PHP Berdasarkan Kepmen Tahun 2001, PHP Hasil Penelitian, dan PHP Kepmen Tahun 2002 ....	109

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Kuesioner Penelitian.....	129
Lampiran B	Hasil Perhitungan Pendapatan Nelayan Per Trip.....	133
Lampiran C	Hasil Perhitungan Pendapatan Nelayan Per Tahun.....	140
Lampiran D	Hasil Perhitungan Harga Patokan Ikan.....	147
Lampiran E	Hasil Perhitungan PHP Kepmen No. 213/MPP/MEP/VIII/2001	150
Lampiran F	Hasil Perhitungan PHP Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002 .....	152
Lampiran G	Hasil Perhitungan PHP Hasil Penelitian .....	155
Lampiran H	<i>Output Uji t</i> Pendapatan Nelayan.....	158
Lampiran I	<i>Output Uji t</i> Nilai PHP .....	173

## INDEKS KATA

Nelayan	Orang yang mata pencahariaannya melakukan penangkapan ikan
Pendapatan	Hasil yang diterima baik berupa uang atau keuntungan finansial
<i>Purse Seine</i>	Alat tangkap ikan yang efektif dimana ikan tersebut cenderung berkelompok misalnya ikan Pelagis
Trip	Frekuensi dalam melakukan kegiatan atau aktifitas melaut yang dinyatakan dalam kali per tahun

## DAFTAR SINGKATAN

ABK	Anak Buah Kapal
DELP	Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
DK	Daya Kuda
GT	<i>Gross Tonage</i>
HPI	Harga Patokan Ikan
IHK	Indeks Harga Konsumen
IUP	Izin Usaha Perikanan
PHP	Pungutan Hasil Perikanan
PPKA	Persetujuan Penggunaan Kapal Asing
PPP	Pungutan Pengusahaan Perikanan
SIKPIA	Surat Izin Kapal Penangkap Ikan Asing
SIKP II	Surat Izin Kapal Penangkap Ikan Indonesia
SIKPPI	Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia
SPI	Surat Penangkapan Ikan
SPP	Surat Perintah Pembayaran
TPI	Tempat Pelelangan Ikan
ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari wilayah perairan khususnya laut, yakni mencapai hampir 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai sebuah negara kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan kawasan laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> (Dahuri R, 1996). Berdasar konvensi Hukum Laut (*UNCLOS*, 1982), wilayah perairan Republik Indonesia meliputi kawasan seluas 3,1 juta km<sup>2</sup> terdiri dari perairan kepulauan seluas 2,8 juta km<sup>2</sup> dan lautan dengan luas sekitar 0,3 juta km<sup>2</sup>. Di samping itu Indonesia memiliki hak berdaulat atas sumber-sumber kekayaan alam serta berbagai kepentingan yang melekat pada Zona Eksklusif Ekonomi (ZEE) seluas 2,7 juta km<sup>2</sup> dan hak berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dasar laut perairan internasional di luar landas kontinen.

Ketika krisis ekonomi terjadi pada pertengahan 1997 yang lalu, sendi-sendi perekonomian Indonesia mengalami pukulan yang berat sehingga mengakibatkan menurunnya penghasilan negara dan masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan itu, pada masa pemerintahan reformasi, sektor perikanan mulai dilirik sebagai salah satu andalan sumber pemasukan negara, sehingga dalam kabinet reformasi dibentuk suatu departemen yang langsung mengurus masalah pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yaitu Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan (DELP) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden RI No. 145 Tahun 1999. Tujuan dari pembentukan

Departemen tersebut adalah sebagai perwujudan dari pasal 33 UUD 1945 yakni mengatur kekayaan sumber daya alam untuk kemakmuran bersama:

" Wilayah pesisir dan laut beserta segenap sumber daya dan jasa-jasa yang terkandung di dalamnya, merupakan sumber kehidupan dan sumber pembangunan yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan, guna meningkatkan kemakmuran rakyat menuju terwujudnya bangsa Indonesia yang sejahtera, maju dan mandiri". (Kusumaatmadja, 2000).

Hal di atas mengindikasikan bahwa sumber daya kelautan adalah sumber daya yang terbuka (*open acces*) dan merupakan sumber daya milik bersama (*community resources*), yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran seluruh rakyat (Tindjabane, 2000). Hal ini sekaligus menjadi dasar yang kuat bagi pemerintah untuk menetapkan berbagai aturan-aturan yang terkait dengannya, seperti surat perizinan penangkapan ikan, penetapan pungutan, dan lain-lain yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan tersebut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Selanjutnya dalam mewujudkan perhatian terhadap sektor perikanan maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan yakni Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 Tentang Usaha Perikanan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 141 Tahun 2000 ini mengatur tentang adanya penerimaan negara dari sektor usaha perikanan sesuai dengan pertimbangan point b yaitu:

"Bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan, perlu memberikan pelayanan Surat Izin Kapal Penangkap dan

Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) bagi perorangan maupun badan hukum yang melakukan usaha perikanan”.

PP No. 141 Tahun 2000 di atas diterbitkan agar semua pihak yang melakukan usaha perikanan di Indonesia memiliki izin untuk dapat beroperasi. Selain itu, fungsi perizinan ini juga untuk meningkatkan penerimaan negara di luar sektor migas dan pajak, serta mengendalikan pemanfaatan potensi sumber daya ikan sehingga terjaga kelestariannya dan kelangsungannya (*sustainable resources*).

Sebagai acuan dalam menentukan jenis dan besarnya penerimaan dari sektor perikanan maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan “Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari usaha perikanan adalah berupa Pungutan Perikanan”. Ayat (2) menjelaskan bahwa “Pungutan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas a. Pungutan Pengusahaan Perikanan; b. Pungutan Hasil Perikanan”.

Pasal 3 ayat (1) “Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dikenakan pada saat Wajib Bayar memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) atau memperoleh dan memperpanjang Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)”; ayat (2) “Pungutan Hasil Perikanan (PHP) sebesar 2,5% yang dikenakan saat Wajib bayar memperoleh dan memperpanjang Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin kapal Penangkap dan Pengangkut Indonesia (SIKPPII) atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”.

PP No. 142 Tahun 2000 ditujukan kepada perusahaan perikanan atau perorangan yang melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan

kapal penangkap ikan dengan bobot lebih besar dari 30 GT, atau menggunakan mesin berkekuatan lebih besar dari 90 Daya Kuda (DK), atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 meter dan beroperasi di luar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Sejalan dengan nafas Otonomi Daerah maka pengaturan pungutan untuk kapal berbobot kurang dari 30 GT diserahkan kepada Pemerintah Propinsi dan yang berbobot kurang dari 10 GT diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya hasil pungutan perikanan tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (pasal 6) diatur 20% untuk pemerintah pusat dan 80% diserahkan dan dibagi rata untuk pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia sebagai penjabaran dari pasal 33 UUD 1945.

Sebagai realisasi PP Nomor 141 Tahun 2000 dan 142 Tahun 2000 tersebut diterbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46 Tahun 2001 tentang pendaftaran ulang perizinan usaha penangkapan ikan, maka setiap pemilik/pengusaha perikanan untuk melaksanakan pendaftaran ulang perizinan usaha perikanan tangkap, sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan (pasal 2 dan pasal 4). Bilamana tidak memenuhi ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 7 (diberlakukan Peringatan I, II, pembekuan dan pencabutan izin usaha dengan tenggang waktu selama 4 bulan).

Di Jawa Tengah pelaksanaan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) tidak semulus yang diharapkan. Dari jumlah kapal yang berbobot lebih dari 30 GT yang terdaftar ternyata masih sedikit yang telah melunasi PPP maupun PHP sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Realisasi Daftar Ulang Perizinan Usaha Perikanan**

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kapal (> 30 GT) yang terdaftar	725
2.	Kapal yang telah daftar ulang	661
3.	Kapal yang telah mendapat Surat Perintah Pembayaran (SPP) PPP dan PHP	266
4.	Kapal yang telah lunas PPP dan PHP	40

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah (diolah) (Februari 2001)*

Data di atas memperlihatkan bahwa dari 725 kapal yang terdaftar, masih sedikit kapal yang mendaftar ulang, mendapatkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PPP dan PHP serta yang melunasinya. Menyikapi pemberlakuan PPP dan PHP tersebut, nelayan Jawa Tengah bersikap menolak karena peraturan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh kepada penghasilannya. Sikap penolakan tersebut didasari atas pertimbangan mengingat nelayan selama ini telah pula membayar retribusi 3% (sebagian dari 5%) retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana diatur di dalam Perda Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pasar Grosir dan Pertokoan. Pemberlakuan peraturan tersebut dirasa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penghasilan nelayan Jawa Tengah yang umumnya dilakukan dengan sistem bagi hasil, sehingga pemberlakuan PPP dan PHP bagi pengusaha atau pemilik kapal perikanan dengan bobot > 30 GT, dikhawatirkan juga akan mengurangi penghasilan nelayan.

Dari jumlah kapal yang berbobot lebih dari 30 GT sebanyak 725 kapal, maka yang terbesar adalah di Kota Pekalongan.

**Tabel 2**  
**Jumlah Kapal Berbobot Lebih dari 30 GT menurut Daerah**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal
1.	Rembang	2
2.	Pati	60
3.	Semarang	32
4.	Batang	3
5.	Kota Pekalongan	557
6.	Tegal	53
7.	Cilacap	115
<b>Jumlah</b>		<b>725</b>

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 (diolah)

Data di atas memperlihatkan bahwa kapal yang berbobot lebih dari 30 GT terdapat di Kota Pekalongan yakni sebanyak 557 kapal di mana sebagian besar adalah kapal dengan alat tangkap *purse seine* yakni sebanyak 419, alat tangkap yang lain sebanyak 138, terdiri dari alat tangkap *long line* dan lain-lain.

### 1.2. Perumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pemberlakuan Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang dikenakan kepada para pemilik/pengusaha kapal perikanan di Jawa Tengah juga menimbulkan keresahan nelayan dan bahkan menolak serta meminta PHP diturunkan. Beberapa alasannya adalah:

1. Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) telah dipungut retribusi 3% (dari 5% menurut Perda 3/ 2000).
2. Besaran persentase pungutan sebesar 2,5% yang ditetapkan di dalam PP No. 142 tahun 2000 dianggap terlalu tinggi.

3. Komposisi jenis ikan hasil tangkapan produksi kapal *purse seine* yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
4. Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan Menteri Perindustrian dan Perdagangan kurang sesuai di lapangan.
5. Tambahan beban membayar PPP dan PHP, nelayan (ABK) khawatir akan mengurangi penghasilannya.

Sesuai dengan PP 142 Tahun 2000, penerapan PPP didasarkan atas jenis, ukuran dan jenis alat tangkap yang dipergunakan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PPP} = \text{Tarif per GT (per jenis alat tangkap)} \times \text{ukuran kapal / GT}$$

Tarif PPP untuk kapal *purse seine* pelagis kecil berdasarkan PP No. 142 Tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 11.250,-. Per GT.

Tarif PPP dikenakan atau dipungut pada nelayan yang bertindak sebagai pemilik kapal pada saat mengajukan Izin Usaha Perikanan (IUP), dimana pungutan tersebut hanya dikenakan sekali selama nelayan tersebut menjadi pengusaha. Tarif PPP ini harus dibayar 50% pada saat memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dengan tenggang waktu 1 bulan dan jika tidak dibayar maka IUP akan dibatalkan dan sisanya (50%) harus dilunasi pada saat memperoleh SPI/SIKPPII.

Untuk Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dipungut dari pemilik kapal pada saat mengajukan izin penangkapan ikan atau pengangkutan ikan (SPI/SIKPPI), dimana pengenaannya berlaku setiap tahun. Besar nilai tarif PHP didasarkan

atas produktivitas kapal serta harga patokan ikan dengan sistem perhitungan sebagai berikut:

$$\text{PHP} = 2,5\% \times \text{Produktivitas} \times \text{HPI (Harga Patokan Ikan)}$$

Produktivitas berbagai jenis kapal ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2001. Untuk produktivitas kapal *purse seine* adalah sebesar 1,5 ton/GT/tahun (menurut Dirjen Perikanan Tangkap : Perhitungan Produktivitas Kapal *Purse Seine* di Pelabuhan Pekalongan adalah 2,5 ton/GT/tahun).

Komposisi hasil tangkap ikan untuk kapal *purse seine* pelagis kecil sesuai dengan Kepmen adalah seperti terdapat dalam Tabel 3 berikut ini:

**Tabel 3**  
**Komposisi Hasil Tangkap Alat *Purse Seine* Berdasarkan Prediksi**  
**Departemen Kelautan dan Perikanan**

Jenis Alat	Jenis Ikan		Persentase (%)
	Nama Lokal	Nama latin	
<i>Purse seine</i>	Layang	<u>Decapterus spp</u>	40
	Kembung	<u>Rastrelligger spp</u>	20
	Selar	<u>Selaroides leptolepis</u>	15
	Lemuru	<u>Clupeidae</u>	10
	Tembang	<u>Sardinella fimbriata</u>	10
	Lainnya		5
	<b>Jumlah</b>		<b>100</b>

Sumber : Kepmen Kelautan dan Perikanan No. 23/MEN/2001

Adapun Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan Nomor 213 Tahun 2001 yang ditangkap oleh kapal *purse seine* pelagis kecil adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Perikanan**

No	Jenis Ikan		HPI (Rp/kg)
	Nama Lokal	Nama latin	
1.	Layang	<u>Decapterus spp</u>	3.926
2.	Kembung	<u>Rastrelliger spp</u>	3.365
3.	Selar	<u>Selaroides leptolepis</u>	1.683
4.	Lemuru	<u>Clupeidae</u>	574
5.	Tembang	<u>Sardinella fimbriata</u>	574

Sumber : Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 213/MPP,MEP/VIII/2001

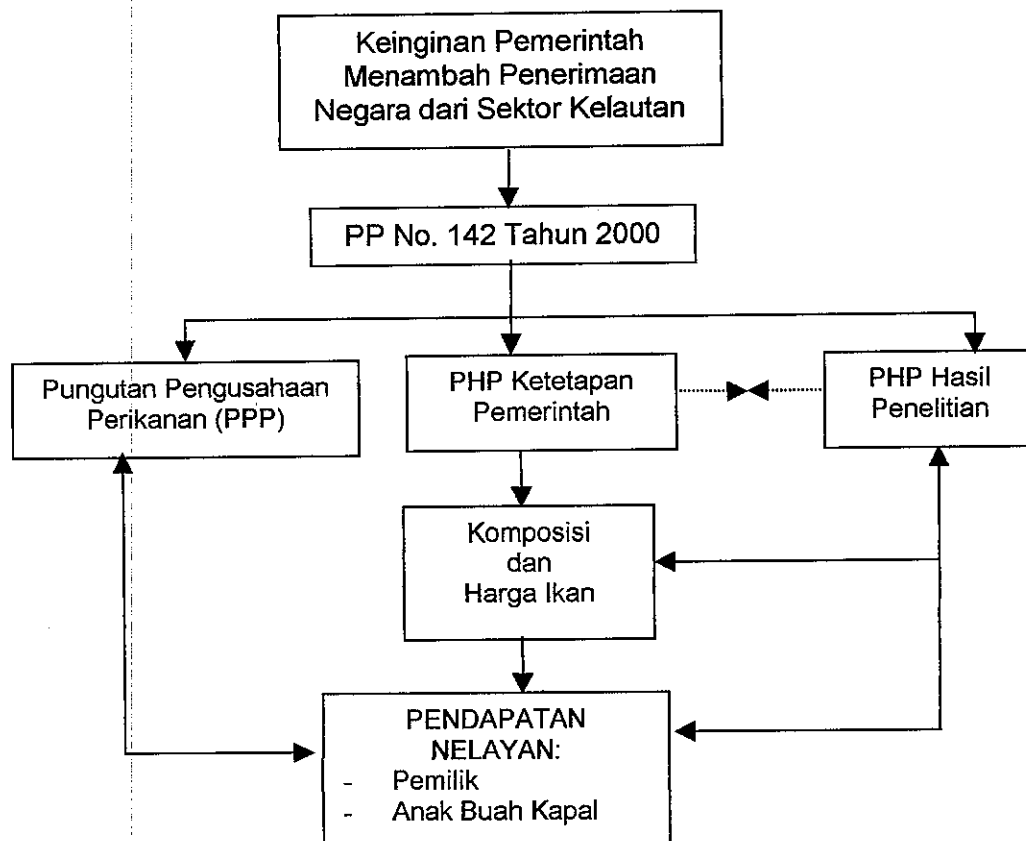
### 1.3. Originalitas Penelitian

Penelitian mengenai kajian tentang penerapan PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan *purse seine*, sejauh pengamatan penulis, boleh dikatakan belum pernah dilakukan oleh orang lain. Hal ini mengingat peraturan PPP dan PHP itu sendiri masih sangat baru yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2000, sosialisasinya baru dilakukan pada bulan November 2001. Sebagai topik penelitian yang masih baru, penulis pada penelitian ini akan memfokuskan kajian pada pengaruh penerapan PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan *purse seine* di Kota Pekalongan.

Kajian mengenai nelayan *purse seine* sudah pernah diteliti oleh Purbiyantoro (2001) yakni mengenai kontribusinya nelayan *purse seine* terhadap PAD di Pekalongan. Hal yang dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut adalah meliputi: gambaran daerah penelitian dan gambaran nelayan *purse seine*.

#### 1.4. Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka pendekatan masalah penelitian dapat digambarkan sebagaimana ilustrasi 1 di bawah ini:



**Ilustrasi 1. Pengaruh Penerapan PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan Kapal *Purse Seine***

#### 1.5. Batasan Masalah

Mengingat keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil.
2. Harga ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil.

3. Pengaruh penerapan PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan kapal *purse seine*.
4. Mengetahui besaran PHP hasil penelitian.

### **1.6. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil.
2. Untuk mengkaji harga ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* pelagis kecil.
3. Untuk mengkaji pengaruh PPP dan PHP terhadap pendapatan nelayan *purse seine*.
4. Untuk membandingkan besaran PHP yang ditetapkan pemerintah (dengan perhitungan HPI tahun 2001 dan HPI tahun 2002) dengan besaran PHP hasil penelitian.

### **1.7. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah untuk pertimbangan pengambilan keputusan sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang saling menguntungkan (*win-win solutions*) dan sebagai penambah kajian pustaka bagi dunia ilmu pengetahuan khususnya di sektor perikanan dan kelautan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Telaah Kepustakaan

##### 2.1.1. Nelayan Kapal *Purse seine*

*Purse seine* adalah alat tangkap ikan yang efektif untuk penangkapan jenis ikan pelagis yang gerombolannya besar (Mulyono, 1986). Pengertian nelayan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 pasal 1 ayat (3) disebutkan "Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan".

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa nelayan *purse seine* adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan dengan alat bantu tangkap ikan jenis *purse seine*.

*Purse seine* dikenal di Indonesia sekitar tahun tujuh puluhan (Nurhakim, 1993, dalam Purbiantoro, 2001), menurut Ayodhya (1985, dalam Purbiyantoro, 2001) ikan yang menjadi sasaran tangkap adalah ikan *pelagic shoaling species* yang berarti ikan tersebut harus menggerombol, dekat permukaan air dengan kepadatan yang tinggi.

*Purse seine* yang beroperasi di Laut Jawa menurut Widodo *et.al* (1994, dalam Purbiyantoro, 2001) diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok *purse seine* mini, sedang dan besar. Kapal *purse seine* yang dipergunakan biasanya berukuran panjang lebih 18 m, lebar 4,2 m dan dalam 1,75 m yang digerakkan mesin diesel berkekuatan lebih 90 PK. Jumlah kru atau anak buah kapal (ABK) mencapai 35 – 40 orang (Mulyono, 1986).

Daerah operasi nelayan *purse seine* khususnya untuk para nelayan Pekalongan mencapai perairan Karimun Jawa, Bawean, Masalembo, utara Pulau Lombok (Mulyono, 1986), dengan masa hari penangkapan (*Fishing Day*) rata-rata 40 hari untuk *purse seine* besar dan kurang dari 30 hari untuk *purse seine* kecil (Purbiantoro, 2001).

Karakteristik dari kapal penangkap ikan yang digunakan nelayan *purse seine* dan daerah penangkapan yang di luar batas 12 mil laut merupakan salah satu obyek pungutan perikanan sesuai dengan PP No.142 Tahun 2000.

### **2.1.2. Pendapatan Nelayan Kapal *Purse Seine***

Pendapatan adalah hasil yang diterima baik berupa uang atau keuntungan material seseorang dari kekayaan atau dari jasa-jasa yang dilakukan oleh manusia secara bebas (Abdurachman dalam Hardhani, 2002).

Berdasarkan definisi di atas, maka pengertian dari pendapatan nelayan kapal *purse seine* adalah hasil yang diterima baik berupa uang atau keuntungan dari kepemilikan kapal atau jasa yang diberikan seseorang untuk mengoperasikan kapal penangkap ikan dengan jenis alat tangkap *purse seine*.

Dikarenakan keterbatasan sarana penangkapan ikan dan kesulitan dalam pemenuhan modal banyak nelayan bekerja pada pihak kedua yang memiliki modal kuat sebagai buruh nelayan atau anak buah kapal (ABK).

Hubungan kerja antara pemilik modal dan pekerja, diharapkan agar dapat saling menguntungkan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam kenyataannya banyak pekerja penangkap ikan berada pada posisi yang lemah (Dahuri *et. al*, 2001). Penelitian yang dilakukan Mubyarto *et. al* (1984) menemukan adanya sistem bagi hasil antara juragan kapal dan anak buah kapal yang tidak adil.

Sistem bagi hasil misalnya dilakukan dengan cara: penghasilan dibagi dua setelah dipotong biaya operasional dan cadangan untuk kerusakan. Cara ini memperlihatkan bahwa biaya-biaya, juga dikenakan pada anak buah kapal (ABK). Satu bagian untuk pemilik kapal dan bagian yang diberikan pada ABK masih akan dibagi lagi dengan perincian sebagai berikut:

1. Nahkoda 5 bagian
2. Motoris/KKM 4 bagian
3. Juru 2 bagian
4. ABK biasa tanpa jabatan 1 bagian

Sistem pembagian di atas jelas bertentangan dengan Undang-undang No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan terutama pasal 3 ayat (1) point 1 yang menyatakan jika dipergunakan kapal motor penggarap (nelayan pekerja) dalam hal ini adalah nahkoda minimal memperoleh 40% dari hasil bersih.

Dalam ayat (2) dinyatakan:

"Pembagian hasil di antara para nelayan penggarap dari bagian mereka terima menurut keterangan dalam ayat 1 pasal ini diatur oleh mereka sendiri, dengan diawasi oleh pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan terjadinya pemerasan, dengan ketentuan, bahwa perbandingan antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) lawan 1 (satu)".

Dalam pasal 10 ayat (1) undang-undang yang sama disebutkan jika seorang nelayan pekerja bekerja dengan dasar upah, maka besarnya upah ditentukan atas dasar kebijaksanaan dan persetujuan dari Menteri Tenaga Kerja, setelah mendengar masukan dari Menteri Bidang Perikanan dan organisasi nelayan.

### **2.1.3. Perizinan Usaha Perikanan**

Peraturan perundangan yang membahas mengenai pemanfaatan sumber daya ikan dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1984 tentang Usaha Perikanan. Untuk lebih memperkuat maka dikeluarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, undang-undang ini menggantikan hukum laut dan perikanan peninggalan Belanda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pengelolaan sumber daya ikan yang dianggap perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan (Dinas Perikanan Jawa Tengah, 1985). Pelaksanaan dari undang-undang tersebut dijabarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1990 tentang perubahan PP No. 15 tahun 1984 dan perubahan terakhir PP tentang usaha perikanan adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 141 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan.

PP Nomor 15 Tahun 1990 berisi tentang pedoman pengelolaan dan perizinan usaha perikanan di Wilayah Hukum Laut Republik Indonesia yang selanjutnya lebih ditegaskan dalam PP No. 141 tahun 2000. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya PP No. 141 Tahun 2000 adalah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor perikanan dengan cara menarik pungutan pada saat permohonan baru maupun perpanjangan Surat Izin Penangkapan dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan.

Perizinan Usaha Perikanan merupakan salah satu komponen dalam manajemen perikanan, yang ditujukan agar pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan secara terkendali sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kemakmuran bangsa untuk masa kini maupun masa mendatang (Dirjen Perikanan Tangkap, 2000).

Menurut Nurjana (2001) perijinan dalam usaha perikanan merupakan salah satu kontrol bagi pemanfaatan sumber daya ikan dapat dilakukan terkendali dan bijaksana sehingga dapat memberikan manfaat yang lestari bagi bangsa pada saat sekarang ataupun masa mendatang.

Tujuan dari perizinan usaha perikanan menurut Nurjana (2001) adalah:

1. Menjaga kelestarian sumber daya laut/ekosistem perairan

Eksplorasi yang berlebihan akan berakibat buruk baik kelangsungan dan kelestarian dari sumber daya laut/ekosistem perairan, dengan perizinan diharapkan akan memudahkan kontrol terhadap kemampuan eksploitasi pelaku usaha perikanan.

Penggunaan alat tangkap juga menjadi bagian dari perizinan karena penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan akan dilarang seperti racun dan bahan peledak.

2. Mengatur struktur usaha penangkapan

Lewat perizinan dapat diatur struktur usaha dengan mengatur jalur penangkapan kapal besar dengan nelayan tradisional sehingga dapat menghindari benturan-benturan.

3. Mengatur keseimbangan usaha dan daya dukung ekosistem

Melalui perizinan dapat ditentukan hasil laut yang dapat dieksploitasi dengan memandang kelestariannya, serta mencegah eksploitasi biota laut yang dilindungi karena keberadaannya sudah langka atau hampir punah seperti ikan paus dan kura-kura.

4. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak

5. Perlindungan dan pengembangan usaha perikanan tangkap

Individu atau kelompok yang telah mengantongi perizinan akan terlindungi secara hukum karena usahanya telah dilegalisasi dan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan pihak pengelola.

Sedangkan perizinan usaha perikanan yang diberlakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45 tahun 2000 adalah:

1. Izin Usaha Perikanan (IUP), yaitu izin tertulis yang harus dimiliki oleh Perusahaan Perikanan yang melakukan Usaha Pembudidayaan Ikan atau Usaha Penangkapan Ikan dengan menggunakan Kapal Perikanan beserta Alat Penangkap Ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan dan atau usaha pengangkutan ikan.
2. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), yaitu persetujuan yang diberikan kepada Perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan.
3. Surat Penangkapan Ikan (SPI), yaitu surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari IUP.
4. Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan.

5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
6. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA), yaitu surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan.
7. Surat Persetujuan Kapal Pengangkut Ikan Asing (SPKPIA), yaitu surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan perusahaan bukan perusahaan perikanan.

Kewenangan pengelolaan sumber daya kelautan adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah. Dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Wilayah Daerah Propinsi terdiri atas wilayah darat dan wilayah laut sejauh 12 mil yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan, dalam pasal 10 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota di wilayah laut adalah sejauh sepertiga dari batas wilayah laut propinsi.

Wewenang pemberian izin usaha penangkapan ikan juga berjenjang sesuai dengan jenis usaha, peralatan dan wilayah penangkapan. Sesuai dengan UU No. 22 tahun 1999 dan PP No. 141 tahun 2000 diatur sebagai berikut:

1. Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:  
IUP, SPI, SIKPPII dan SIKPII kepada Perusahaan Perikanan atau Perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan atas wilayah laut

sejauh Kabupaten/Kota yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tak bermotor, kapal perikanan bermotor luar dan kapal perikanan bermotor dalam (*inboard motor*) yang berukuran tidak lebih dari 10 GT dan atau 30 daya kuda (DK), dan atau berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan tenaga asing.

2. Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan:

IUP, SPI, SIKPII dan SIKPII kepada Perusahaan Perikanan atau Perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan atas wilayah laut sejauh 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (*inboard motor*) yang berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau kapal dengan mesin berkekuatan tidak lebih dari 90 daya kuda (DK), dan atau berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal dan tenaga asing.

3. Departemen Kelautan dan Perikanan atau Ditjen Perikanan Tangkap memberikan:

IUP, SPI, SIKPII dan SIKPII kepada Perusahaan Perikanan atau Perikanan yang melakukan usaha penangkapan ikan atas wilayah laut lebih dari 12 mil laut yang diukur dari garis pantai ke arah perairan kepulauan, yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam (*inboard motor*) yang berukuran lebih dari 30 GT dan atau kapal dengan mesin berkekuatan lebih dari 90 daya kuda (DK), dan atau panjang keseluruhan kapal minimal 18 meter.

#### **2.1.4. Penerapan Pungutan Perikanan**

Tindak lanjut dari PP No. 141 Tahun 2000 adalah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Penerimaan Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan. PP ini berisi petunjuk atas pungutan yang dilakukan, obyek pungutan, dan tata cara pembayaran pungutan. Pada pasal 1 PP No. 142 Tahun 2000 menyatakan bahwa:

1. Pungutan Perikanan adalah pungutan atas hasil penangkapan ikan yang harus dibayar kepada Pemerintah oleh nelayan, perusahaan perikanan nasional murni, perusahaan nasional dengan fasilitas Penanaman Modal Asing / Penanaman Modal Dalam Negeri yang harus memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP), Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), Surat Penangkapan Ikan (SPI), Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII), atau Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan.
2. Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Perikanan dan atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan dalam Wilayah Perikanan Republik Indonesia.
3. Pungutan Hasil Perikanan (PHP) adalah pungutan negara yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal Penangkapan dan Pengangkut Ikan Indonesia dan atau Surat Izin Penangkapan Ikan sesuai dengan hasil produksi yang diperoleh dan dijual di dalam negeri dan atau luar negeri.

Selanjutnya dalam pasal 2 diterangkan bahwa penerimaan negara tersebut adalah pungutan perikanan yang terdiri atas: Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).

Kapal yang terkena pungutan perikanan adalah kapal dengan ukuran yang lebih besar dari 30 *Gross Tonnage (GT)* atau menggunakan mesin di atas 90

tenaga kuda dan atau panjang kapal minimal 18 meter dan beroperasi di luar 12 mil batas pantai atau kearah perairan kepulauan.

Untuk kapal dengan ukuran kurang dari 30 *Gross Tonage (GT)* atau menggunakan mesin kurang dari 90 tenaga kuda dan atau panjang kapal maksimal 18 meter dan atau beroperasi di dalam 12 mil batas pantai perizinannya sesuai dengan penjelasan pasal PP No. 142 Tahun 2000 adalah diatur oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 8 PP No. 142 tahun 2000 dijelaskan bahwa pungutan perikanan ini disetorkan dalam rekening Kas Negara.

### **1) Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP)**

Pada pasal 2 PP No. 142 tahun 2000 diterangkan bahwa penerimaan negara salah satunya terdiri atas Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP). Pungutan Pengusahaan Perikanan dikenakan saat memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) atau Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (KPAA), besarnya berdasarkan rumusan tarif per *Gross Tonage (GT)* dikalikan ukuran kapal *Gross Tonage (GT)* menurut jenis alat tangkapnya.

PPP harus dibayar 50% pada saat memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP) dengan tenggang waktu 1 bulan dan jika tidak dibayar maka IUP akan dibatalkan dan sisanya (50%) harus dilunasi pada saat memperoleh SPI/SIKPPIL.

### **2) Pungutan Hasil Perikanan (PHP)**

Pungutan Hasil Perikanan besarnya adalah 2,5% dikalikan produktivitas kapal dan Harga Patokan Ikan (HPI). Produktivitas kapal ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik berdasarkan tingkat pemanfaatan, harga

patokan ikan akan ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan secara periodik.

PHP ini dikenakan pada kepada setiap pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) dan/atau Surat Izin Penangkapan Ikan dan/atau Surat Izin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPPII) sesuai dengan hasil produksi baik yang diperoleh di wilayah Indonesia atau luar dan dipasarkan di dalam atau luar negeri.

Pembayaran PHP ini dilakukan ketika akan memperoleh SPI atau SIKPPII dan dibayar untuk jangka waktu 1 tahun. Tanggal jatuh temponya adalah 'ulang tahun' dari diterbitkannya surat izin tersebut. SPP PHP ini wajib dibayarkan dalam tempo 1 bulan, jika gagal maka permohonan SPI dan SIKPPII dinyatakan batal.

Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, di dalamnya juga diatur tentang pemanfaatan dana-dana pungutan tersebut termasuk penggunaan Pungutan Perikanan. Untuk pemanfaatan dana dari pungutan perikanan ini diatur 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80%-nya dibagi rata untuk seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia.

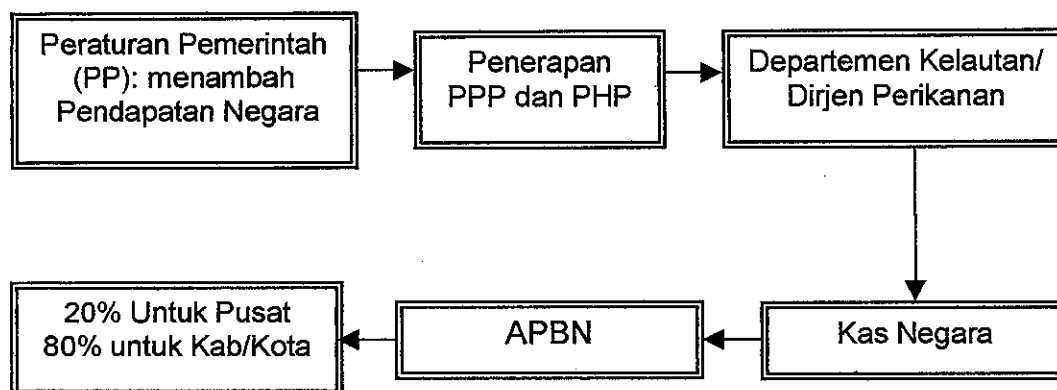
## **2.2. Landasan Teori**

Pungutan Perusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) yang ditetapkan pemerintah pada PP No. 142 tahun 2000, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penghasilan negara. Penerapan PPP dan PHP oleh pemerintah adalah sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, dan perlindungan

masyarakat, pengelolaan kekayaan negara, serta pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dengan demikian, semua pemilik kapal, diwajibkan untuk membayar pungutan tersebut sesuai dengan yang diatur dalam PP No. 142 tahun 2000. Bagi pemilik kapal yang tidak mematuhi, maka akan dikenakan sanksi hingga sampai pencabutan izin usaha penangkapan ikan.

Hasil penerimaan dari pungutan tersebut secepatnya dimasukkan ke dalam kas negara, yang kemudian dikelola dalam sistem Anggaran Penghasilan dan Belanja Negara.

Secara skematis pelaksanaan PPP dan PHP yang diatur dalam PP No. 142 tahun 2000 tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



**Ilustrasi 2. Penerapan PPP dan PHP sebagai Sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak**

Penerapan PPP dan PHP sebagai salah satu pemasukan kas negara, di khawatirkan oleh para nelayan akan dapat mengurangi penghasilannya. Hal ini

antara lain disebabkan ketentuan dalam komponen pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah kurang sesuai kenyataan di lapangan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Materi Penelitian

Obyek penelitian ini adalah para pemilik dan nelayan (ABK) kapal *purse seine* yang berada di kota Pekalongan Jawa Tengah dengan materi penelitian adalah meliputi hasil tangkap terdiri dari jenis, komposisi, harga per jenis ikan serta penghasilan nelayan (ABK) dan besarnya PPP dan PHP yang harus dibayarkan kapal *purse seine* yang berukuran *tonase* di atas 30 GT atau daya mesin di atas 90 tenaga kuda, jangkauan tangkap di luar 12 mil laut, atau panjang kapal minimal 18 meter.

#### 3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan kasusnya adalah unit-unit usaha penangkapan ikan dengan perahu *purse seine* berukuran lebih dari 30 GT yang berada di kota Pekalongan, Jawa Tengah.

#### 3.3. Metode Penentuan Responden (Sampel)

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sistematis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebelum diambil sampel, kapal-kapal *purse seine* berukuran lebih dari 30 GT dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu kelompok (1) yang melunasi Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dan kelompok (2) yang belum melunasi PPP dan PHP.

- a. Kelompok (1) terdiri dari 40 kapal, diambil sebagai sampel secara sistematis sejumlah 20 kapal.
- b. Kelompok (2) terdiri dari 379 kapal, diambil sebagai sampel secara sistematis sejumlah 20 kapal.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk kedua kelompok (Kelompok 1 dan kelompok 2) adalah homogenitasnya sama yakni:

- 1) Ukuran kapal antara 90 sampai dengan 200 GT.
  - 2) Jumlah anak buah kapal antara 35 sampai dengan 40 orang.
  - 3) Masa melaut antara 35 sampai dengan 40 hari.
  - 4) Daerah penangkapan di seputar perairan Masalembu.
2. Selanjutnya responden diambil dari nelayan yang terpilih {kelompok (1) dan (2)} yang terdiri dari unsur pemilik kapal dan yang mewakili strata/jabatan dalam kapal yaitu:
- a. Nahkoda (biasanya 2 orang) ditentukan 1 orang sebagai responden.
  - b. Motoris/KKM (biasanya 2 orang), ditentukan 1 orang sebagai responden.
  - c. Juru gudang, juru arus, juru lampu, juru masak, dan juru perbekalan (biasanya antara 10 s/d 15 orang), ditentukan 1 orang sebagai responden karena sistem pembagiannya homogen.
  - d. ABK biasa (pada umumnya berjumlah antara 20 s/d 25 orang), diambil 1 orang sebagai responden karena sistem pembagiannya homogen.

Sehingga total responden dari kelompok (1) adalah 100 orang dan total responden dari kelompok (2) adalah 100 orang. Total keseluruhan responden adalah 200 orang.

### 3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan responden dan observasi melalui pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi dengan menggunakan kuesioner.

Data primer meliputi:

1. Identitas responden yaitu para pemilik dan nelayan (ABK) kapal *purse seine* (> 30 GT).
2. Pendapat responden mengenai penerapan PPP dan PHP.
3. Penghasilan responden yang sudah melunasi dan belum melunasi PPP dan PHP.
4. Hasil tangkapan dan besaran PPP dan PHP yang telah dibayar.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua dengan pencatatan pada instansi yang terkait dalam hal ini adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Pekalongan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pekalongan, Kantor Statistik Pekalongan, dan penelitian terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian.

Data sekunder meliputi:

1. Keadaan umum daerah penelitian.
2. Jumlah kapal *purse seine* dari tahun 1997-2001 di Pekalongan.
3. Jumlah nelayan kapal *purse seine* dari tahun 1997-2001 di Pekalongan.
4. Data produksi dan komposisi jenis ikan hasil tangkap *purse seine* di Kota Pekalongan dari tahun 1997-2001.
5. Harga ikan hasil tangkapan nelayan *purse seine* dari tahun 1997-2001.

6. Harga patokan ikan yang ditetapkan pemerintah (Memperindag).
7. Komposisi hasil tangkap alat *purse seine* yang ditetapkan pemerintah (Menteri Kelautan dan Perikanan).

### **3.5. Analisis Data**

Berdasarkan tujuan penelitian yang timbul dari permasalahan maka digunakan data-data sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan. Karena masing-masing tujuan penelitian memiliki karakteristik data tersendiri sehingga analisis masing-masing tujuan menggunakan metode yang berbeda, analisis data masing-masing tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

#### **3.5.1. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkap Kapal *Purse Seine***

Untuk mengetahui komposisi dan jenis-jenis ikan hasil tangkap kapal *purse seine*, selama lima tahun sepanjang musim, maka langkah analisis yang dilakukan adalah: *pertama*, dilakukan tabulasi terhadap data yang diperoleh. *Kedua*, dicari rata-rata komposisi dan jenis ikan dalam satu tahun. *Ketiga*, dicari rata-rata komposisi dan jenis ikan selama lima tahun. Untuk mencari rata-rata dilakukan dengan bantuan komputer. Hasilnya kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

#### **3.5.2. Penentuan Harga Ikan**

Untuk mengkaji tujuan penelitian yang kedua yakni tentang harga ikan selama lima tahun sepanjang musim, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, dilakukan tabulasi data yang diperoleh. *Kedua*, dicari harga rata-rata ikan per tahun. *Ketiga*, masing-masing harga ikan per tahun tersebut,

kemudian dikonversikan dengan perhitungan indeks harga ikan atau harga barang pada tahun tersebut dan tahun 2001 (John Dixon, 1989). Harga rata-rata ikan yang telah dikonversikan, kemudian dikalikan dengan jumlah produksi ikan hasil tangkapan per jenis ikan, dan hasilnya dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.

### 3.5.3. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan

Untuk mengkaji tujuan penelitian yang ketiga yakni pengaruh pungutan perikanan terhadap penghasilan nelayan. Dilakukan perbandingan pendapatan pemilik kapal dan anak buah kapal (ABK) kapal *purse seine* antara yang sudah melunasi PPP dan PHP dengan nelayan yang kapalnya belum melunasi PPP dan PHP dilakukan dengan analisis uji beda. Sebelumnya diuji dahulu dengan uji *Liliefors* untuk mengetahui apakah data hasil penelitian menyebar normal atau tidak. Berdasarkan uji *Liliefors* diketahui bahwa data penelitian memiliki data sebaran normal sehingga digunakan uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Uji } t = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^k \frac{\left( R_i - \frac{n_i}{2}(N+1) \right)^2}{n_i}$$

Adapun ketentuan daerah penolakan adalah jika nilai  $t >$  nilai tabel, maka  $H_0$  ditolak dan sebaliknya. Jika ditolak dapat disimpulkan bahwa penerapan PPP dan PHP ternyata mempengaruhi terhadap pendapatan nelayan *purse seine*.

Untuk memudahkan perhitungan dan pengolahan salah satu dari cara di atas dipakai bantuan komputer (dalam hal ini SPSS for Windows), daerah penolakan  $H_0$  jika nilai *sig (output)*  $<$  nilai *sig* yang ditentukan (biasanya  $p = 0,05$ ).

#### **3.5.4. Besaran PHP Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan diketahui komposisi ikan hasil tangkapan dan harga ikan yang dapat dijadikan sebagai harga patokan ikan.

Kemudian dapat diketahui besaran PHP menurut hasil penelitian. Selanjutnya dibandingkan antara besaran PHP yang ditetapkan pemerintah dengan besaran PHP hasil penelitian.

#### **3.6. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada awal bulan Mei tahun 2002 dengan mengambil daerah penelitian di Kota Pekalongan Propinsi Jawa Tengah. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini, karena di Pekalongan sebagian besar kapal berbobot lebih dari 30 GT yaitu 557 kapal di mana sebanyak 419 kapal adalah menggunakan alat tangkap *purse seine*.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Daerah Penelitian

##### 4.1.1. Keadaan Geografis

Kota Pekalongan yang berada di wilayah Propinsi Jawa Tengah terletak di dataran rendah dengan ketinggian 1 (satu) meter di atas permukaan laut. Secara astronomi, Kota Pekalongan terletak pada koordinasi antara  $6^{\circ} 50' 42'' - 6^{\circ} 55' 44''$  LS dan  $109^{\circ} 37' 55'' - 109^{\circ} 42' 19''$  BT. Sebagai salah satu kota di kawasan pantai utara, Kota Pekalongan mempunyai pantai sepanjang 5,6 km dengan wilayah seluas 4.486 ha. Kondisi topografi atau lahan di Kota Pekalongan tergolong dalam jenis tanah *aluvial kelabu* dan *aluvial yohidromorf*. Kota Pekalongan yang beriklim tropis memiliki rata-rata curah hujan cukup yang berkisar antara 23 – 299 mm pada tahun 2000.

Secara administratif, Kota Pekalongan dibagi menjadi 4 kecamatan dan 44 desa atau kelurahan. Adapun nama-nama kecamatan di Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah desa sebanyak 5 buah dan kelurahan sebanyak 8 buah, Kecamatan Pekalongan Timur memiliki desa sebanyak 5 buah dan kelurahan sebanyak 8 buah, Kecamatan Pekalongan Selatan terdiri dari 5 buah desa dan 2 buah kelurahan, dan Kecamatan Pekalongan Utara terdiri dari 5 desa dan 6 kelurahan. Adapun data secara lengkap dan jelas tentang nama-nama kecamatan beserta luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini.

**Tabel 5**  
**Nama-nama Kecamatan di Kota Pekalongan beserta Luas Wilayah**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Pekalongan Barat	10,05	5	8
2.	Pekalongan Timur	9,52	5	8
3.	Pekalongan Selatan	10,80	5	2
4.	Pekalongan Utara	14,88	5	6
Total		45,25	20	24

Sumber: Kantor Statistik Kota Pekalongan

Batas administratif Kota Pekalongan mulai dari batas utara, selatan, barat, dan timur dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Kota Pekalongan memiliki luas wilayah sebesar 4.486 ha atau hanya 0,14 persen dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Dari luas wilayah tersebut, kondisi lahan di Kota Pekalongan sebagian besar merupakan lahan kering dan sebagian sisanya berupa lahan sawah. Adapun perinciannya adalah seluas 2.970 ha atau 66,21 persen untuk lahan kering, dan untuk lahan sawah seluas 1.516 ha atau 33,79 persen.

#### **4.1.2. Gambaran Umum Perikanan di Kota Pekalongan**

Sebagai kota yang terletak di pesisir pantai utara, perekonomian di Kota Pekalongan didominasi oleh sektor perikanan setelah sektor perindustrian. Dalam sektor perikanan, kegiatan perikanan yang ada di Kota Pekalongan mencakup perikanan tangkap, perikanan budidaya, pemasaran produk

perikanan, dan proses pengolahan produk perikanan. Dari berbagai jenis kegiatan perikanan tersebut, kegiatan perikanan yang mendominasi atau dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Kota Pekalongan adalah perikanan tangkap dimana dalam kegiatan tersebut para nelayan aktif dalam kegiatan melaut.

Pelabuhan perikanan yang merupakan syarat kota perikanan juga terdapat di Kota Pekalongan. Pelabuhan perikanan di kota tersebut diklasifikasikan cukup memadai karena mampu mengakomodir semua kegiatan di sektor perikanan. Adapun kegiatan-kegiatan yang terkait dengan sektor perikanan antara lain:

- 1) Sarana dan prasarana perikanan tangkap.
- 2) Perbengkelan, *docking* kapal dan galangan kapal.
- 3) Industri pengolahan produk perikanan dan industri bahan pengawet.
- 4) Perdagangan.
- 5) Transportasi dan ekspedisi ekspor impor.

Dari berbagai kegiatan-kegiatan di atas, satu sama lain saling memiliki keterkaitan. Adanya keterkaitan tersebut mempengaruhi atau berdampak positif terhadap laju pertumbuhan di kawasan pantai Kota Pekalongan sehingga pendapatan masyarakat per kapita akan mengalami peningkatan.

Kegiatan perikanan tangkap di Kota Pekalongan dilakukan oleh kapal-kapal dengan berbagai macam jenis alat tangkap yang terdiri dari *purse seine*, jaring *gillnet*, *long line*, dan lain-lain. Dari berbagai jenis alat tangkap tersebut, alat tangkap *purse seine* merupakan alat tangkap yang digunakan oleh sebagian besar nelayan di Kota Pekalongan. Penggunaan alat tangkap *purse seine* yang mendominasi disebabkan oleh adanya keunggulan dan kemudahan yang terdapat pada alat tangkap tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Dinas

Perikanan Kota Pekalongan, keunggulan alat tangkap *purse seine* ditunjukkan oleh lebih besarnya jumlah hasil produksi ikan yang didaratkan di TPI Kota Pekalongan dibandingkan dengan hasil produksi kapal yang menggunakan alat tangkap lain pada tahun 2001. Adapun jumlah produksi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dengan kapal lain dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6**  
**Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap Menurut Alat Tangkap di Kota Pekalongan Tahun 2001**

No	Jenis Alat	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (Rp 000)
1.	<i>Purse seine</i>	67.514	194.710.376
2.	<i>Mini Purse seine</i>	1.817	5.240.228
3.	<i>Gill net</i>	1.372	3.953.964
4.	Lainnya	1.211	3.492.524
<b>Jumlah Tahun 2001</b>		<b>71.914</b>	<b>207.397.092</b>

Sumber: Dinas Perikanan Kota Pekalongan

Perkembangan jumlah kapal perikanan *purse seine* selama 10 tahun terakhir mengalami peningkatan dengan pesat dibandingkan dengan kapal yang menggunakan alat tangkap yang lain. Namun pada tahun 1996, jumlah kapal *purse seine* mengalami penurunan yang dimana pada tahun 1995 sebanyak 407 buah menjadi 394 buah pada tahun 1996. Peningkatan jumlah kapal *purse seine* kembali terjadi mulai tahun 1997 hingga 2000, pada tahun 2001 jumlah kapal *purse seine* kembali mengalami penurunan. Perincian perkembangan jumlah kapal dari beberapa jenis alat tangkap di Kota Pekalongan secara jelas dan lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.

**Tabel 7**  
**Jenis Alat Tangkap dan Jumlah Kapal Perikanan Tahun 1992 – 2001**

Tahun	Kapal dengan Jenis Alat Tangkap			Jumlah
	<i>Purse Seine</i>	<i>Gill Net</i>	Alat lain	
1992	307	208	12	527
1993	342	219	9	570
1994	348	287	9	644
1995	407	195	9	611
1996	394	127	11	532
1997	461	91	54	606
1998	479	49	128	656
1999	521	49	136	706
2000	566	49	109	724
2001	505	61	130	696

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan

Dari data tabel di atas, penurunan jumlah kapal *purse seine* pada tahun 1996 dan 2001 disebabkan oleh banyaknya kapal perikanan dengan alat tangkap *purse seine* tersebut dimodifikasi menjadi kapal dengan alat tangkap *long line*.

Kegiatan perikanan *purse seine* merupakan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jaring *purse seine* yang disebut pula dengan pukot cincin atau jaring lingkaran, selain itu ada pula yang menyebutnya dengan payang. Strategi atau cara dalam penangkapan ikan dengan alat tangkap *purse seine* yaitu dengan melingkarkan jaring pada gerombolan ikan, kemudian jaring pada bagian bawah dikerucutkan, sehingga ikan-ikan akan terkumpul di bagian kantong. Mata jaring dan jaring berfungsi bukan sebagai penjerat ikan melainkan hanya sebagai dinding penghadang saja.

Seiring dengan adanya perkembangan jumlah armada kapal perikanan di Kota Pekalongan menuntut adanya penyesuaian alat tangkap dengan perkembangan armada kapal perikanan baik dari jenis maupun jumlahnya. Perkembangan pesat dari alat tangkap tersebut terjadi pada jenis alat tangkap

*purse seine* khususnya jenis *big purse seine* dengan ukuran *mesh size* 1 inchi, dalam 50 – 75 m dengan panjang 500 – 600 m.

Pada umumnya jaring yang digunakan memiliki ukuran yang bervariasi sesuai dengan keinginan pemakai yang dalam konteks ini adalah nahkoda atau juru mudi yang merupakan *fishing master* dalam kapal *purse seine*. Deskripsi alat tangkap *purse seine* yang banyak digunakan oleh nelayan Kota Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut ini.

**Tabel 8**  
**Deskripsi Alat Tangkap *Purse Seine***

No	Bagian	Bahan dan Ukuran	Mesh Size (inchi)	Panjang (m)	Keterangan
1.	Sayap	N D9/D6/D12	1 – 1,5	150 – 350	<i>Multi filament</i>
2.	Badan	M.F. D9	1/0,75	100 – 325	
3.	Kantong	M.F. D15/D12	1	150 – 175	
4.	<i>Selvedge</i>	PE, PVA D15		640 – 1132	<i>Poly ethylene</i>
5.	Tali pelampung	PE, PVA D12		640 – 1132	
6.	Tali ris atas	PE, PVA D10		666 – 1155	
7.	Tali ris bawah	PE, PVA D10		664 – 1155	
8.	Tali pemberat	PE, PVA D8		640 – 1432	
9.	Tali kolor	PE, PVA D25		664 – 1458	
10.	Pelampung	Karet			1700 – 2560
11.	Pemberat	Timah			2900 – 4160
12.	Cincin	Kuningan			120 – 320
13.	Tali <i>ring</i>	PE, PVA D10			

Sumber: Data Primer 2001

Dalam operasinya, kapal *purse seine* menargetkan sasaran penangkapan pada ikan pelagis kecil. Meskipun demikian tidak sedikit pula ikan yang tertangkap adalah jenis pelagis besar. Sumber daya ikan pelagis merupakan salah satu komoditas unggulan Kota Pekalongan dan mempunyai peranan yang cukup penting yaitu di samping sebagai bahan kebutuhan pemenuhan akan protein ikan, juga sebagai peluang atau lapangan kerja bagi penduduk, serta sebagai sumber pendapatan asli daerah dan devisa negara. Hasil produksi dan nilai produksi ikan pelagis yang didaratkan di Kota Pekalongan memberikan

kontribusi sebesar 94,1 persen dan 93,2 persen terhadap produksi dan nilai produksi perikanan laut di Pekalongan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha penangkapan telah dihasilkan penemuan dan inovasi, serta penggunaan alat bantu penangkapan seperti *fish finder*, *sonar*, *echo sounder*, *power block*, rumpon dan lampu, serta alat bantu navigasi seperti *global position system*, radio komunikasi SSB.

Ketatnya persaingan dalam pemburuan daerah operasi penangkapan ikan di laut mengakibatkan terjadinya perkembangan alat tangkap *purse seine* tersebut baik dari segi ukurannya maupun perluasan daerah penangkapannya yang meliputi Laut Cina Selatan, Kepulauan Natuna dan Selat Makasar. Dengan demikian operasi penangkapan memerlukan waktu yang cukup lama yaitu 40 hari. Di samping hal tersebut, diperlukan pula biaya eksploitasi yang semakin tinggi.

## **4.2. Deskripsi Nelayan Kapal *Purse Seine***

### **4.2.1. Deskripsi Responden**

Responden dalam penelitian ini terdiri dari 200 orang nelayan di Kota Pekalongan yang dibedakan atas status atau posisinya dalam kapal yaitu pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa serta kewajibannya yang terdiri dari sudah membayar PPP dan PHP dan belum membayar PPP dan PHP. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa karakteristik responden yang meliputi pendidikan, umur, bobot kapal, besar PPP dan PHP, jumlah trip dalam satu tahun, dan waktu yang dibutuhkan responden dalam satu trip. Untuk

mengetahui karakteristik responden dari yang sudah membayar dan belum membayar PPP dan PHP akan dibahas secara satu per satu di bawah ini.

#### 1. Pendidikan Responden

Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan diri dan memperluas wawasan yang dapat menunjukkan tingkat kualitas seseorang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat pendidikan para nelayan yang status dan posisinya terdiri dari pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

**Tabel 9**  
**Pendidikan Nelayan Kapal *Purse Seine* di Kota Pekalongan**

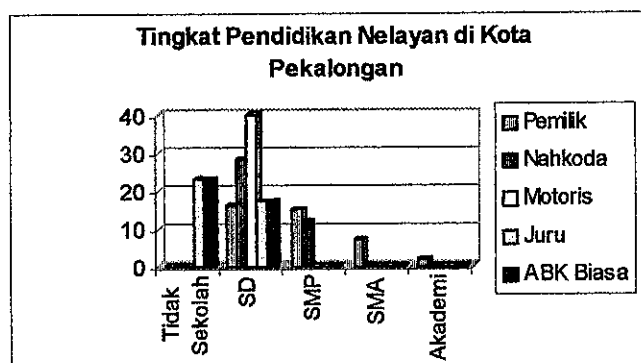
Pendidikan	Responden					Total	%
	Pemilik	Nahkoda	Motoris	Juru	ABK Biasa		
Tidak Sekolah	-	-	-	20	26	46	23
SD	16	28	40	20	14	118	59
SMP	15	12	-	-	-	27	13,5
SMA	7	-	-	-	-	7	3,5
Akademi	2	-	-	-	-	2	1
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian

Dari data Tabel 9 di atas, secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para nelayan yang terdiri dari pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa di Kota Pekalongan tergolong rendah. Tingkat pendidikan yang cukup tinggi pada umumnya dimiliki oleh nelayan yang berstatus sebagai pemilik, sedangkan tingkat pendidikan rendah dimiliki oleh nelayan dengan status sebagai ABK. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan di Kota Pekalongan ditunjukkan oleh banyaknya jumlah nelayan yang berpendidikan hanya sampai pada tingkat SD yaitu sebanyak 118 orang atau 59 persen, kemudian ditambah dengan jumlah nelayan yang tidak berpendidikan yaitu sebanyak 46 orang atau 23 persen. Tingkat pendidikan yang tergolong cukup tinggi adalah SMP dan SMA hanya dimiliki oleh sebanyak 34 orang atau 17 persen, dan nelayan dengan

tingkat pendidikan tinggi yaitu Akademi hanya sebanyak 2 orang atau 1 persen saja.

Tingkat pendidikan para nelayan di Kota Pekalongan dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang seperti berikut ini.



**Ilustrasi 3. Diagram Tingkat Pendidikan Nelayan Kapal *Purse Seine* di Kota Pekalongan**

## 2. Umur Responden

Umur atau usia dapat menunjukkan tingkat produktivitas seseorang dalam bekerja. Pada umumnya, orang yang masih muda dalam arti tidak tergolong anak-anak dan remaja memiliki produktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan produktivitas orang yang lebih tua. Hal ini diasumsikan bahwa orang yang berusia muda memiliki tenaga yang lebih besar dan stamina yang lebih kuat daripada orang tua. Usia dapat dikategorikan dalam usia produktif dan tidak produktif. Usia produktif ditunjukkan dengan batas antara 15 – 55 tahun, dan usia tidak produktif meliputi usia antara 1 – 14 tahun dan lebih dari 55 tahun.

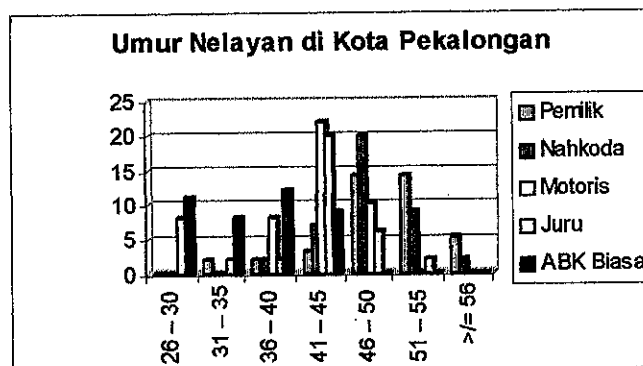
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data tentang umur nelayan di Kota Pekalongan yang dijadikan sebagai responden penelitian yang terdiri dari pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa. Umur nelayan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh kategori dengan *interval* sebesar 5 poin yaitu: 1)

26-30 tahun, 2) 31-35 tahun, 3) 36-40 tahun, 4) 41-45 tahun, 5) 46-50 tahun, 6) 51-55 tahun, dan 7) > 56 tahun. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10**  
**Umur Nelayan Kapal *Purse Seine* di Kota Pekalongan**

Umur (tahun)	Responden					Total	%
	Pemilik	Nahkoda	Motoris	Juru	ABK Biasa		
26 – 30	-	-	-	8	11	19	9,5
31 – 35	2	-	-	2	8	12	6
36 – 40	2	2	8	2	12	26	13
41 – 45	3	7	22	20	9	61	30,5
46 – 50	14	20	10	6	-	50	25
51 – 55	14	9	-	2	-	25	12,5
≥ 56	5	2	-	-	-	7	3,5
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 4. Diagram Umur Nelayan Kapal *Purse Seine* di Kota Pekalongan**

Dari data tabel dan diagram di atas tampak bahwa nelayan di Kota Pekalongan yang dijadikan sebagai responden penelitian yang terdiri dari pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa pada umumnya memiliki umur yang tergolong produktif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah nelayan sebanyak 61 orang atau 30,5 persen yang berumur antara 41 – 45 tahun, kemudian disusul oleh nelayan yang berusia antara 46 – 50 tahun yaitu sebanyak 50 orang atau 25 persen, sedangkan nelayan yang tergolong tidak produktif yaitu sebanyak 7 orang atau 3,5 persen dengan usia lebih atau sama dengan 56 tahun. Dari

jumlah nelayan yang berusia tidak produktif, sebagian besar dimiliki oleh nelayan dengan status sebagai pemilik.

Secara lebih terperinci dapat dikemukakan bahwa nelayan yang berstatus sebagai pemilik kapal yang tergolong dalam usia produktif sebanyak 35 orang dan nelayan dengan usia tidak produktif sebanyak 5 orang dari 40 orang pemilik kapal yang dijadikan sebagai responden penelitian. Untuk nahkoda yang berusia produktif ada sebanyak 38 orang dan 2 orang lainnya termasuk dalam usia tidak produktif, sedangkan untuk motoris, juru, dan ABK biasa secara keseluruhan memiliki umur yang tergolong produktif. Dengan banyaknya jumlah nelayan yang berusia produktif maka kegiatan melaut dapat dilakukan secara optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

### 3. Bobot Kapal Responden

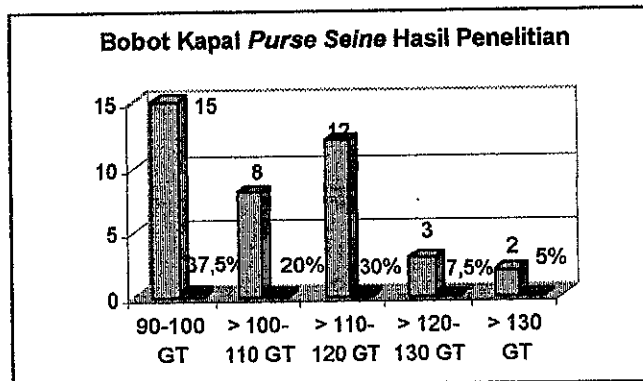
Dalam penelitian ini hanya difokuskan pada kapal *purse seine* yang memiliki bobot seberat lebih dari 30 GT dan dikategorikan menjadi dua yaitu kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dan kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai bobot kapal *purse seine* yang dimiliki oleh nelayan di Kota Pekalongan yang sudah membayar dan belum membayar PPP dan PHP. Ukuran berat atau bobot kapan *purse seine* baik yang sudah membayar maupun belum membayar PPP dan PHP di Kota Pekalongan terkecil adalah 90 GT dan terbesar atau terberat adalah 135 GT. Dari bobot teringan dan terberat tersebut dapat dikategorikan menjadi lima yaitu: 1) 90-100 GT, 2) > 100-110 GT, 3) > 110 – 120 GT, 4) > 120-130 GT, dan 5) > 130 GT. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11.

**Tabel 11**  
**Bobot Kapal Purse Seine Hasil Penelitian**

Responden	Ukuran Kapal					Total
	90-100 GT	> 100-110 GT	> 110-120 GT	> 120-130 GT	> 130 GT	
Nelayan	15	8	12	3	2	40
	37,5%	20%	30%	7,5%	5%	100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 5. Diagram Bobot Kapal Purse Seine Hasil Penelitian**

Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa kapal *purse seine* hasil penelitian pada umumnya berbobot sebesar antara 90-100 GT ada 15 kapal atau 37,5 persen. Bobot kapal *purse seine* sebesar > 100-110 GT ada sebanyak 8 kapal atau 20 persen. Bobot kapal sebesar > 110-120 GT ada 12 kapal atau 30 persen. Sebanyak 3 buah atau 7,5 persen kapal *purse seine* memiliki bobot kapal sebesar > 120-130 GT, sedangkan bobot kapal paling besar yaitu > 130 GT hanya ada 2 buah kapal atau 5 persen saja.

#### 4. Nilai PPP dan PHP

PPP dan PHP merupakan penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan dan dikenakan kepada pengusaha perikanan. PPP dikenakan kepada pemegang Ijin Usaha Perikanan (IUP) dimana besar tarif yang dikenakan minimal sebesar 50 persen dari jumlah GT yang dialokasikan dalam IUP tersebut menurut jenis alat tangkap yang digunakan dan

50 persen sisanya dibayarkan setelah pemegang IUP menerima atau memperoleh Surat Penangkapan Ikan (SPI). Pungutan lainnya adalah PHP dimana dikenakan kepada pemegang SPI dan SIKPPil (Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia) yang besarnya disesuaikan dengan hasil tangkapan yang mampu diperoleh atau hasil produksi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh besar tarif PPP dan PHP sudah dibayarkan oleh pengusaha perikanan di Kota Pekalongan yang menggunakan kapal *purse seine* menurut bobot atau ukuran kapal yang digunakan untuk melaut. Penetapan tarif baik PPP dan PHP untuk setiap pengusaha berbeda walaupun ukuran kapal dan jenis alat tangkap yang digunakan sama. Adapun besar tarif yang telah dibayarkan oleh sebanyak 20 pengusaha perikanan *purse seine* berdasarkan jumlah ukuran kapal dari yang terkecil hingga terbesar dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

**Tabel 12**  
**Nilai PPP dan PHP Kapal *Purse Seine* di Kota Pekalongan**

No.	Ukuran Kapal (GT)	Tarif PPP (Rp)	Tarif PHP (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	90	568.200	9.152.494	9.720.694
2.	90	568.200	9.152.494	9.720.694
3.	91	605.250	9.254.188	9.859.438
4.	92	613.125	9.355.883	9.969.008
5.	94	635.625	9.559.271	10.194.896
6.	98	680.700	9.966.049	10.646.749
7.	99	680.700	10.067.743	10.748.443
8.	99	680.700	10.067.743	10.748.443
9.	101	675.714	10.271.132	10.946.846
10.	105	355.417	10.677.909	11.033.326
11.	107	371.300	10.881.298	11.252.598
12.	108	371.300	10.982.993	11.354.293
13.	110	405.000	11.186.381	11.591.381
14.	111	405.000	11.288.076	11.693.076
15.	113	405.000	11.491.464	11.896.464
16.	114	435.540	11.593.159	12.028.699
17.	116	641.250	11.796.548	12.437.798
18.	117	472.500	11.898.242	12.370.742
19.	129	607.500	13.118.574	13.726.074
20.	135	675.000	13.728.741	14.403.741

Sumber: PT. Sucofindo, Mei 2002

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa besar nilai PPP dan PHP untuk masing-masing pengusaha dan kapal tidak sama. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penentuan nilai PPP dan PHP tersebut seperti bobot kapal dan produktivitas ikan hasil tangkapan. Untuk nilai PPP yang ditetapkan dari perkalian antara ukuran kapal (GT) dengan tarif per GT per alat tangkap. Berbedanya ukuran kapal dan jumlah alat tangkap yang digunakan menyebabkan nilai PPP yang dikenakan kepada pengusaha juga berbeda, sedangkan untuk nilai PHP ditetapkan sebesar 2,5 persen dari perkalian antara hasil produksi dengan harga patokan ikan. Perbedaan nilai PHP disebabkan oleh berbedanya jumlah hasil tangkapan untuk masing-masing kapal.

#### 5. Jumlah Trip Setahun

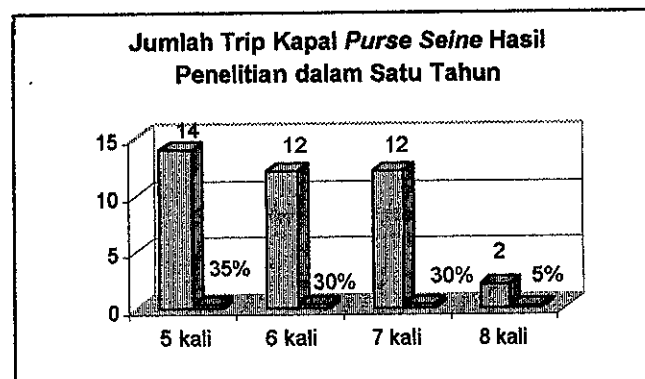
Trip merupakan frekuensi dalam melakukan kegiatan atau aktivitas melaut yang dinyatakan dalam kali per tahun. Jumlah trip dalam satu tahun yang dilakukan oleh nelayan di Kota Pekalongan dibedakan menjadi dua yaitu jumlah trip untuk kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dan jumlah trip untuk kapal yang belum membayar PPP dan PHP.

Secara keseluruhan baik untuk kapal *purse seine* yang sudah maupun yang belum membayar PPP dan PHP memiliki jumlah frekuensi melaut rata-rata sebanyak 6 kali dengan jumlah trip paling rendah sebanyak 5 kali dan jumlah trip paling tinggi sebanyak 8 kali dalam satu tahun. Adapun jumlah frekuensi melaut atau trip berdasarkan hasil penelitian terhadap 40 buah kapal yang terbagi menjadi dua kelompok yaitu sebanyak 20 kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dan 20 kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP. Untuk mengetahui lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

**Tabel 13**  
**Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian**  
**dalam Satu Tahun**

Responden	Jumlah Trip				Total
	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	
Nelayan	14	12	12	2	40
	35%	30%	30%	5%	100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 6. Diagram Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian dalam Satu Tahun**

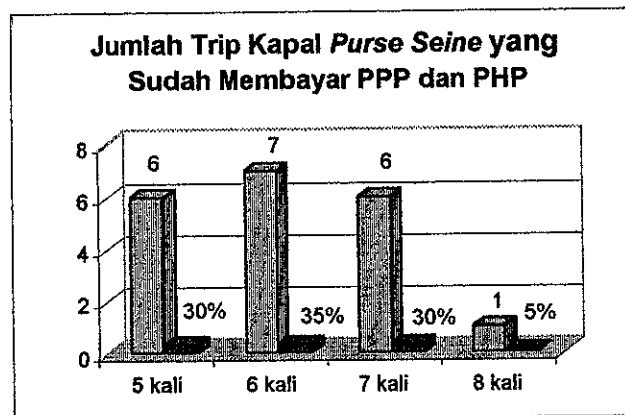
Dari data di atas tampak bahwa secara keseluruhan dari jumlah kapal *purse seine* hasil penelitian, pada umumnya memiliki frekuensi melaut sebanyak 5 kali dalam setahun. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 14 kapal atau 35 persen. Kapal *purse seine* yang memiliki jumlah trip atau frekuensi melaut sebanyak 6 dan 7 kali masing-masing sebanyak 12 kapal atau 30 persen. Jumlah trip paling tinggi yaitu sebanyak 8 kali hanya dimiliki oleh sebanyak 2 kapal *purse seine* saja atau sebesar 5 persen.

Berdasarkan data hasil penelitian tersebut, dapat dibedakan jumlah trip atau frekuensi melaut menurut kelompok kapal masing-masing. Untuk jumlah trip atau frekuensi melaut kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP di Kota Pekalongan dalam satu tahun dapat dilihat pada Tabel 14.

**Tabel 14**  
**Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian dalam Satu Tahun yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Responden	Jumlah Trip				Total
	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	
Nelayan	6	7	6	1	20
	30%	35%	30%	5%	100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 7. Diagram Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Dari data Tabel 14 dan Ilustrasi 6 di atas dapat diketahui bahwa untuk kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP pada umumnya melakukan kegiatan melaut dalam satu tahun sebanyak 6 kali. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 7 kapal atau 35 persen yang memiliki jumlah trip tersebut. Frekuensi melaut sebanyak 5 kali dan 7 kali dimiliki oleh masing-masing sebanyak 6 kapal atau 30 persen, dan jumlah trip atau frekuensi melaut tertinggi yaitu sebanyak 8 kali setahun hanya dilakukan oleh 1 buah kapal atau 5 persen saja.

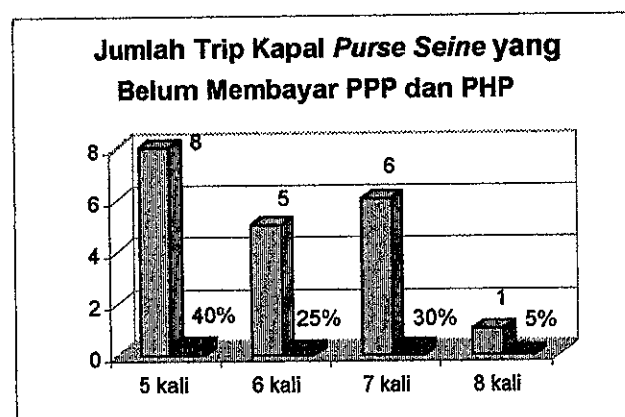
Jumlah trip atau frekuensi melaut kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP memiliki jumlah yang sama dengan kapal *purse seine* yang sudah

membayar PPP dan PHP yaitu frekuensi terkecil sebanyak 5 kali dan tertinggi sebanyak 8 kali. Hasil penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 15.

**Tabel 15**  
**Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian dalam Satu Tahun yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Responden	Jumlah Trip				Total
	5 kali	6 kali	7 kali	8 kali	
Nelayan	8	5	6	1	20
	40%	25%	30%	5%	100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 8. Diagram Jumlah Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Data tabel dan diagram tentang jumlah trip atau frekuensi melaut untuk kapal yang belum membayar PPP dan PHP di atas menunjukkan bahwa pada umumnya dalam melakukan aktivitas melaut tergolong rendah. Hal ini ditunjukkan dengan mendominasinya jumlah kapal dengan frekuensi melaut sebanyak 5 kali yaitu 8 buah kapal atau 40 persen. Kapal dengan frekuensi melaut sebanyak 7 kali dilakukan oleh 6 kapal atau 30 persen, kemudian frekuensi melaut sebanyak 6 kali dilakukan oleh 5 kapal atau 25 persen, dan jumlah trip atau frekuensi tertinggi yaitu 8 kali hanya dilakukan oleh 1 buah kapal saja atau 5 persen dari total kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP yaitu sebanyak 20 kapal.

## 6. Waktu yang Dibutuhkan dalam 1 Trip

Rendahnya jumlah trip dalam satu tahun disebabkan oleh lamanya waktu yang digunakan untuk melaut dalam satu trip. Waktu di sini dinyatakan dalam hari. Waktu yang digunakan oleh nelayan di Kota Pekalongan untuk melakukan aktivitas melaut dapat berkisar antara 30 hingga 40 hari per trip.

Dalam membahas waktu yang dibutuhkan untuk melaut per trip yang dilakukan oleh nelayan kapal *purse seine* juga dibedakan menjadi dua yaitu kapal yang sudah membayar dan kapal yang belum membayar PPP dan PHP. Dari kedua kelompok kapal *purse seine* tersebut, waktu paling rendah yang dibutuhkan untuk melaut adalah selama 35 hari, sedangkan waktu paling lama adalah 40 hari. Dari waktu terlama dan tercepat tersebut, waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut dapat ditentukan menjadi dua kategori yaitu selama 30 – 35 hari dan 36 – 40 hari. Dari 40 buah kapal *purse seine* yang diteliti diperoleh data mengenai waktu yang dibutuhkan dalam sekali melaut adalah sebagai berikut:

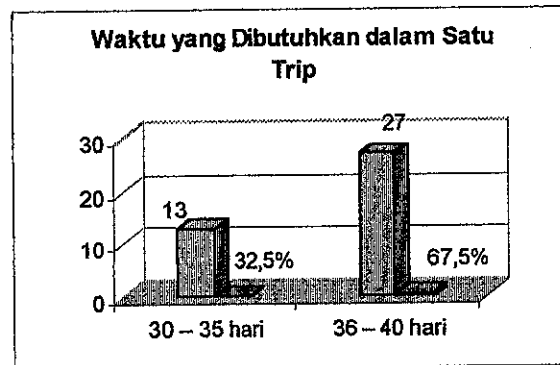
**Tabel 16**  
**Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut Kapal *Purse Seine***  
**Hasil Penelitian**

Responden	Waktu yang Dibutuhkan		Total
	30 – 35 hari	36 – 40 hari	
Nelayan	13	27	40
	32,5%	67,5%	100%

Sumber: Hasil penelitian

Berdasarkan pada data tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar nelayan kapal *purse seine* dalam melakukan kegiatan melaut per tripnya membutuhkan waktu selama 35 hingga 40 hari. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 27 kapal atau 67,5 persen, sedangkan sebanyak 13 kapal atau 32,5 persen lainnya membutuhkan waktu dalam sekali trip selama 30 hingga 35 hari.

Dari data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang yang dapat dilihat pada Ilustrasi 8 di bawah ini.



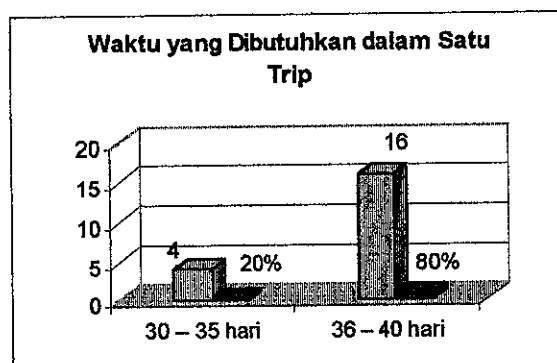
**Ilustrasi 9. Diagram Waktu yang Dibutuhkan Sekali Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian terhadap waktu yang dibutuhkan sekali melaut pada kapal *purse seine* secara keseluruhan tersebut dapat diketahui waktu yang dibutuhkan sekali melaut pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP. Dalam kategori yang sama, waktu yang dibutuhkan dalam kelompok kapal *purse seine* tersebut secara jelas dan lengkap dapat dilihat pada Tabel 17.

**Tabel 17**  
**Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip Melaut untuk Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Responden	Waktu yang Dibutuhkan		Total
	30 – 35 hari	36 – 40 hari	
Nelayan	4 20%	16 80%	20 100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 10. Diagram Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip untuk Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

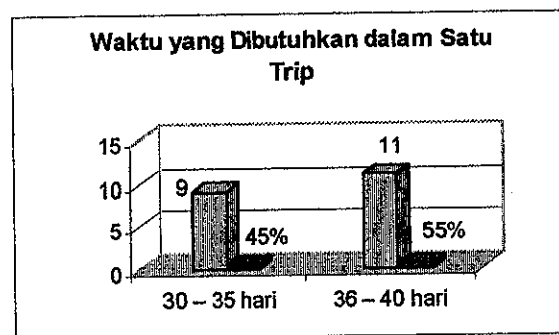
Berdasarkan data tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan oleh para nelayan kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP sekali trip tergolong cukup lama. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah kapal yang membutuhkan waktu selama 36 hingga 40 hari sekali trip yaitu sebanyak 16 buah atau 80 persen, sedangkan sisanya sebanyak 4 buah kapal atau 20 persen membutuhkan waktu selama 30 hingga 35 hari untuk melakukan kegiatan melaut dalam sekali trip.

Untuk kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP membutuhkan waktu yang sama untuk melaut dalam sekali trip yaitu paling cepat selama 35 hari dan terlama adalah 40 hari. Dengan kategori yang sama, waktu yang dibutuhkan oleh kapal *purse seine* untuk melaut dalam sekali trip dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini.

**Tabel 18**  
**Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip untuk Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Responden	Waktu yang Dibutuhkan		Total
	30 - 35 hari	36 - 40 hari	
Nelayan	9 45%	11 55%	20 100%

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 11. Diagram Waktu yang Dibutuhkan dalam Satu Trip untuk Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Dari data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas melaut untuk kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP juga tergolong cukup lama. Lamanya waktu yang dibutuhkan tersebut ditunjukkan oleh sebanyak 11 buah kapal atau 55 persen pada umumnya membutuhkan waktu selama 36 – 40 hari, sedangkan kapal *purse seine* yang hanya membutuhkan waktu selama 30 – 35 hari per trip untuk kelompok kapal yang belum membayar PPP dan PHP ada sebanyak 9 buah atau 45 persen.

#### **4.2.2. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkapan *Purse Seine***

*Purse seine* merupakan jenis alat tangkap yang dikategorikan menjadi dua yakni *big purse seine* dan *mini purse seine*. Dalam konteks ini, dari kedua jenis alat tangkap tersebut hanya akan membahas dan menguraikan tentang kapal dengan alat tangkap yang tergolong dalam *big purse seine* dimana ukurannya lebih dari 30 GT. Perkembangan alat tangkap *purse seine* dipengaruhi oleh semakin maju dan canggihnya perkembangan teknologi secara umum. Perkembangan pada alat tangkap *purse seine* terutama terjadi pada perkembangan ukuran yang digunakan. Hal ini ditunjukkan oleh semakin bervariasinya ukuran kapal dan alat tangkap *purse seine* yaitu dari ukuran kapal

yang sebelumnya di bawah 30 atau 60 GT sekarang menjadi di atas 30 atau 60 GT bahkan ada yang di atas 100 GT. Dengan berkembangnya ukuran kapal dan alat tangkap menjadikan daerah *fishing ground* semakin jauh dari pelabuhan Kota Pekalongan sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas melaut akan semakin lama pula.

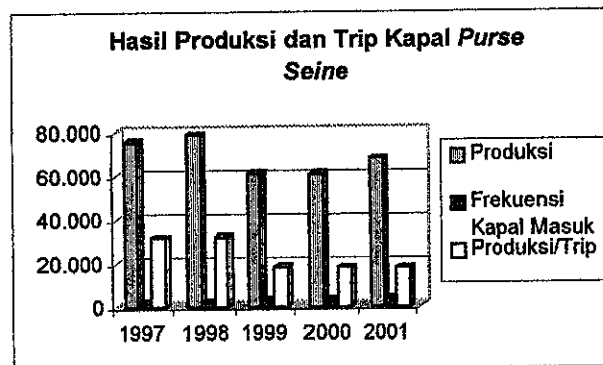
Berdasarkan data yang diperoleh dari Pelabuhan Perikanan Nusantara dan Dinas Perikanan Kota Pekalongan, produksi ikan hasil tangkapan *purse seine* dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2001 menunjukkan adanya fluktuasi perkembangan produksi ikan hasil tangkapan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 19.

**Tabel 19**  
**Produksi Perikanan *Purse Seine* yang Didaratkan di TPI Kota Pekalongan**

Tahun	Produksi (Ton/Tahun)	Frekuensi Kapal Masuk (kali)	Produksi/Trip (Kg/Trip)
1997	75.072	2.390	31.411
1998	78.475	2.478	31.669
1999	60.971	3.377	18.055
2000	60.610	3.385	17.905
2001	67.514	3.798	17.776

Sumber: TPI Kota Pekalongan

Dari data tabel di atas, pada tahun 1998 hingga 2000 produksi ikan hasil tangkapan *purse seine* mengalami penurunan dan pada tahun 2001 kembali mengalami peningkatan. Fluktuasi yang terjadi selama tahun 1997 hingga 2001 mengenai jumlah produksi yang didaratkan, jumlah tripnya maupun produksi persatuan upaya perkembangannya dapat dilihat pada gambar diagram 12 di bawah ini.



**Ilustrasi 12. Diagram Hasil Produksi Kapal Purse Seine yang Didaratkan di Kota Pekalongan Tahun 1997 – 2001**

Komposisi yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu komposisi untuk jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dan komposisi kualitas dari jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* yaitu ikan segar (yang diawetkan dengan es) dan ikan asinan atau garaman (yang diawetkan dengan garam).

Selama periode 1997 – 2001, hasil produksi kapal *purse seine* di Kota Pekalongan mengalami peningkatan dan penurunan. Dari tahun 1997 ke tahun 1998, hasil produksi ikan mengalami peningkatan yakni 75.072 ton menjadi 78.475 ton, sedangkan pada tahun 1999 dan 2000 produksi ikan hasil tangkapan menurun cukup drastis, namun pada tahun 2001 kembali mengalami peningkatan. Hasil tangkapan atau produksi kapal *purse seine* yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Kota Pekalongan terdiri dari berbagai jenis ikan yaitu Banyar (*Mackerels*), Bawal (*Black Pomfret*), Cumi-cumi (*Squids*), Cucut (*Sharks*), Kakap Merah (*Red Snappers*), Alu-alu (*Barracuda*), Layang (*Scads*), Lemuru (*Indian Oil Sardinella*), Layaran (*Martins*), Layur (*Hard Tiles*), Manyung (*Sea Cat Fishes*), Pari (*Rays*), Selar (*Trevalies*), Tembang (*Rainbow Sardines*), Tongkol (*Easters Little Tunas*), Tenggiri (*King Mackerels*), Remang (*Pike Eels*), Tetengkek (*Hard Tail Scad*), Teri (*Anchovies*) dan lainnya. Dari sekian banyak jenis ikan tersebut, yang merupakan hasil produksi atau tangkapan dari kapal

*purse seine* pada umumnya hanya terdiri dari lima jenis ikan yaitu Banyar atau Kembang, Layang, Lemuru, Selar, Tembang, dan jenis ikan lain termasuk dalam lainnya. Untuk mengetahui jumlah produksi hasil tangkapan kapal *purse seine* per bulan masing-masing jenis ikan akan disajikan per tahun yaitu dari tahun 1997 hingga 2001 yang dapat dilihat secara jelas pada Tabel 20 hingga Tabel 24 di bawah ini.

**Tabel 20**  
**Hasil Produksi Ikan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 1997 (dalam ton)**

Bulan	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
Jan	1.338	393	315	236	210	131	2.623
Feb	698	205	164	123	109	68	1.368
Maret	1.990	585	468	351	312	195	3.901
April	2.118	623	498	374	332	208	4.152
Mei	2.516	740	592	444	395	247	4.934
Juni	1.110	326	261	196	174	109	2.176
Juli	3.655	1.075	860	645	573	358	7.167
Agust	4.078	1.200	960	720	640	400	7.997
Sept	4.838	1.423	1.138	854	759	474	9.486
Okt	4.973	1.463	1.170	878	780	488	9.751
Nov	5.781	1.700	1.360	1020	907	567	11.336
Des	5.192	1.527	1.222	916	814	509	10.181
Total	38.287	11.261	9.009	6756	6.006	3.754	75.072

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2001

**Tabel 21**  
**Hasil Produksi Ikan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 1998 (dalam ton)**

Bulan	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
Jan	4.267	1.255	1.004	753	669	418	8.366
Feb	1.996	587	470	352	313	196	3.913
Maret	3.126	919	735	552	490	306	6.129
April	3.167	931	745	559	497	310	6.209
Mei	3.016	887	710	532	473	296	5.913
Juni	2.893	851	681	510	454	284	5.672
Juli	2.756	811	648	486	432	270	5.404
Agust	2.544	748	599	449	399	249	4.988
Sept	3.458	1.017	814	610	542	339	6.781
Okt	6.094	1.792	1.434	1075	956	597	11.949
Nov	3.770	1.109	887	665	591	370	7.393
Des	2.937	864	691	518	461	288	5.758
Total	40.022	11.771	9.417	7063	6.278	3.924	78.475

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2001

**Tabel 22**  
**Hasil Produksi Ikan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 1999 (dalam ton)**

Bulan	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
Jan	1.436	422	338	253	225	141	2.815
Feb	1.005	296	237	177	158	99	1.971
Maret	1.900	559	447	335	298	186	3.726
April	2.513	739	591	443	394	246	4.927
Mei	2.493	733	587	440	391	244	4.888
Juni	1.511	444	355	267	237	148	2.962
Juli	2.423	713	570	428	380	238	4.751
Agust	3.848	1.132	905	679	604	377	7.545
Sept	4.162	1.224	979	734	653	408	8.161
Okt	3.752	1.103	883	662	588	368	7.356
Nov	3.336	981	785	589	523	327	6.542
Des	2.717	799	639	479	426	266	5.327
Total	31.095	9.146	7.317	5487	4.878	3.049	60.971

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2001

**Tabel 23**  
**Hasil Produksi Ikan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 2000 (dalam ton)**

Bulan	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
Jan	1.002	295	236	177	157	98	1.964
Feb	1.416	417	333	250	222	139	2.777
Maret	1.921	565	452	339	301	188	3.766
April	2.005	590	472	354	314	197	3.931
Mei	2.099	617	494	370	329	206	4.116
Juni	2.357	693	555	416	370	231	4.621
Juli	2.790	821	656	492	438	274	5.470
Agust	3.776	1.110	888	666	592	370	7.403
Sept	3.669	1.079	863	647	576	360	7.194
Okt	4.198	1.235	988	741	658	412	8.231
Nov	3.488	1.026	821	616	547	342	6.840
Des	2.191	645	516	387	344	215	4.297
Total	30.911	9.092	7.273	5455	4.849	3.031	60.610

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2001

**Tabel 24**  
**Hasil Produksi Ikan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 2001 (dalam ton)**

Bulan	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
Jan	2.123	624	500	375	333	208	4.163
Feb	1.662	489	391	293	261	163	3.259
Maret	2.085	613	491	368	327	204	4.089
April	2.810	826	661	496	441	275	5.509
Mei	2.431	715	572	429	381	238	4.767
Juni	2.624	772	617	463	412	257	5.145
Juli	2.674	787	629	472	420	262	5.244
Agust	4.289	1.262	1.009	757	673	421	8.410
Sept	4.157	1.223	978	734	652	408	8.151
Okt	4.307	1.267	1.014	760	676	422	8.446
Nov	3.394	998	799	599	532	333	6.655
Des	1.875	551	441	331	294	184	3.676
Total	34.432	10.127	8.102	6076	5.401	3.376	67.514

Sumber: Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, 2001

Dari data produksi per jenis ikan per bulan pada tahun 1997 hingga 2001 di atas, dapat diketahui komposisi per jenis ikan dan rata-rata produksi per jenis ikan selama lima tahun tersebut. Untuk mengetahui besar komposisi per jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* selama lima tahun dapat dilihat pada Tabel 25 berikut ini.

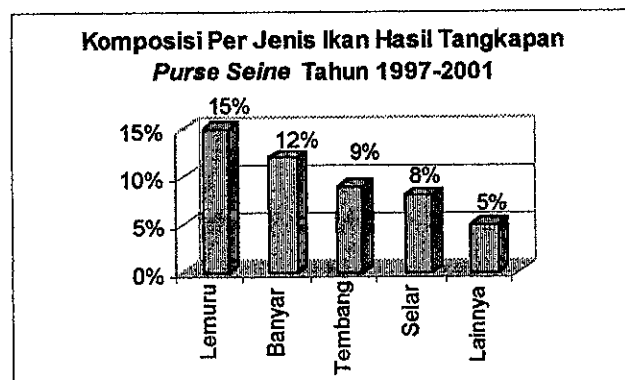
**Tabel 25**  
**Komposisi dan Rata-rata Produksi Per Jenis Ikan Hasil Tangkapan Kapal**  
***Purse Seine* Tahun 1997 – 2001**

Tahun	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Selar	Lainnya	Total
1997	38.287	11.261	9.009	6756	6.006	3.754	75.072
1998	40.022	11.771	9.417	7063	6.278	3.924	78.475
1999	31.095	9.146	7.317	5487	4.878	3.049	60.971
2000	30.911	9.092	7.273	5455	4.849	3.031	60.610
2001	34.432	10.127	8.102	6076	5.401	3.376	67.514
Total	174.747	51.397	41.118	30.837	27.412	17.134	342.642
Rerata	34.949	10.279	8.224	6.167	5.482	3.427	68.528
<b>Komposisi</b>	<b>51%</b>	<b>15%</b>	<b>12%</b>	<b>9%</b>	<b>8%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian

Berdasarkan data komposisi per jenis ikan di atas, dapat diketahui bahwa selama lima tahun terakhir, jenis ikan yang banyak diproduksi atau ditangkap adalah jenis ikan Layang. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya komposisi jenis

ikan tersebut yaitu mencapai 51 persen dari rata-rata hasil produksi tahun 1997 hingga 2001. Jenis ikan yang paling banyak di tangkap pada tahun yang sama setelah Layang adalah Lemuru dengan komposisi sebesar 15 persen, kemudian disusul oleh ikan dengan jenis Banyar dengan komposisi sebesar 12 persen. Jenis ikan Tembang memiliki komposisi sebesar 9 persen, jenis ikan Selar memiliki komposisi sebesar 8 persen, dan jenis ikan lainnya sebesar 5 persen. Dari data tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:



**Ilustrasi 13. Diagram Komposisi Hasil Produksi Ikan Kapal Purse Seine Tahun 1997 – 2001**

Dari hasil tangkapan kapal *purse seine* tersebut, masing-masing jenis ikan dibedakan kualitasnya menjadi ikan segar dan ikan asin. Dari kedua kualitas ikan tersebut, ikan segar memiliki kualitas yang lebih baik daripada ikan asin. Hal ini akan berpengaruh terhadap penentuan harga untuk masing-masing ikan tersebut dimana ikan segar akan lebih mahal dibandingkan dengan ikan asin.

Dengan berdasarkan pada hasil produksi kapal *purse seine* dari tahun 1997 hingga 2001 di atas, maka dapat diketahui jumlah ikan segar atau es dan ikan asin atau garaman dari masing-masing jenis ikan tersebut. Kualitas dari jenis ikan tangkapan *purse seine* pada tahun 1997 – 2001 dapat dilihat pada Tabel 26 hingga Tabel 30.

**Tabel 26**  
**Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Purse Seine Per Bulan**  
**Tahun 1997 (dalam ton)**

Bulan	Layang		Lemuru		Banyar		Tembang		Selar		Lainnya		Total
	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	
Jan	468	870	138	256	110	205	83	153	73	136	46	85	2.623
Feb	244	453	72	133	57	107	43	80	38	71	24	44	1.368
Maret	696	1.293	205	380	164	304	123	228	109	203	68	127	3.901
April	741	1.376	218	405	174	324	131	243	116	216	73	135	4.152
Mei	881	1.636	259	481	207	385	155	289	138	257	86	160	4.934
Juni	388	721	114	212	91	170	69	127	61	113	38	71	2.176
Juli	1.279	2.376	376	699	301	559	226	419	201	373	125	233	7.167
Agust	1.427	2.651	420	780	336	624	252	468	224	416	140	260	7.997
Sept	1.693	3.145	498	925	398	740	299	555	266	493	166	308	9.486
Okt	1.741	3.232	512	951	410	761	307	570	273	507	171	317	9.751
Nov	2.023	3.758	595	1.105	476	884	357	663	317	589	198	368	11.336
Des	1.817	3.375	535	993	428	794	321	596	285	529	178	331	10.181
Total	13.400	24.886	3.941	7.320	3.153	5.856	2.365	4.392	2.102	3.904	1.314	2.440	75.072

Sumber: TPI Kota Pekalongan, 2001

**Tabel 27**  
**Kualitas Produksi hasil Ikan Tangkapan Kapal Purse Seine Per Bulan**  
**Tahun 1998 (dalam ton)**

Bulan	Layang		Lemuru		Banyar		Tembang		Selar		Lainnya		Total
	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	
Jan	1.493	2.773	439	816	351	653	264	489	234	435	146	272	8.366
Feb	698	1.297	205	382	164	305	123	229	110	203	68	127	3.913
Maret	1.094	2.032	322	598	257	478	193	359	172	319	107	199	6.129
April	1.108	2.058	326	605	261	484	196	363	174	323	109	202	6.209
Mei	1.055	1.960	310	577	248	461	186	346	166	307	103	192	5.913
Juni	1.012	1.880	298	553	238	442	179	332	159	295	99	184	5.672
Juli	965	1.791	284	527	227	422	170	316	151	281	95	176	5.404
Agust	890	1.654	262	486	209	389	157	292	140	259	87	162	4.988
Sept	1.210	2.248	356	661	285	529	214	397	190	353	119	220	6.781
Okt	2.133	3.961	627	1.165	502	932	376	699	335	621	209	388	11.949
Nov	1.320	2.451	388	721	311	577	233	432	207	384	129	240	7.393
Des	1.028	1.909	302	561	242	449	181	337	161	299	101	187	5.758
Total	14.008	26.014	4.120	7.651	3.296	6.121	2.472	4.591	2.197	4.081	1.373	2.550	78.475

Sumber: TPI Kota Pekalongan, 2001

**Tabel 28**  
**Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal Purse Seine Per Bulan**  
**Tahun 1999 (dalam ton)**

Bulan	Layang		Lemuru		Banyar		Tembang		Selar		Lainnya		Total
	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	
Jan	502	933	148	274	118	220	89	165	79	146	49	91	2.815
Feb	352	653	103	192	83	154	62	115	55	102	34	64	1.971
Maret	665	1.235	196	363	156	291	117	218	104	194	65	121	3.726
April	879	1.633	259	480	207	384	155	288	138	256	86	160	4.927
Mei	873	1.620	257	477	205	381	154	286	137	254	86	159	4.888
Juni	529	982	156	289	124	231	93	173	83	154	52	96	2.962
Juli	848	1.575	249	463	200	371	150	278	133	247	83	154	4.751
Agust	1.347	2.501	396	736	317	589	238	441	211	392	132	245	7.545
Sept	1.457	2.705	428	796	343	637	257	477	229	424	143	265	8.161
Okt	1.313	2.439	386	717	309	574	232	430	206	383	129	239	7.356
Nov	1.168	2.169	343	638	275	510	206	383	183	340	114	213	6.542
Des	951	1.766	280	519	224	416	168	312	149	277	93	173	5.327
Total	10.883	20.212	3.201	5.945	2.561	4.756	1.921	3.567	1.707	3.170	1.067	1.982	60.971

Sumber: TPI Kota Pekalongan, 2001

**Tabel 29**  
**Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 2000 (dalam ton)**

Bulan	Layang		Lemuru		Banyar		Tembang		Selar		Lainnya		Total
	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	
Jan	351	651	103	191	82	153	62	115	55	102	34	64	1.964
Feb	496	921	146	271	117	217	87	162	78	144	49	90	2.777
Maret	672	1.248	198	367	158	294	119	220	105	196	66	122	3.766
April	702	1.303	206	383	165	307	124	230	110	204	69	128	3.931
Mei	735	1.364	216	401	173	321	130	241	115	214	72	134	4.116
Juni	825	1.532	243	451	194	360	146	270	129	240	81	150	4.621
Juli	976	1.813	287	533	230	427	172	320	153	284	96	178	5.470
Agust	1.321	2.454	389	722	311	577	233	433	207	385	130	241	7.403
Sept	1.284	2.385	378	701	302	561	227	421	201	374	126	234	7.194
Okt	1.469	2.729	432	803	346	642	259	482	230	428	144	268	8.231
Nov	1.221	2.267	359	667	287	534	215	400	192	356	120	222	6.840
Des	767	1.424	226	419	180	335	135	251	120	223	75	140	4.297
Total	10.819	20.092	3.182	5.909	2.546	4.728	1.909	3.546	1.697	3.152	1.061	1.970	60.610

Sumber: TPI Kota Pekalongan, 2001

**Tabel 30**  
**Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal *Purse Seine* Per Bulan**  
**Tahun 2001 (dalam ton)**

Bulan	Layang		Lemuru		Banyar		Tembang		Selar		Lainnya		Total
	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	Segar	Asin	
Jan	743	1.380	219	406	175	325	131	244	117	216	73	135	4.163
Feb	582	1.080	171	318	137	254	103	191	91	169	57	106	3.259
Maret	730	1.356	215	399	172	319	129	239	114	213	72	133	4.089
April	983	1.826	289	537	231	430	174	322	154	286	96	179	5.509
Mei	851	1.580	250	465	200	372	150	279	133	248	83	155	4.767
Juni	918	1.706	270	502	216	401	162	301	144	268	90	167	5.145
Juli	936	1.738	275	511	220	409	165	307	147	273	92	170	5.244
Agust	1.501	2.788	442	820	353	656	265	492	235	437	147	273	8.410
Sept	1.455	2.702	428	795	342	636	257	477	228	424	143	265	8.151
Okt	1.508	2.800	443	823	355	659	266	494	236	439	148	274	8.446
Nov	1.188	2.206	349	649	280	519	210	389	186	346	116	216	6.655
Des	656	1.219	193	358	154	287	116	215	103	191	64	119	3.676
Total	12.051	22.381	3.544	6.583	2.836	5.266	2.127	3.950	1.890	3.511	1.181	2.194	67.514

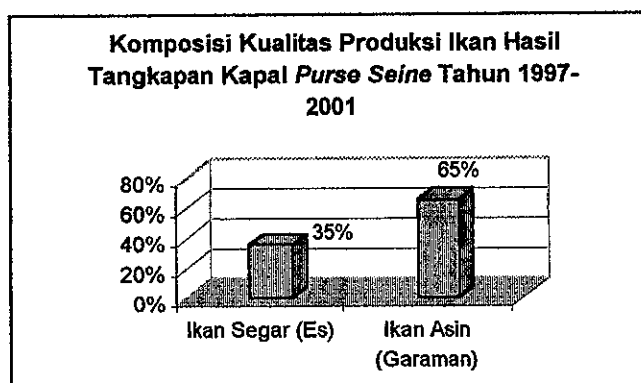
Sumber: TPI Kota Pekalongan, 2001

Berdasarkan pada data kualitas produksi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* selama lima tahun di atas, dapat diketahui komposisi kualitas untuk ikan segar atau es dan ikan asin atau garaman. Untuk mengetahui besar komposisi kualitas produksi kedua ikan tersebut dapat dilihat pada Tabel 31.

**Tabel 31**  
**Komposisi Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal *Purse Seine***  
**Tahun 1997 – 2001**

Tahun	Ikan Segar (Es)	Ikan Asin (Garaman)	Total
1997	26.275	48.797	75.072
1998	27.466	51.009	78.475
1999	21.340	39.631	60.971
2000	21.214	39.396	60.610
2001	23.629	43.885	67.514
Total	119.924	222.718	342.642
Rerata	23.985	44.543	68.528
<b>Komposisi</b>	<b>35%</b>	<b>65%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 14. Diagram Komposisi Kualitas Produksi Ikan Hasil Tangkapan Kapal *Purse Seine* Tahun 1997 – 2001**

Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa komposisi kualitas produksi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dari tahun 1997 – 2001 untuk ikan asin (garaman) lebih besar dibandingkan dengan komposisi ikan segar (es). Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 65 persen untuk ikan asin dan 35 persen untuk ikan segar.

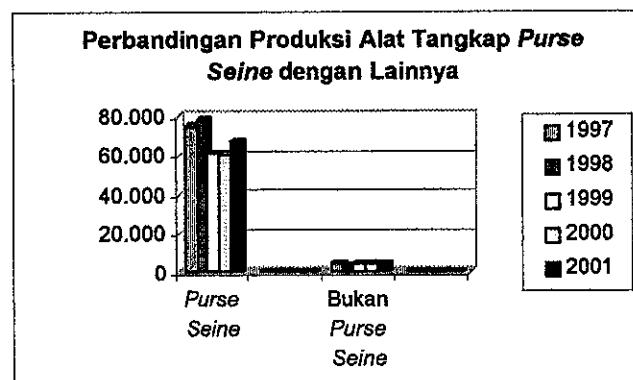
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil ikan tangkapan kapal *purse seine* lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan tangkapan kapal dengan alat tangkap lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya nelayan di Kota Pekalongan yang menggunakan alat tangkap *purse seine*. Selain itu, dengan adanya perkembangan alat tangkap *purse seine* menjadikan daerah

penangkapan ikan semakin luas sehingga peluang untuk mendapatkan hasil yang banyak lebih besar dibandingkan dengan hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan alat tangkap lain baik berupa jaring *gillnet* maupun *long line*. Untuk mengetahui perbandingan besar hasil tangkapan kapal dengan alat tangkap *purse seine* dan alat tangkap lainnya dapat dilihat pada Tabel 32 berikut ini.

**Tabel 32**  
**Perbandingan Jumlah dan Komposisi Hasil Produksi Antara Alat Tangkap *Purse Seine* dengan Alat Tangkap Lain (dalam ton)**

Tahun	Total Produksi	<i>Purse Seine</i>		Lainnya		Rasio Produksi
		Produksi	%	Produksi	%	
1997	79.434	75.072	94,5	4.362	5,5	17,2 : 1
1998	81.215	78.475	96,6	2.740	3,4	28,6 : 1
1999	65.438	60.971	93,2	4.467	6,8	13,6 : 1
2000	65.104	60.610	93,1	4.494	6,9	13,5 : 1
2001	71.914	67.514	93,9	4.400	6,1	15,3 : 1

Sumber: Hasil penelitian diolah



**Ilustrasi 15. Diagram Perbandingan Hasil Produksi Alat Tangkap *Purse Seine* dengan Alat Tangkap Lain**

Dari data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa antara hasil produksi kapal dengan alat tangkap *purse seine* dengan kapal yang menggunakan alat tangkap lain memiliki perbandingan yang cukup besar, terutama pada tahun 1998 dimana hasil produksinya memiliki rasio atau perbandingan sebesar 28,6 : 1 yang berarti bahwa pada tahun tersebut hasil

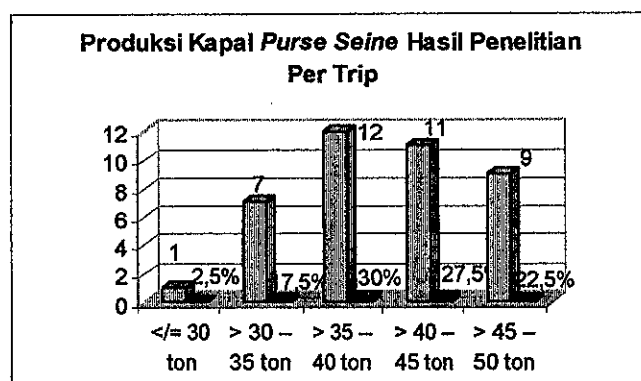
produksi kapal *purse seine* sebesar 28,6 kali lipat hasil produksi kapal dengan alat tangkap lain. Untuk tahun 1999 dan 2000 produksi kapal *purse seine* mengalami penurunan, sebaliknya kapal lain mengalami peningkatan. Meskipun demikian, jumlah produksi kapal *purse seine* tetap lebih banyak dibandingkan dengan kapal lain, sedangkan pada tahun 2001 produksi kapal *purse seine* mengalami peningkatan dan produksi kapal lain mengalami penurunan. Hasil produksi terendah yaitu pada tahun 2000 hanya sebesar 13,5 kali lipat dari hasil produksi kapal lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 40 kapal *purse seine* yang terbagi menjadi 20 kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dan 20 kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP diperoleh hasil produksi per trip sebagai berikut:

**Tabel 33**  
**Produksi Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian Selama Satu Trip**

Responden	Produksi (Ton)	Jumlah	Persentase (%)
Kapal <i>Purse Seine</i>	≤ 30	1	2,5
	> 30 – 35	7	17,5
	> 35 – 40	12	30
	> 40 – 45	11	27,5
	> 45 – 50	9	22,5
<b>Total</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 16. Diagram Produksi Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian Per Trip**

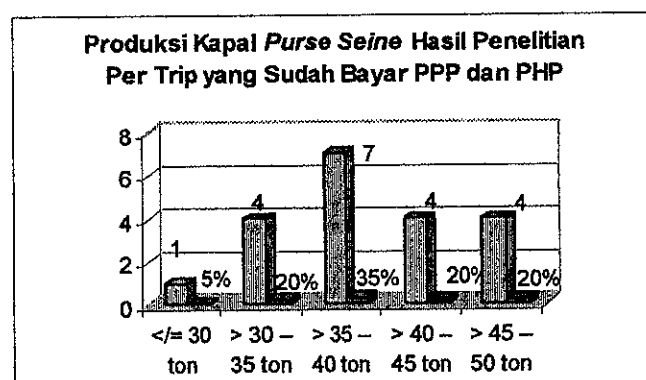
Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa hasil produksi kapal *purse seine* selama satu trip tergolong cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 12 kapal atau 30 persen memiliki produksi per trip sebesar lebih dari 35 – 40 ton, disusul kemudian oleh sebanyak 11 kapal atau 27,5 persen dengan jumlah produksi sebanyak lebih dari 40 – 45 ton, sedangkan pada kategori jumlah produksi tertinggi yaitu sebanyak lebih dari 45 – 50 ton dimiliki oleh sebanyak 9 kapal atau 22,5 persen. Jumlah produksi sebanyak lebih dari 30 – 35 ton per trip dimiliki oleh sebanyak 7 kapal atau 17,5 persen, dan pada tingkat kategori jumlah produksi terendah yaitu sebanyak kurang dari 30 ton per trip hanya dimiliki oleh 1 kapal atau 2,5 persen saja.

Berdasarkan kategori jumlah produksi kapal *purse seine* hasil penelitian selama satu trip tersebut, dapat dibedakan menjadi dua kelompok kapal yaitu kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dan kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP di mana masing-masing kelompok terdiri dari 20 kapal. Untuk mengetahui jumlah produksi per trip untuk kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada Tabel 34.

**Tabel 34**  
**Produksi Per Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

<b>Responden</b>	<b>Produksi (Ton)</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
Kapal <i>Purse Seine</i>	≤ 30	1	5
	> 30 – 35	4	20
	> 35 – 40	7	35
	> 40 – 45	4	20
	> 45 – 50	4	20
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 17. Diagram Produksi Per Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

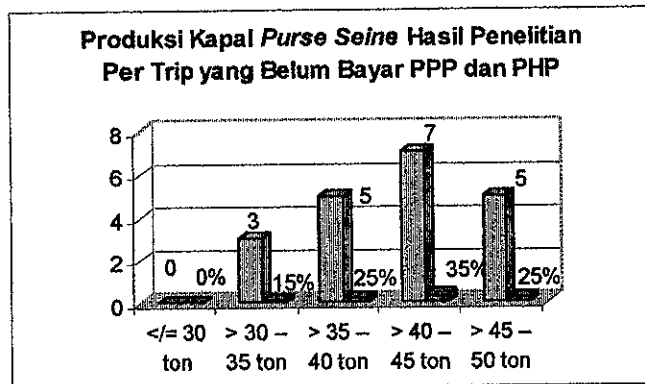
Dari data tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa produksi per trip kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP cukup besar. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 7 kapal atau 35 persen yang mampu memproduksi lebih dari 35– 40 ton. Jumlah produksi sebanyak lebih dari 40 – 45 ton dan lebih dari 45 – 50 ton per trip masing-masing dimiliki oleh sebanyak 4 kapal atau 20 persen. Pada tingkat kategori jumlah produksi yang tergolong rendah yaitu sebanyak lebih dari 30 – 35 ton per trip juga dimiliki oleh sebanyak 4 kapal atau 20 persen, sedangkan pada produksi terendah yaitu sebanyak kurang dari 30 ton per trip dimiliki oleh sebanyak 1 kapal atau 5 persen.

Untuk jumlah produksi per trip kapal *purse seine* hasil penelitian yang belum membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 35  
Produksi Per Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum  
Membayar PPP dan PHP**

Responden	Produksi (Ton)	Jumlah	Persentase (%)
Kapal <i>Purse Seine</i>	≤ 30	0	0
	> 30 – 35	3	15
	> 35 – 40	5	25
	> 40 – 45	7	35
	> 45 – 50	5	25
<b>Total</b>		<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 18. Diagram Produksi Per Trip Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa jumlah produksi per trip kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP juga tergolong cukup tinggi. Produksi tertinggi yaitu sebanyak lebih dari 45 – 50 ton mampu diperoleh oleh 5 buah kapal atau 25 persen, sedangkan produksi paling rendah adalah sebanyak kurang dari 30 ton tidak diperoleh oleh kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP. Sebagian besar kapal tersebut memiliki produksi sebanyak lebih dari 40 – 45 ton yaitu sebanyak 7 kapal atau 35 persen, kemudian disusul oleh sebanyak 5 buah kapal atau 25 persen dengan jumlah produksi per trip sebesar lebih dari 35 – 40 ton, dan 3 kapal lainnya atau 15 persen memiliki jumlah hasil produksi sebanyak lebih dari 30 – 35 ton dalam sekali trip. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jumlah produksi per trip pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP lebih besar dibandingkan dengan jumlah produksi kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP.

#### **4.2.3. Harga Ikan Hasil Tangkapan Kapal *Purse Seine***

Harga merupakan nilai yang ditetapkan pada suatu barang atau jasa yang diukur dengan satuan rupiah. Untuk harga pada ikan ditetapkan per kilogram

*Sumber: Hasil penelitian*

Tahun	Layang	Lemuru	Banyar	Tembang	Setar	Lainnya
1997	Segar Asin	Segar Asin	Segar Asin	Segar Asin	Segar Asin	Segar Asin
	5.600	2.000	1.800	1.100	5.750	2.100
	10.600	3.800	2.850	1.750	11.500	4.200
	8.800	3.200	2.700	1.700	9.800	3.600
1998	7.300	2.600	2.450	1.550	7.500	2.700
	7.300	2.600	2.450	1.550	7.500	2.700
1999	8.800	3.200	2.700	1.700	9.800	3.600
	8.800	3.200	2.700	1.700	9.800	3.600
2000	6.400	2.300	2.100	1.350	6.900	2.500
	6.400	2.300	2.100	1.350	6.900	2.500
2001	38.700	13.900	11.900	7.450	41.450	15.100
	38.700	13.900	11.900	7.450	41.450	15.100
Total	7.740	2.780	2.380	1.490	8.290	3.020
Rerata	7.740	2.780	2.380	1.490	8.290	3.020

**Tabel 36**  
**Harga Kualitas Ikan Hasil Tangkapan Kapal Purse Seine Tahun 1997 – 2001**

1997 hingga 2001 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa hasil produksi kapal *purse seine* tahun 2001 yang dibedakan kualitasnya menjadi ikan segar atau es dan ikan asin atau garaman untuk masing-masing jenis ikan memiliki harga yang berbeda setiap kilogramnya. Adapun harga per kualitas jenis ikan pada tahun 1997 hingga 2001 dapat dilihat pada Tabel 36 berikut ini.

Dimana:

HPI = Harga Patokan Ikan

Harga Konstan = tahun 1996 dengan nilai 100

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun 2001

Rata-rata harga = rata-rata harga ikan tahun 1997 – 2001

$$\text{Harga Patokan Ikan (HPI)} = \frac{\text{IHK}}{\text{HargaKonstan}} \times \text{rata-rata harga}$$

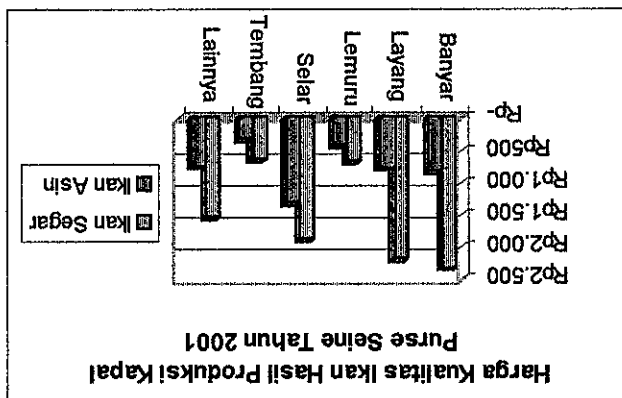
uraian tersebut, harga patokan ikan dapat dirumuskan sebagai berikut:

tahun 2001 dengan harga konstan tahun 1996 (lihat lampiran hal. 148). Dari rata harga tersebut kemudian dikonversikan dengan indeks harga konsumen kualitas ikan per jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* tersebut. Dari rata-rata harga tahun 1997 hingga 2001 yang kemudian ditentukan rata-rata harga per masing harga kualitas ikan yaitu ikan segar atau es dan ikan asin atau garaman berdasarkan kualitasnya digunakan rumus John Dixon dimana dari masing-bukan per ikan. Dalam menentukan besar harga patokan per jenis ikan

Dari rata-rata harga kualitas per jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* di atas, dapat diketahui harga patokan per jenis ikan berdasarkan kualitas ikan dengan cara mengkonversikan hasil rata-rata harga selama lima tahun per jenis ikan tersebut dengan indeks harga konsumen tahun 2001 yang besarnya adalah 354,96 dengan harga konstan tahun 1996.

Dengan demikian dapat ditentukan harga ikan berdasarkan kualitas untuk masing-masing jenis ikan. Berdasarkan pada perhitungan tersebut, diperoleh harga untuk masing-masing ikan yang dapat diuraikan bahwa jenis kualitas ikan segar dari jenis Banyar setiap kilogramnya berharga Rp 2.350,- dan ikan asin berharga Rp 850,-/kg. Untuk harga ikan segar dan ikan asin jenis ikan Layang memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan jenis ikan Banyar tiap kilogramnya yaitu Rp 2.200,- untuk ikan segar dan Rp 800,- untuk ikan asinnya. Harga ikan segar untuk jenis Selar adalah sebesar Rp 1.900,-/kg, sedangkan harga ikan asin untuk jenis yang sama adalah Rp 1.350,-/kg. Jenis ikan Lemuru yang dibedakan kualitasnya menjadi ikan segar tiap kilogramnya berharga Rp 700,- dan harga ikan asinnya adalah Rp 450,-/kg. Untuk harga ikan segar dan ikan asin dari jenis Tembang per kg berturut-turut adalah sebesar Rp 650,- dan Rp 350,-, dan harga untuk jenis ikan lainnya dengan kualitas ikan segar sebesar Rp 1.560,-/kg dan Rp 770,-/kg untuk ikan asinnya atau garamannya (lihat lampiran hal. 147). Untuk mengetahui lebih jelas mengenai harga dari kualitas berbagai jenis ikan hasil tangkapan *purse seine* yaitu ikan segar dan ikan asin dapat dilihat pada Tabel 37.

**Ilustrasi 19. Diagram Harga Ikan Produksi Kapal Purse Seine Berdasarkan Kualitas Jenis Ikan**



Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa harga untuk ikan segar jenis Banyar memiliki harga tertinggi, sedangkan harga ikan segar terendah dimiliki pada jenis ikan Tembang. Harga tertinggi untuk ikan asin dimiliki oleh jenis ikan Selar dan jenis ikan Tembang memiliki harga terendah untuk ikan asin. Dengan demikian jenis ikan Tembang baik kualitasnya sebagai ikan segar maupun ikan asin tetap memiliki harga yang paling rendah. Harga untuk jenis kualitas ikan yaitu ikan segar dan asin untuk berbagai jenis ikan hasil produksi kapal *purse seine* dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut:

*Sumber: Hasil penelitian*

No.	Jenis Ikan Hasil Produksi	Jenis Kualitas Ikan	
		Ikan Segar (Rp)	Ikan Asin (Rp)
1.	Layang	2.200,-	800,-
2.	Lemuru	700,-	450,-
3.	Banyar	2.350,-	850,-
4.	Tembang	650,-	350,-
5.	Selar	1.900,-	1.350,-
6.	Lainnya	1.560,-	770,-

**Tabel 37**  
**Harga Per Jenis Ikan Hasil Produksi Kapal Purse Seine Berdasarkan Kualitas Ikan**

Pemilik kapal dibedakan menjadi dua yakni pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP. Kedua punggutan tersebut dibayarkan pada awal tahun, sehingga untuk trip yang pertama pendapatan pemilik yang sudah membayar PPP dan PHP pada umumnya cenderung negatif atau mengalami kerugian. Dalam kategori yang sama, pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP (lihat lampiran hal. 139). Untuk mengetahui perbedaan besar pendapatan pemilik kapal *purse*

a. Pemilik

#### 1. Pendapatan Nelayan dalam Sekali Trip

Dalam penelitian ini, pendapatan nelayan di Kota Pekalongan dibedakan atas dua golongan yaitu nelayan yang telah membayar PPP dan PHP dan nelayan yang belum membayar PPP dan PHP dimana dari kedua golongan tersebut terdiri dari 20 kapal. Dari jumlah kapal tersebut, masing-masing diambil nelayan 5 orang yang terdiri dari pemilik, nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa, sehingga total responden untuk kapal baik yang sudah membayar maupun yang belum membayar PPP dan PHP adalah sebanyak 100 orang. Dengan demikian secara keseluruhan terdapat 200 responden.

Pendapatan merupakan nilai dari hasil usaha yang dilakukan sehari-hari yang dinyatakan dalam rupiah. Pendapatan dapat bersumber dari berbagai hal atau bidang pekerjaan. Namun dalam konteks ini, pendapatan hanya bersumber dari hasil penangkapan ikan dengan kapal *purse seine*.

#### 4.2.4. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan

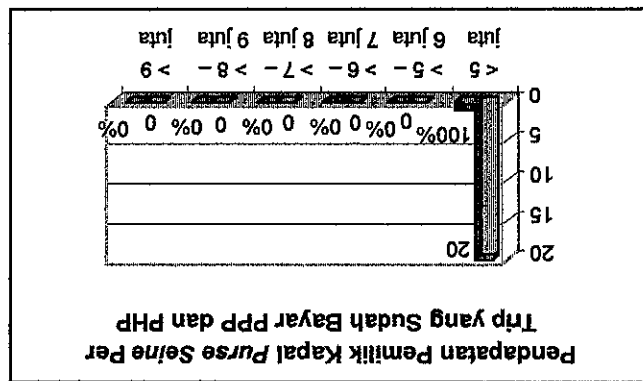
*seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat

pada Tabel 38 dan Tabel 39 berikut ini.

**Tabel 38**  
Pendapatan Satu Trip Pemilik Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Pendapatan Per Trip Pemilik (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
> 5	20	100
> 5-6	0	0
> 6-7	0	0
> 7-8	0	0
> 8-9	0	0
> 9	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 20. Diagram Pendapatan Per Trip Pemilik Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Data di atas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan dari pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP yaitu sebanyak 20 orang atau 100 persen memiliki pendapatan pada tingkat rendah dalam kategori di atas yaitu sebesar kurang dari Rp 6.000.000,- per tripnya dengan rata-rata pendapatannya sebesar -Rp 6.254.660,-. Dalam kategori pendapatan di atas dibuat dengan berdasarkan pada besar pendapatan pemilik kapal *purse seine* secara keseluruhan sehingga dapat dibandingkan antara besar pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar dan belum membayar PPP dan PHP.

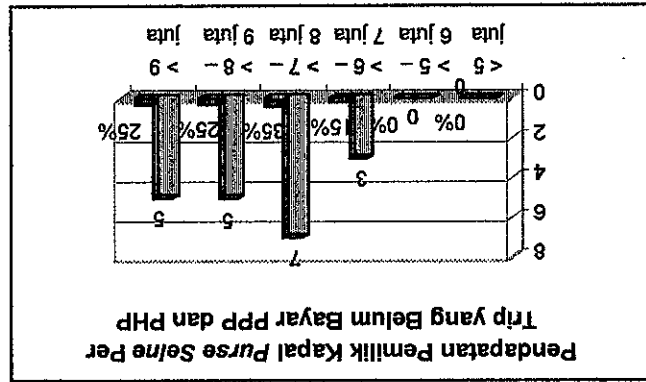
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapatan per trip pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, secara keseluruhan mengalami kerugian atau pendapatannya negatif. Dari sebanyak 20 pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP, kerugian tertinggi sebesar Rp 12.562.615,- dan kerugian terendah adalah sebesar Rp 696.198,- (lihat lampiran hal. 139).

Untuk pendapatan per trip pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP tidak negatif atau tidak rugi karena pada pendapatan trip awal tidak dikurangi dengan biaya-biaya pungkutan. Adapun besar pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP tersebut dapat dilihat pada Tabel 39.

**Tabel 39**  
Pendapatan Per Trip Pemilik Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP

Pendapatan Per Trip Pemilik (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
< 5	0	0
> 5-6	0	0
> 6-7	3	15
> 7-8	7	35
> 8-9	5	25
> 9	5	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 21.** Diagram Pendapatan Per Trip Pemilik Kapal *Purse Seine* yang Belum Bayar PPP dan PHP

Dibandingkan dengan pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, jelaslah pendapatan per trip dari pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP jauh lebih besar. Pada tingkat pendapatan tertinggi yaitu lebih dari Rp 9.000.000,- dimiliki oleh sebanyak 5 orang atau 25 persen, sedangkan pada pendapatan terendah yaitu kurang dari Rp 6.000.000,- tidak ada. Sebanyak 7 orang atau 35 persen memiliki pendapatan sekali trip sebesar lebih dari Rp 6.000.000,- - Rp 7.000.000,-, dan sebanyak 5 orang lainnya atau 25 persen berpendapatan sebesar lebih dari Rp 7.000.000,- - Rp 8.000.000,-. Rata-rata pendapatan per trip pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp 8.097.880,- (lihat lampiran hal. 139).

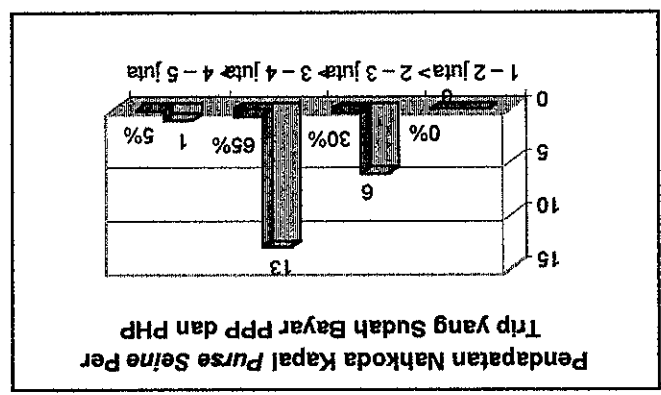
b. Nahkoda

Pendapatan per trip untuk posisi nahkoda baik pada kelompok kapal *purse seine* yang sudah maupun belum membayar PPP dan PHP memiliki nilai yang hampir sama besar. Pendapatan nahkoda ataupun posisi lain pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP tidak mengalami kerugian atau negatif karena kedua punggutan yaitu PPP dan PHP hanya dikenakan kepada pemilik kapal saja sehingga tidak mempengaruhi pendapatan awak kapal lainnya.

Besar pendapatan nahkoda kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada Tabel 40 di bawah ini.

Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa pendapatan yang diterima oleh nahkoda pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP untuk sekali trip tergolong cukup tinggi dengan rata-rata sebesar Rp 3.204.063,- (lihat lampiran hal. 139). Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 13 orang atau 65 persen nahkoda memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp 3.000.000,- atau Rp 4.000.000,-, kemudian disusul oleh sebanyak 6 orang atau 30 persen nahkoda yang berpendapatan sebesar lebih dari Rp 2.000.000,- - Rp 3.000.000,-. Pada tingkat pendapatan tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 4.000.000,- - Rp 5.000.000,- hanya dimiliki oleh sebanyak 1 orang nahkoda saja atau 5 persen, sedangkan pada tingkat pendapatan terendah yaitu antara Rp 1.000.000,- - Rp 2.000.000,- tidak ada.

**Ilustrasi 22. Diagram Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP**



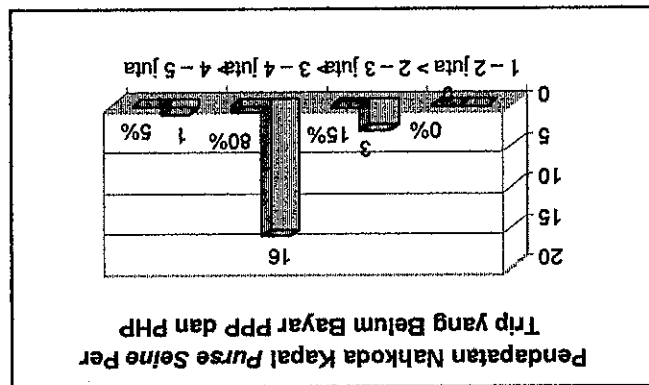
Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Per Trip Nahkoda (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1 - 2	0	0
> 2 - 3	6	30
< 3 - 4	13	65
> 4 - 5	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 40**  
**Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Dari data tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar dari nahkoda kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP yaitu sebanyak 16 orang atau 80 persen memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp 3.000.000,- - Rp 4.000.000,-, dan sebanyak 3 orang lainnya atau 15 persen berpendapatan sebesar lebih dari Rp 2.000.000,- - Rp 3.000.000,-, sedangkan sebanyak 1 orang atau 5 persen memiliki pendapatan tertinggi yaitu sebanyak

**Ilustrasi 23. Diagram Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal *Purse Seine* yang Belum Bayar PPP dan PHP**



Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Per Trip Nahkoda (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1 - 2	0	0
> 2 - 3	3	15
> 3 - 4	16	80
> 4 - 5	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 41**  
**Pendapatan Per Trip Nahkoda Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Bayar PPP dan PHP**

Pendapatan nahkoda pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan nahkoda pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP (lihat lampiran hal. 139). Hal ini dapat dilihat pada perolehan jumlah atau banyaknya nahkoda yang memiliki tingkat pendapatan cukup tinggi yang tersaji dalam Tabel 41 berikut ini.

Pendapatan per trip motoris pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP pada umumnya sebesar lebih dari Rp 500.000,- - Rp 600.000,- yang dimiliki oleh sebanyak 8 orang atau 40 persen, kemudian disusul oleh sebanyak 7 orang atau 35 persen yang berpendapatan sebesar lebih dari Rp 400.000,- - Rp 500.000,-. Pada kategori pendapatan tertinggi yakni sebesar Rp 600.000,- dimiliki oleh sebanyak 4 orang atau 20 persen, sedangkan pada pendapatan terendah yakni sebesar kurang dari Rp 300.000,- hanya dimiliki oleh sebesar 1 orang motoris saja atau 5 persen. Dari total pendapatan tersebut dapat diketahui besar rata-rata pendapatan motoris kapal *purse seine* yang sudah

Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Per Trip Motoris (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
< 300	0	0
> 300 - 400	1	5
> 400 - 500	7	35
> 500 - 600	8	40
> 600	4	20
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 42**  
Pendapatan Per Trip Motoris Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Pendapatan motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar dan belum membayar PPP dan PHP juga memiliki nilai yang hampir sama besar. Namun jumlah motoris dengan tingkat pendapatan tinggi lebih banyak diperoleh motoris kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP (lihat lampiran hal. 139). Untuk mengetahui perbedaan besar pendapatan per trip yang diterima oleh motoris pada kapal *purse seine* dapat dilihat pada Tabel 42 dan Tabel 43.

c. Motoris

lebih dari Rp 4.000.000,- - Rp 5.000.000,-. Besar rata-rata pendapatannya adalah Rp 3.367.893,-.

Dari data tabel di atas memperlihatkan bahwa pendapatan motoris kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP sebagian besar yaitu sebanyak 9 orang atau 45 persen memiliki pendapatan yang tergolong tinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 500.000,- - Rp 600.000,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 543.680,-. Sebanyak 5 orang atau 25 persen berada

Sumber: Hasil penelitian

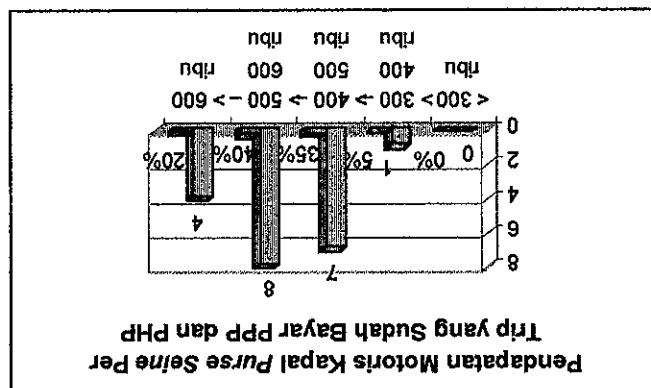
Pendapatan Per Trip Motoris (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
< 300	0	0
> 300 - 400	0	0
> 400 - 500	6	30
> 500 - 600	9	45
> 600	5	25
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 43**  
Pendapatan Per Trip Motoris Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP

membayar PPP dan PHP adalah sebagai berikut:

Besar pendapatan sekali trip untuk motoris kapal *purse seine* yang belum

**Ilustrasi 24. Diagram Pendapatan Per Trip Motoris Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP**



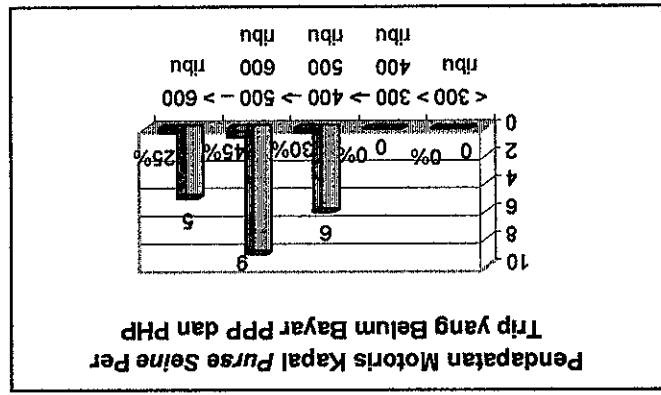
yang sudah membayar PPP dan PHP adalah sebagai berikut:

membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp 517.233,-. Adapun bentuk diagram batang yang menggambarkan tingkat pendapatan motoris kapal *purse seine*

d. Juru

Pendapatan per trip juru pada kapal *purse seine* baik yang sudah membayar maupun yang belum membayar PPH dan PHP lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan nahkoda dan motoris. Pendapatan yang diterima oleh juru per tripnya berkisar antara Rp 200.000,- hingga Rp 400.000,- (lihat lampiran hal. 139). Dengan demikian pendapatan per trip juru untuk kedua kelompok kapal *purse seine* dapat dikategorikan menjadi empat kategori yakni: (1) 200 – 250 ribu, (2) > 250 – 300 ribu, (3) > 300 – 350 ribu, dan (4) > 350 ribu. Berdasarkan pada kategori pendapatan tersebut dapat diketahui jumlah juru kedua kelompok kapal *purse seine* yang memiliki pendapatan tertinggi maupun terendah.

**Ilustrasi 25. Diagram Pendapatan Per Trip Motoris Kapal Purse Seine yang Belum Membayar PPH dan PHP**

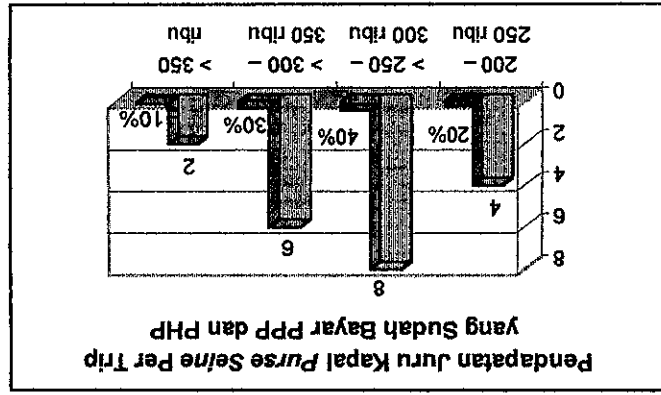


pendapatan motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP, pendapatan tidak ada yang memiliki tingkat pendapatan terendah. Sama halnya dengan sebesar lebih dari Rp 400.000,- - Rp 500.000,-. Motoris pada kelompok kapal ini sedangkan sebanyak 6 orang lainnya atau 30 persen memiliki pendapatan pada tingkat pendapatan tertinggi yakni sebesar lebih dari Rp 600.000,-; motoris dalam kelompok kapal ini juga dapat digambarkan sebagai berikut:

Dalam kategori pendapatan yang sama, tingkat pendapatan per trip pada juru kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP pada tingkat

Rp 290.646,-  
 pendapatan para juru tersebut didapatkan besar rata-rata pendapatan sebesar berpendapatan sebesar lebih dari Rp 300.000,- - Rp 350.000,-. Dari total Rp 250.000,- - Rp 300.000,- dan sebanyak 6 orang atau 30 persen lainnya terbagi menjadi 8 orang atau 40 persen berpendapatan sebesar lebih dari terendah dan 2 orang atau 10 persen untuk tingkat tertinggi. Sebanyak 14 juru pendapatan tertinggi yaitu sebanyak 4 orang atau 20 persen untuk tingkat jumlah juru yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah juru pada tingkat terendah hingga tingkat tertinggi. Pada pendapatan tingkat terendah memiliki kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP menyebar dari tingkat Data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa pendapatan juru

**Ilustrasi 26. Diagram Pendapatan Per Trip Juru Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP**



Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Per Trip Juru (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
Total	20	100%
> 350	2	10
> 300 - 350	6	30
> 250 - 300	8	40
200 - 250	4	20

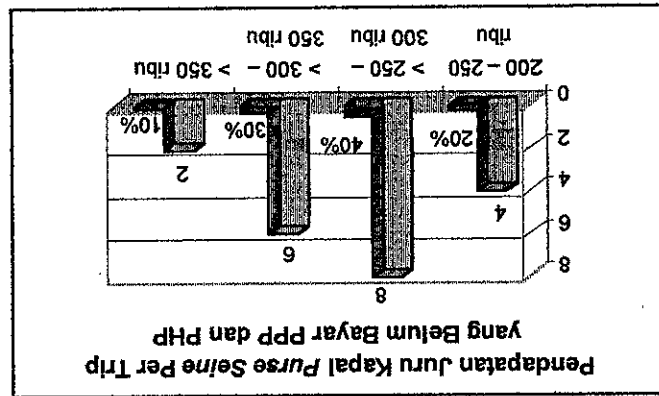
**Tabel 44**  
**Pendapatan Per Trip Juru Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

terendah lebih kecil dibandingkan dengan jumlah juru pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, sedangkan pada tingkat pendapatan tertinggi memiliki jumlah yang sama yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau 10 persen. Sebagian besar juru pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP yaitu sebanyak 10 orang atau 50 persen berpendapatan sebesar lebih dari Rp 300.000,- dan sebanyak 6 orang juru lainnya atau 30 persen memiliki besar pendapatan lebih dari Rp 250.000,- - Rp 300.000,-. Dibandingkan dengan rata-rata pada juru kelompok kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, rata-rata pendapatan juru kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP lebih besar yaitu Rp 305.507,-. Untuk mengetahui secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 45 dan ilustrasi 27 berikut ini.

**Tabel 45**  
Pendapatan Per Trip Juru Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP

Pendapatan Per Trip Juru (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
Total	20	100%
> 350	2	10
> 300 - 350	10	50
> 250 - 300	6	30
200 - 250	2	10

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 27.** Diagram Pendapatan Per Trip Juru Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPP dan PHP

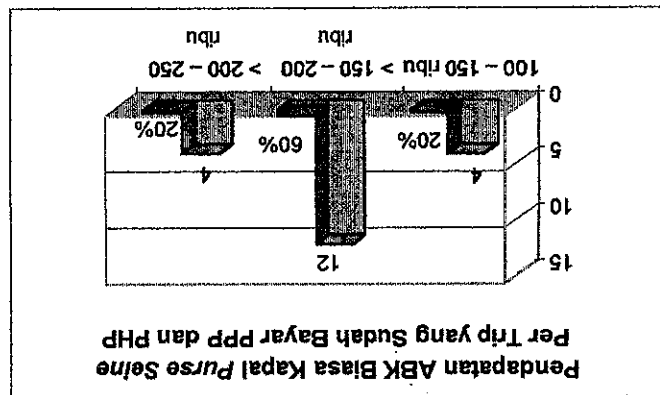
e. ABK Biasa

Sebagai posisi yang paling rendah dalam kapal *purse seine*, ABK biasa memiliki pendapatan yang paling rendah dibandingkan dengan posisi awak kapal lainnya. Pendapatan yang diterima ABK biasa per tripnya hanya mencapai antara Rp 100.000,- hingga Rp 250.000,- (lihat lampiran hal. 139). Dari tingkat pendapatan tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu: 1) 100 – 150 ribu, 2) > 150 – 200 ribu, dan 3) > 200 – 250 ribu. Adapun besar pendapatan ABK per trip untuk kapal *purse seine* yang sudah membayar PFP dan PHP berdasarkan kategori di atas dapat dilihat pada Tabel 46.

**Tabel 46**  
Pendapatan Per Trip ABK Biasa Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PFP dan PHP

Pendapatan Per Trip ABK Biasa (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
100 – 150	4	20
> 150 – 200	12	60
> 200 – 250	4	20
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



**Ilustrasi 28.** Diagram Pendapatan Per Trip ABK Biasa Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PFP dan PHP

Dari data tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari ABK biasa kapal *purse seine* yang sudah membayar memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp 150.000,- - Rp 200.000,- yang ditunjukkan oleh sebanyak

Dari data di atas menunjukkan bahwa pendapatan tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 200.000,- - Rp 250.000,- dimiliki oleh sebanyak 6 orang ABK biasa atau 30 persen. Sebagian besar ABK biasa yaitu sebanyak 13 orang atau 65 persen memiliki pendapatan sebesar lebih dari Rp 150.000,- - Rp 200.000,-, sedangkan sebanyak 1 orang ABK biasa lainnya atau 5 persen memiliki pendapatan pada tingkat rendah yaitu sebesar Rp 100.000,- - Rp 150.000,-. Rata-rata pendapatan per trip untuk ABK biasa kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp 186.421,-.

Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Per Trip ABK Biasa (ribu Rp)	Jumlah	Persentase (%)
100 - 150	1	5
> 150 - 200	13	65
> 200 - 250	6	30
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 47**  
**Pendapatan Per Trip ABK Biasa Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

12 orang atau 80 persen. Untuk tingkat pendapatan tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki oleh sebanyak 4 orang ABK biasa atau 20 persen. Dari total pendapatan dalam satu trip, ABK kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP memiliki rata-rata pendapatan sebesar Rp 177.352,-. Dibandingkan dengan pendapatan ABK biasa pada kapal *purse seine* yang sudah membayar pungkutan, pendapatan ABK biasa pada kapal *purse seine* yang belum membayar pungkutan lebih besar. Untuk mengetahui secara lebih jelas pungkutan dapat dilihat pada Tabel 47.

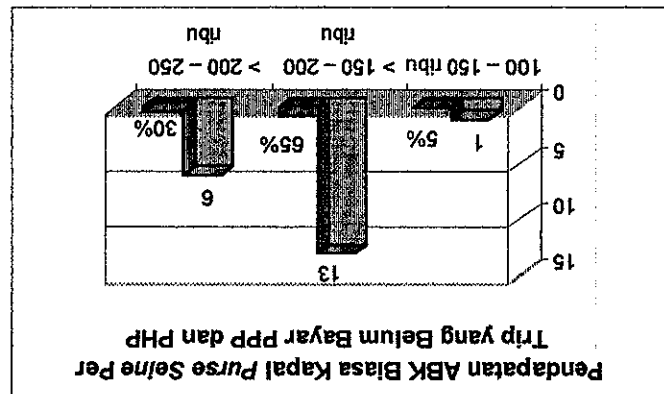
Pemilik merupakan orang yang memiliki hak atas kapal yang digunakan untuk kegiatan melaut. Pemilik kapal memiliki pendapatan bersih yang paling tinggi dibandingkan dengan nelayan dengan status atau posisi lainnya. Namun demikian, seorang pemilik kapal juga memiliki kewajiban untuk membayar pungutan-pungutan yang terdiri dari PPP dan PHP.

1) Pemilik

Adapun pendapatan masing-masing nelayan adalah sebagai berikut:  
 Jumlah trip masing-masing kapal dalam satu tahun (lihat lampiran hal. 140-146).  
 dengan harga per jenis ikan dalam satu trip yang kemudian dikalikan dengan Pendapatan selama satu tahun diperoleh dari hasil produksi yang dikalikan tersebut, akan disajikan berdasarkan status atau posisi dalam kapal.  
 cukup tinggi. Untuk mengetahui secara jelas mengenai pendapatan nelayan PPP dan PHP maupun yang belum membayar PPP dan PHP tergolong masih motoris, juru, dan ABK biasa di Kota Pekalongan baik yang sudah membayar Pendapatan selama satu tahun nelayan yang terdiri dari pemilik, nahkoda,

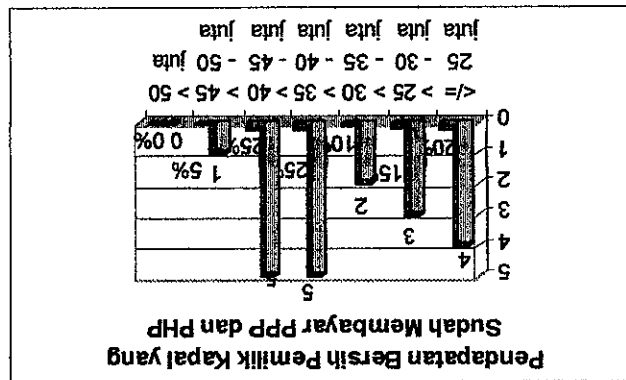
2. Pendapatan Nelayan dalam Satu Tahun

Ilustrasi 29. Diagram Pendapatan Per Trip ABK Biasa Kapal Purse Seine yang Belum Membayar PPP dan PHP



Berdasarkan pada data tabel dan diagram di atas tampak bahwa pendapatan bersih pemilik kapal cukup tinggi walaupun sudah dikurangi dengan biaya pungutan yaitu PPP dan PHP. Tingginya pendapatan bersih pemilik kapal ini ditunjukkan oleh pemilik kapal yang berpendapatan lebih dari Rp 35.000.000,- Rp 40.000.000,- yaitu sebanyak 5 orang atau 25 persen, kemudian disusul oleh pemilik kapal yang berpendapatan > Rp 40.000.000,- - Rp 45.000.000,- yang juga sebanyak 5 orang atau 25 persen, selanjutnya adalah pemilik kapal dengan pendapatan pada kategori cukup tinggi yaitu sebesar > Rp 45.000.000,- - Rp

**Ilustrasi 30. Diagram Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal Paise Seine yang Sudah Membayar PPP dan PHP**



Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Satu Tahun Pemilik (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
Total	20	100%
> 50	0	0
> 45 - 50	1	5
> 40 - 45	5	25
> 35 - 40	5	25
> 30 - 35	2	10
> 25 - 30	3	15
<= 25	4	20

**Tabel 48**  
**Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal Paise Seine Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Adapun pendapatan bersih dari nelayan dengan status sebagai pemilik yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada Tabel 48.

50.000.000,- ada sebanyak 1 orang atau 5 persen. Namun demikian, pemilik kapal yang sudah membayar PPH dan PHP tidak memiliki pendapatan pada tingkat tertinggi yaitu > Rp 50.000.000,-. Pada tingkat pendapatan terendah yaitu sebesar ≤ Rp 25.000.000,- dimiliki oleh sebanyak 4 orang atau 20 persen. Sebanyak 5 orang pemilik kapal lainnya terbagi menjadi 3 orang atau 15 persen dengan pendapatan sebesar lebih dari Rp 25.000.000,- - Rp 30.000.000,- dan 2 orang pemilik kapal atau 10 persen berpendapatan sebesar > Rp 30.000.000,- - Rp 35.000.000,-. Dari jumlah atau total pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP dapat diketahui bahwa besar rata-rata pendapatan pemilik kapal tersebut adalah Rp 32.848.229,- (lihat lampiran hal. 146).

Besar pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP rata-rata hampir sama dengan besar pendapatan bersih pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP. Namun pendapatan pemilik di sini belum dikurangi dengan pungutan-pungutan yang berkaitan dengan perikanan yaitu PPH dan PHP. Adapun besar pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP dapat dilihat pada Tabel 49.

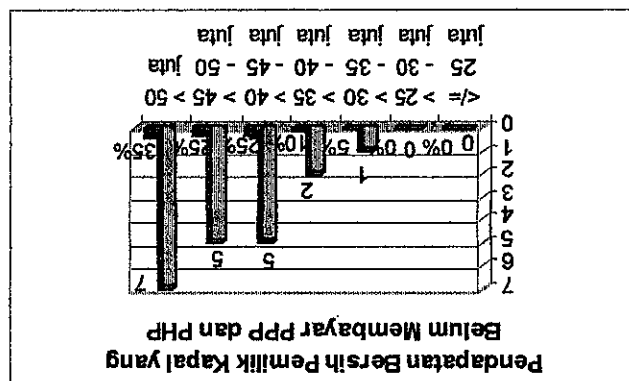
**Tabel 49**  
**Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPH dan PHP**

Pendapatan Satu Tahun Pemilik (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
≤ 25	0	0
> 25 - 30	0	0
> 30 - 35	1	5
> 35 - 40	2	10
> 40 - 45	5	25
> 45 - 50	5	25
> 50	7	35
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian

Pada data tabel dan diagram di atas dapat diketahui bahwa pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP terdistribusi sebagai berikut. Jika dibandingkan dengan pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP, pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP lebih besar. Hal ini ditunjukkan pada kategori yang sama, pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP lebih menyebar ke kategori pendapatan yang tergolong tinggi. Adapun perinciannya dapat disimpulkan bahwa pemilik kapal tidak memiliki pendapatan pada kedua kategori pendapatan terendah yaitu antara ≤ Rp 25.000.000,- dan lebih dari Rp 25.000.000,- - Rp 30.000.000,-. Pada umumnya, pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP memiliki pendapatan pada tingkat tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 50.000.000,- yang dimiliki oleh 7 orang atau 35 persen. Masih dalam kategori pendapatan tinggi, masing-masing orang atau 35 persen, 5 orang atau 25 persen berpendapatan sebesar lebih dari Rp 40.000.000,- - Rp 45.000.000,- dan lebih dari Rp 35.000.000,- hingga Rp 40.000.000,-. Sebanyak 5 orang lainnya terbagi menjadi sebanyak 2 orang atau 10 persen dengan pendapatan sebesar > Rp 30.000.000,- - Rp 35.000.000,- dan 10 persen dengan pendapatan sebesar > Rp 30.000.000,- - Rp 35.000.000,- dan

**Ilustrasi 31. Diagram Pendapatan Satu Tahun Pemilik Kapal Purse Seine yang Belum Membayar PPH dan PHP**



3 orang atau 15 persen dengan pendapatan sebesar > Rp 25.000.000,- - Rp 30.000.000,-. Dari jumlah total pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP diperoleh rata-rata sebesar Rp 48.306.853,- (lihat lampiran hal. 146).

## 2) Nahkoda

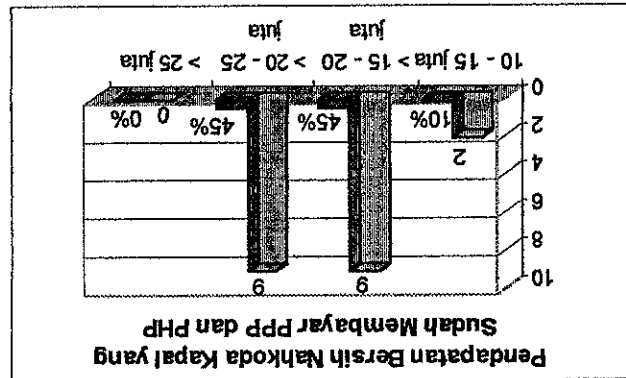
Nahkoda merupakan orang yang bertugas mengemudikan kapal saat melakukan kegiatan melaut. Nahkoda memiliki pendapatan tertinggi setelah pemilik kapal. Pendapatan nahkoda ditentukan dari jumlah bagi hasil menurut bagiannya yaitu sebanyak 5 bagian yang kemudian ditambah dengan bonus dari perbekalan, bonus dari pemilik, insentif sebesar 2 bagian dan tabungan (lihat lampiran hal. 144-145). Adapun pendapatan bersih nahkoda kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada Tabel 50.

Tabel 50

Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Pendapatan Satu Tahun Nahkoda (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
10 - 15	2	10
> 15 - 20	9	45
> 20 - 25	9	45
> 25	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian



Ilustrasi 32. Diagram Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Dari data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa pendapatan

nahkoda kapal yang sudah membayar PPH dan PHP tergolong cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya nahkoda kapal yang berpendapatan antara lebih dari Rp 20.000.000,- hingga Rp 25.000.000,- dalam satu tahun yaitu sebanyak 9 orang atau 45 persen, dimana pendapatan tersebut merupakan pendapatan yang termasuk dalam kategori cukup tinggi, kemudian pendapatan sebesar lebih dari Rp 15.000.000,- - Rp 20.000.000,- juga dimiliki oleh sebanyak 9 orang atau 45 persen. Pendapatan tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 25.000.000,- tidak

dimiliki oleh nahkoda kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP, sedangkan pada pendapatan terendah yaitu sebesar Rp 10.000.000,- - Rp 15.000.000,- dimiliki oleh sebanyak 2 orang nahkoda atau 10 persen. Dari pendapatan seluruh nahkoda kapal yang sudah membayar PPH dan PHP, besar rata-rata pendapatannya adalah Rp 19.466.878,-.

Dengan kategori pendapatan yang sama dengan kelompok nahkoda kapal *purse seine* yang sudah membayar PPH dan PHP, dapat diketahui besar pendapatan nahkoda kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP yaitu sebagai berikut:

**Tabel 51**  
Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPH dan PHP

Pendapatan Satu Tahun Nahkoda (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
10 - 15	1	5
> 15 - 20	11	55
> 20 - 25	7	35
> 25	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

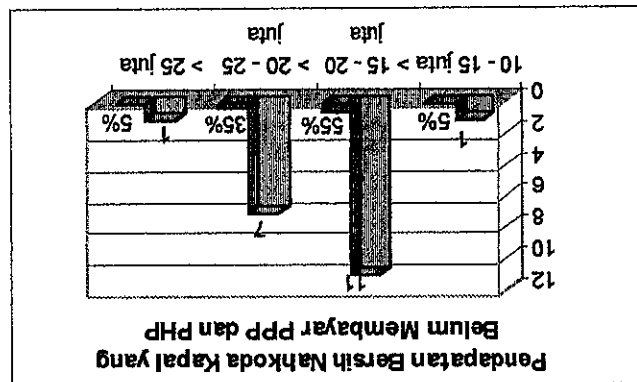
Sumber: Hasil penelitian

Dari hasil penelitian sebagaimana tertera dalam tabel di atas tampak bahwa pendapatan nahkoda kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan

Motors merupakan orang yang bertugas sebagai mekanik kapal atau orang yang bertanggungjawab terhadap mesin atau motor kapal saat digunakan untuk melakukan kegiatan melaut. Pendapatan seorang motors lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan juru dan anak buah kapal biasa. Dari sistem bagi hasilnya, seorang motors memperoleh sebesar 4 bagian. Dari perolehan

3) Motors

Ilustrasi 33. Diagram Pendapatan Satu Tahun Nahkoda Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPP dan PHP



dalam bentuk diagram batang seperti di bawah ini. rata pendapatan sebesar Rp 20.090.726,-. Dari hasil tersebut dapat digambarkan nahkoda kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP memiliki rata-rata 1 orang nahkoda atau 5 persen. Secara keseluruhan dari jumlah pendapatan 35 persen. Pada pendapatan tertinggi dan terendah masing-masing dimiliki oleh Rp 20.000.000,- - Rp 25.000.000,-, dimiliki oleh sebanyak 7 orang nahkoda atau orang atau 55 persen dan pendapatan pada tingkat lebih tinggi yaitu sebesar > yakni sebesar > Rp 15.000.000,- - Rp 20.000.000,- dimiliki oleh sebanyak 11 kategori pendapatan yang cukup tinggi. Pendapatan dalam dua kategori sedang PPP dan PHP. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya jumlah yang dimiliki oleh PHP lebih tinggi dibandingkan dengan nahkoda kapal yang sudah membayar

Berdasarkan hasil penelitian yang tercantum dalam tabel di atas memperlihatkan bahwa pendapatan bersih motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PFP dan PHP pada umumnya tergolong tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sebanyak 7 orang motoris atau 35 persen memiliki pendapatan yang tergolong dalam kategori tinggi yaitu lebih dari Rp 3.500.000,- - Rp 4.000.000,-; kemudian disusul oleh sebanyak 6 orang atau 30 persen dengan pendapatan sebesar lebih dari Rp 3.000.000,- - Rp 3.500.000,-. Dari 20 orang responden untuk kapal yang sudah membayar PFP dan PHP, sebanyak 7 orang lainnya memiliki pendapatan yang cukup rendah yaitu sebanyak 4 orang atau 20 persen berpendapatan lebih dari Rp 2.500.000,- - Rp 3.000.000,-; motoris yang berpendapatan lebih dari Rp 2.000.000,- - Rp 2.500.000,- ada sebanyak 2 orang atau 10 persen dan motoris dengan berpendapatan paling rendah yaitu antara Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,- hanya sebanyak 1 orang atau 5 persen, sedangkan pada pendapatan tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 4.000.000,-

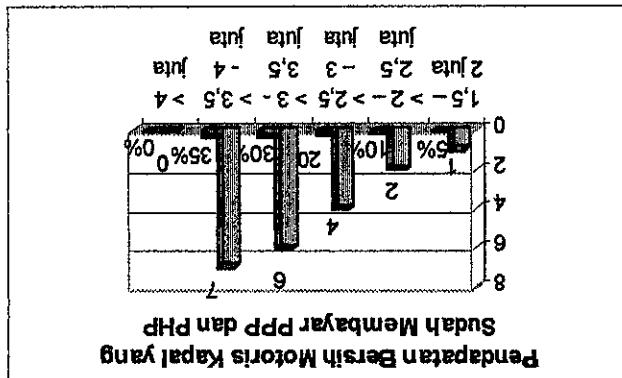
Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Bersih Motoris (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1,5-2	1	5
> 2-2,5	2	10
> 2,5-3	4	20
> 3-3,5	6	30
> 3,5-4	7	35
> 4	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 52**  
Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PFP dan PHP

jumlah berdasarkan bagian tersebut yang kemudian ditambah dengan insentif sebesar 1 bagian dan tabungan maka diperoleh pendapatan bersih motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PFP dan PHP (lihat lampiran hal. 144). Untuk mengetahui besar pendapatan bersih motoris dapat dilihat pada Tabel 52 berikut ini.

tidak dimiliki oleh motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP. Besar rata-rata pendapatan para motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp 3.142.546,-. Data pendapatan bersih motoris tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang yang dapat dilihat di bawah ini.



**Ilustrasi 34. Diagram Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal Purse Seine yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Pada kategori pendapatan yang sama dengan motoris kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, motoris kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP memiliki pendapatan yang lebih besar. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 53 dengan ilustrasi 35 berikut ini.

**Tabel 53  
Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal Purse Seine Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

Pendapatan Bersih Motoris (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1,5 - 2	0	0
> 2 - 2,5	1	5
> 2,5 - 3	7	35
> 3 - 3,5	7	35
> 3,5 - 4	4	20
> 4	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian

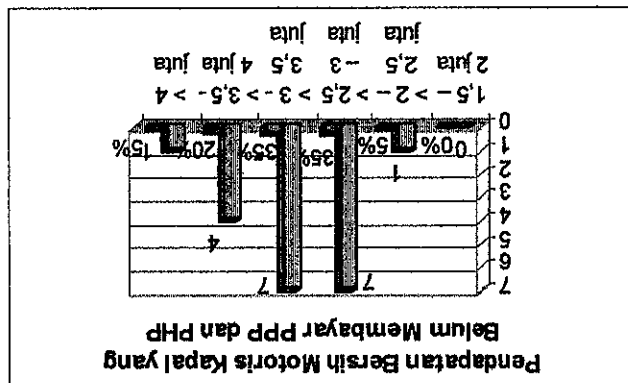
Juru merupakan julukan atau sebutan bagi orang yang memiliki keahlian atau ketrampilan khusus. Dalam kapal perikanan, pada umumnya terdiri dari juru gidang, juru masak, dan juru arus. Walaupun memiliki posisi yang berbeda namun bagian pendapatan yang diterima oleh masing-masing juru tersebut sama yaitu sebesar 2 bagian dari 50 persen nilai produksi yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang terdiri dari biaya lelang, insentif, perbekalan, cadangan,

4) Juru

(lampiran hal. 146).

Data tabel dan diagram di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pendapatan motoris kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP juga tergolong cukup tinggi. Pada kategori pendapatan sedang yaitu sebesar > Rp 2.500.000,- - Rp 3.000.000,- dan lebih dari Rp 3.000.000,- - Rp 3.500.000,- masing-masing dimiliki oleh sebanyak 7 orang atau 35 persen. Motoris pada kapal *purse seine* tidak ada yang memiliki pendapatan pada tingkat paling rendah, sedangkan pada tingkat pendapatan paling tinggi dimiliki oleh sebanyak 1 orang motoris atau 5 persen. Besar rata-rata pendapatan motoris kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp 3.243.254,- (lihat

**Ilustrasi 35. Diagram Pendapatan Satu Tahun Motoris Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPP dan PHP**



Data Tabel 54 di atas menunjukkan bahwa juru kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dalam satu tahun sebagian besar berpendapatan cukup rendah. Rendahnya pendapatan bersih juru kapal *purse seine* tersebut ditunjukkan oleh banyaknya juru kapal yaitu sebanyak 12 orang atau 60 persen hanya berpendapatan antara Rp 1.500.000,- - Rp 2.000.000,- saja. Pendapatan tertinggi juru kapal sebesar lebih dari Rp 2.500.000,- tidak dimiliki oleh juru kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, namun pada kategori pendapatan yang cukup tinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 2.000.000,- hingga Rp 2.500.000,- dimiliki oleh 5 orang atau 25 persen, sedangkan juru kapal dengan tingkat pendapatan paling rendah yaitu sebesar Rp 1.000.000,- hingga Rp 1.500.000,- ada sebanyak 3 orang atau 15 persen. Dari total pendapatan sebanyak 20 orang juru kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP diperoleh rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.765.874,.

Sumber: Hasil penelitian

Pendapatan Satu Tahun Juru (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1 - 1,5	3	15
> 1,5 - 2	12	60
> 2 - 2,5	5	25
> 2,5	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 54**  
**Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP**

Tabel 54.

dan tabungan. Pendapatan bersih para juru kapal *purse seine* diperoleh dari jumlah bagian bagi hasil ditambah dengan insentif sebesar 1 bagian dan tabungan (lihat lampiran hal. 144). Adapun besar pendapatan juru dalam kapal perikanan *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dapat dilihat pada

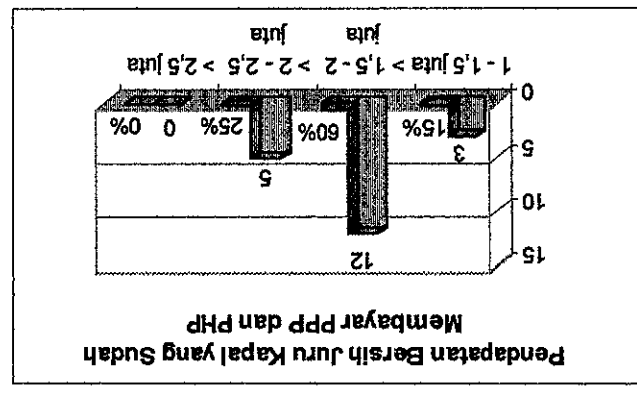
Pendapatan Satu Tahun Juru (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
1-1,5	2	10
> 1,5-2	14	70
> 2-2,5	3	15
> 2,5	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil penelitian

**Tabel 55**  
**Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal Purse Seine Hasil Penelitian yang**  
**Belum Membayar PPP dan PHP**

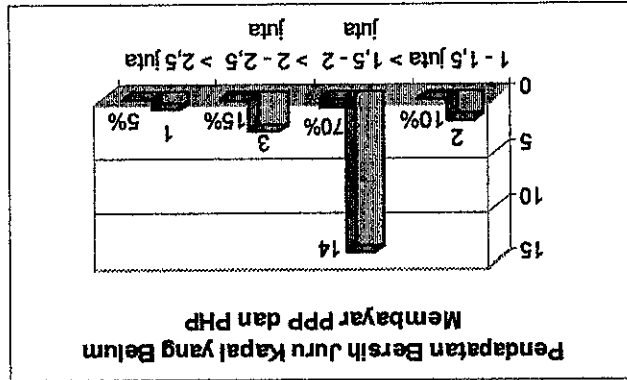
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pendapatan nelayan dengan status sebagai juru dalam kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP dapat diperoleh bahwa pendapatan juru dalam kapal *purse seine* tersebut memiliki besar atau jumlah yang lebih banyak daripada pendapatan juru dalam kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP. Adapun hasil selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 55 berikut ini.

**Ilustrasi 36. Diagram Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal Purse Seine yang**  
**Sudah Membayar PPP dan PHP**



Adapun bentuk diagram batang yang menggambarkan besar pendapatan juru kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP adalah sebagai berikut:

**Ilustrasi 37. Diagram Pendapatan Satu Tahun Juru Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPH dan PHP**



Kategori dan perolehan jumlah serta persentase pendapatan juru pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPH dan PHP dapat juga dilihat pada bentuk diagram batang berikut ini:

PPH, lebih banyak dibandingkan dengan juru kapal yang belum membayar PPH dan yang sudah membayar PPH dan PPH, juru kapal dengan pendapatan tertinggi rendah yaitu sebesar Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,-. Pada kapal *purse seine* orang juru lainnya atau 10 persen memiliki pendapatan pada kategori paling 2.500.000,- hanya dimiliki oleh 1 orang juru atau 5 persen saja, sedangkan Rp 2.000.000,- - Rp 2.500.000,-. Pendapatan tertinggi yaitu sebesar lebih dari Rp - Rp 2.000.000,- dan 3 orang atau 15 persen berpendapatan sebesar lebih dari tinggi yaitu sebanyak 14 orang atau 70 persen sebesar lebih dari Rp 1.500.000,- banyaknya juru kapal yang pendapatannya termasuk dalam kategori yang cukup rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.822.464,-. Hal ini ditunjukkan dengan *purse seine* yang belum membayar PPH dan PPH tergolong cukup tinggi dengan Data tabel di atas memperlihatkan bahwa pendapatan juru dalam kapal

5) ABK Biasa

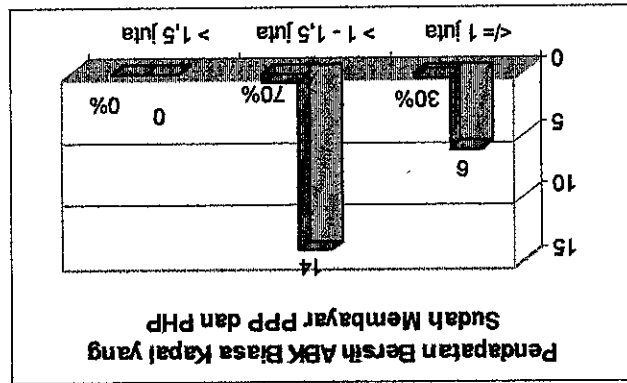
ABK biasa atau anak buah kapal merupakan orang yang dalam kapal perikanan *purse seine* berperan sebagai pelaksana dari kegiatan melaut. ABK biasa merupakan posisi yang paling rendah dalam kapal perikanan *purse seine*, sehingga pendapatan yang diterimanya relatif juga rendah atau paling rendah dibandingkan dengan posisi lain dalam kapal perikanan *purse seine*. Pendapatan yang diterima oleh biasa ABK pada umumnya sebesar 1 bagian dari 50 persen nilai produksi yang telah dikurangi dengan biaya-biaya. Besar pendapatan ABK biasa adalah dari jumlah bagi hasil ditambah dengan insentif sebesar 1 bagian dan tabungan (lihat lampiran hal. 144-146). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data besar pendapatan ABK biasa kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP yang dapat dilihat pada Tabel 56 di bawah ini.

Tabel 56

Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa Kapal *Purse Seine* Hasil Penelitian yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
≤ 1	6	30
> 1 - 1,5	14	70
> 1,5	0	0
Total	20	100%

Sumber: Hasil penelitian



Ilustrasi 38. Diagram Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa Kapal *Purse Seine* yang Sudah Membayar PPP dan PHP

Sumber: Hasil penelitian		
Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa (juta Rp)	Jumlah	Persentase (%)
≤ 1	5	25
> 1 - 1,5	14	70
> 1,5	1	5
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

**Tabel 57**  
**Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa Kapal Purse Seine Hasil Penelitian yang Belum Membayar PPP dan PHP**

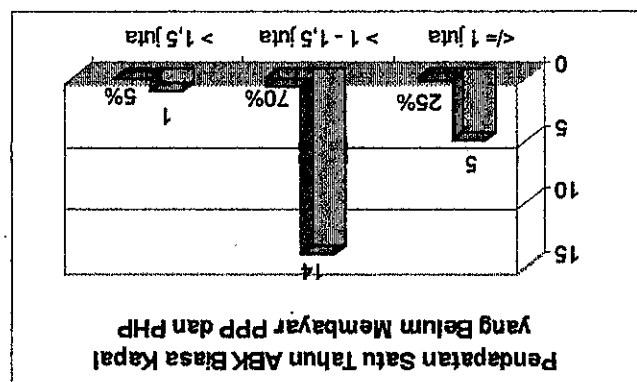
ABK biasa pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP, pada umumnya memiliki pendapatan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan pendapatan ABK biasa kapal yang sudah membayar PPP dan PHP. Hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian dimana pada kategori yang sama dengan pendapatan ABK biasa pada kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP, pendapatan ABK biasa pada kapal yang belum membayar PPP dan PHP lebih besar atau lebih tinggi. Untuk mengetahui besar pendapatan ABK biasa tersebut, dapat dilihat pada Tabel 57.

Dari data tabel dan diagram di atas memperlihatkan bahwa pendapatan bersih para ABK biasa kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dalam satu tahun sebagian besar termasuk dalam kategori pendapatan yang rendah dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 1.077.538,-. Rendahnya pendapatan para ABK biasa kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP ditunjukkan dengan banyak jumlah ABK biasa kapal yang memiliki pendapatan pada kategori yang sedang yaitu antara Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- yang dimiliki oleh sebanyak 14 orang ABK biasa atau 70 persen. Jumlah ABK biasa dengan pendapatan paling rendah adalah sebanyak 6 orang atau 30 persen, sedangkan pada tingkat pendapatan paling tinggi yaitu sebesar lebih dari Rp 1.500.000,- tidak dimiliki oleh ABK biasa kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP.

Untuk mengetahui adanya perbedaan pendapatan antara pemilik kapal ABK biasa kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP adalah Rp 1.112.069,- yang sudah membayar PPP dan PHP dengan yang belum membayar, dilakukan analisis uji beda. Berdasarkan uji *Liliefors* yang dilakukan, diketahui bahwa sebaran data penelitian memiliki sebaran normal. Hal itu ditunjukkan dengan nilai signifikansi hitung pendapatan pemilik yang sudah membayar sebesar 0,097 dan

Tabel 57 memperlihatkan bahwa sebagian besar ABK biasa dari 20 orang ABK biasa yang dijadikan responden penelitian memiliki pendapatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang diterima ABK biasa pada kapal yang sudah membayar PPP dan PHP. Jumlah ABK biasa pada kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP sama dengan jumlah ABK biasa pada kapal yang sudah membayar PPP dan PHP pada tingkat pendapatan sedang sebesar lebih dari Rp 1.000.000,- - Rp 1.500.000,- yaitu sebanyak 14 orang atau 70 persen. Pada tingkat pendapatan terendah dimiliki oleh ABK biasa sebanyak 5 orang atau 25 persen, sedangkan pada tingkat pendapatan tertinggi hanya dimiliki oleh 1 orang ABK biasa saja atau 5 persen. Besar rata-rata pendapatan

**Ilustrasi 39. Diagram Pendapatan Satu Tahun ABK Biasa Kapal *Purse Seine* yang Belum Membayar PPP dan PHP**



yang belum membayar sebesar 0,20, sedangkan nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa masing-masing sebesar 0,20, yang berarti lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yakni sebesar 0,05 (lihat lampiran hal. 159). Hal ini memperhatikan bahwa data penelitian memiliki sebaran normal sehingga uji statistik yang digunakan adalah uji t.

Adapun hasil uji beda terhadap pendapatan nelayan kapal *purse seine* yang sudah membayar PPP dan PHP dengan pendapatan nelayan kapal *purse seine* yang belum membayar PPP dan PHP adalah sebagai berikut:

**Tabel 58**  
**Hasil Uji Beda Pendapatan Nelayan Kapal *Purse Seine* yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP**

No	Keterangan	Tingkat	Pene- litian	t hitung	t tabel	Kesimpulan
		Signifikansi				
1.	Pendapatan Pemilik	0,000	0,05	5,516	2,021	Ada beda nyata
2.	Pendapatan Nahkoda	0,58	0,05	0,558	2,021	Tidak ada beda nyata
3.	Pendapatan Motoris	0,58	0,05	0,558	2,021	Tidak ada beda nyata
4.	Pendapatan Juru	0,58	0,05	0,558	2,021	Tidak ada beda nyata
5.	Pendapatan ABK Biasa	0,58	0,05	0,558	2,021	Tidak ada beda nyata

Sumber: Hasil olah data penelitian

Dari data tabel di atas dapat diraikan mengenai perbedaan pendapatan antara nelayan kapal *purse seine* yang sudah dan belum membayar PPP dan PHP berikut ini.

1). Pendapatan Per Tahun Pemilik Kapal

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan pemilik kapal per tahun yang sudah membayar PPP dan PHP memiliki perbedaan seperti yang terdapat pada tabel berikut ini:

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa pendapatan nahkoda per tahun pada pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dengan yang

2). Pendapatan Per Tahun Nahkoda

membayar (lihat lampiran hal. 161).

pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dengan yang belum disyaratkan yakni 0,05. Dengan demikian, ada beda nyata antara pendapatan 0,000 yang berarti nilai signifikansi hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang signifikansi hitung mengenai pendapatan pemilik kapal diperoleh nilai sebesar yaitu sebesar 5,516 lebih besar daripada nilai t tabel sebesar 2,021 dan tingkat itu didukung dengan uji statistik yakni uji t yang dilakukan dimana nilai t hitung yang belum membayar, terdapat adanya perbedaan yang cukup signifikan. Hal satu tahun antara pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dengan Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa dari rata-rata pendapatan

Sumber: Data penelitian diolah

No	Pemilik Kapal yang Sudah Membayar PPP dan PHP (Rp)	Pemilik Kapal yang Belum Membayar PPP dan PHP (Rp)	Rata-rata
1	27.803,317	39.458,905	
2	35.806,376	43.216,896	
3	36.373,313	52.330,024	
4	41.658,303	47.780,171	
5	41.184,597	43.887,966	
6	33.320,668	73.441,880	
7	37.230,765	55.911,389	
8	42.887,426	59.188,357	
9	37.785,684	39.861,547	
10	25.580,147	34.224,560	
11	24.904,794	45.095,891	
12	37.420,568	50.893,935	
13	13.250,218	46.303,817	
14	47.699,816	41.606,328	
15	33.310,025	44.290,608	
16	40.872,028	57.873,061	
17	41.083,652	46.303,817	
18	22.473,733	51.860,275	
19	26.052,923	48.988,096	
20	11.266,235	43.619,538	
	Rp 32.848.229	Rp 48.306.853	

Tabel 59  
 Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum  
 Membayar PPP dan PHP

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan nahkoda per tahun pada kapal yang sudah membayar PPP dan PPH, tidak memiliki perbedaan yang nyata. Dari hasil uji statistik yang dilakukan memperlihatkan bahwa nilai t hitung sebesar 0,558 lebih rendah daripada nilai t tabel sebesar 2,021 dengan tingkat signifikansi hitung mengenai pendapatan nahkoda diperoleh nilai sebesar 0,58 yang berarti nilai signifikansi hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan dalam penelitian yakni sebesar 0,05 (lihat lampiran hal. 161). Itu berarti bahwa tidak ada beda nyata pendapatan antara nahkoda pada pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PPH dan yang belum membayar.

Sumber: Data penelitian diolah

No	Pemilik Kapal yang Sudah Membayar PPP dan PPH (Rp)	Pemilik Kapal yang Belum Membayar PPP dan PPH (Rp)
1	16.609.599	16.410.882
2	18.654.819	17.973.823
3	20.027.974	21.763.955
4	21.998.397	19.871.680
5	23.109.201	18.252.920
6	18.950.661	30.544.335
7	23.667.394	23.253.438
8	23.209.676	24.616.323
9	21.959.323	16.578.340
10	17.080.714	14.233.928
11	18.286.411	18.755.294
12	19.815.861	21.166.689
13	13.005.903	19.257.668
14	24.448.865	17.303.991
15	19.090.210	18.420.378
16	21.099.705	24.069.294
17	23.053.382	19.257.668
18	17.583.088	21.568.588
19	15.406.134	20.374.054
20	12.280.252	18.141.281
Rata-rata	Rp 19.466.878	Rp 20.090.726

**Tabel 60**  
**Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun Nahkoda pada Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PPH**

diperlihatkan pada tabel berikut ini:

belum membayar, tidak terdapat perbedaan yang nyata. Hal itu seperti

3). Pendapatan Per Tahun Motoris

Pendapatan motoris per tahun pada pemilik kapal yang sudah membayar dan yang belum memperhatikan tidak ada perbedaan nyata. Hal itu seperti yang

terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 61**  
**Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun Motoris pada Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPP dan PHP**

No	Pemilik Kapal yang sudah membayar PPP dan PHP (Rp)	Pemilik Kapal yang Belum Membayar PPP dan PHP (Rp)
1	2.681.294	2.649.215
2	3.011.455	2.901.521
3	3.233.124	3.513.364
4	3.551.210	3.207.893
5	3.730.527	2.946.576
6	3.059.213	4.930.784
7	3.820.637	3.753.812
8	3.746.747	3.973.823
9	3.544.902	2.676.248
10	2.757.346	2.297.789
11	2.951.983	3.027.674
12	3.198.882	3.416.947
13	2.099.548	3.108.773
14	3.946.790	2.793.390
15	3.081.740	2.973.609
16	3.406.134	3.885.515
17	3.721.516	3.108.773
18	2.838.445	3.481.826
19	2.487.018	3.288.991
20	1.982.406	2.928.554
Rata-rata	Rp 3.142.546	Rp 3.243.254

Sumber: Data penelitian diolah

Data di atas memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan motoris pada pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP adalah sebesar Rp. 3.142.546,-, sedangkan pendapatan motoris pada pemilik kapal yang belum membayar adalah sebesar Rp. 3.243.254,-. Data ini memperlihatkan bahwa pendapatan motoris pada kedua kelompok pemilik kapal tidak memiliki perbedaan yang nyata (lihat lampiran hal. 161). Data ini didukung dengan hasil uji t statistik yang dilakukan, dimana nilai t hitung sebesar 0,558 lebih rendah dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,021, sedangkan tingkat signifikansi hitung diperoleh nilai sebesar 0,58 yang berarti nilai signifikansi hitung lebih

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan per tahun juru pada pemilik kapal yang sudah membayar PPH dan PHP dengan yang belum membayar tidak berbeda nyata. Hal ini didukung dengan hasil uji t statistik yang dilakukan dimana nilai t hitung sebesar 0,558 lebih rendah dibandingkan dengan nilai t tabel sebesar 2,021, sedangkan tingkat signifikansi hitung diperoleh nilai sebesar 0,58 yang berarti nilai signifikansi

Sumber: Data penelitian diolah

No	Pemilik Kapal yang Sudah Membayar PPH dan PHP (Rp)	Pemilik Kapal yang Belum Membayar PPH dan PHP (Rp)	Rata-rata
1	1.506.685	1.488.659	
2	1.692.210	1.630.436	
3	1.816.772	1.974.245	
4	1.995.512	1.802.594	
5	2.096.275	1.655.753	
6	1.719.047	2.770.729	
7	2.146.910	2.109.359	
8	2.105.389	2.232.989	
9	1.991.968	1.503.849	
10	1.549.421	1.291.184	
11	1.658.791	1.701.325	
12	1.797.530	1.920.066	
13	1.179.788	1.746.896	
14	2.217.798	1.569.674	
15	1.731.705	1.670.944	
16	1.913.990	2.183.367	
17	2.091.212	1.746.896	
18	1.594.992	1.956.523	
19	1.397.517	1.848.165	
20	1.113.963	1.645.626	
	Rp 1.765.874	Rp 1.822.464	

Tabel 62  
 Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun Juru pada Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPH dan PHP

perbedaan yang nyata seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.  
 Tingkat pendapatan per tahun juru pada pemilik kapal yang sudah membayar dan yang belum membayar, juga tidak menunjukkan adanya

4). Pendapatan Per Tahun Juru

membayara PPH dan PHP dengan yang belum membayar.  
 tidak ada beda nyata pendapatan motoris pada pemilik kapal yang sudah besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Dengan demikian,

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata pendapatan per tahun ABK biasa pada pemilik kapal yang sudah membayar PPH dan PHP adalah sebesar Rp. 1.077.538.-, sedangkan ABK biasa pada pemilik kapal yang belum membayar adalah sebesar Rp.1.112.069.-. Data ini didukung dengan hasil uji t statistik yang memperlihatkan bahwa nilai t tabel sebesar 2,021 lebih besar

Sumber: Data penelitian diolah

No	Pemilik Kapal yang Sudah Membayar PPH dan PPH (Rp)	Pemilik Kapal yang Belum Membayar PPH dan PPH (Rp)
1	919.380	908.381
2	1.032.588	994.893
3	1.108.596	1.204.686
4	1.217.663	1.099.944
5	1.279.149	1.010.342
6	1.048.964	1.690.701
7	1.310.046	1.287.133
8	1.284.710	1.362.572
9	1.215.500	917.650
10	945.458	787.881
11	1.012.196	1.038.150
12	1.096.855	1.171.626
13	719.907	1.065.957
14	1.353.302	957.817
15	1.056.688	1.019.611
16	1.167.918	1.332.292
17	1.276.059	1.065.957
18	973.265	1.193.872
19	852.766	1.127.752
20	679.741	1.004.163
Rata-rata	Rp 1.077.538	Rp 1.112.069

Tabel 63  
 Nilai Nominal Pendapatan Per Tahun ABK Biasa pada Pemilik Kapal yang Sudah dan Belum Membayar PPH dan PPH

didukung dengan data seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini.  
 Tingkat pendapatan per tahun ABK biasa pada pemilik kapal yang sudah membayar PPH dan PPH, juga tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal itu

5). Pendapatan Per Tahun ABK Biasa

dengan pemilik kapal yang belum membayar.  
 pendapatan juru pada pemilik kapal yang sudah membayar PPH dan PPH sebesar 0,05 (lihat lampiran hal. 161). Itu berarti bahwa tidak ada beda nyata hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang disarankan dalam penelitian

dibandingkan dengan nilai t hitung sebesar 0,558, sedangkan pada tingkat nilai signifikansi hitung diperoleh nilai sebesar 0,58, yang berarti nilai signifikansi hitung lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian yakni sebesar 0,05 (lihat lampiran hal. 161). Dengan demikian, tidak terdapat beda nyata antara pendapatan ABK biasa pada pemilik kapal yang sudah membayar PFP dan PHP dengan yang belum membayar.

#### 4.2.5. Perbandingan PFP Kepmen Tahun 2001, PFP Hasil Penelitian, dan

##### PFP Kepmen Tahun 2002

PFP merupakan pungutan selain pajak yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang dalam hal ini pada umumnya adalah pemilik kapal. Adapun besar tarif PFP ditentukan sebesar 2,5 persen dari produktivitas dikalikan dengan harga patokan ikan. Harga patokan ikan ditentukan per jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* yaitu Banyar, Layang, Lamuru, Selar, Tembang, dan lainnya. Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan besar PFP berdasarkan ketentuan pemerintah adalah sebagai berikut:

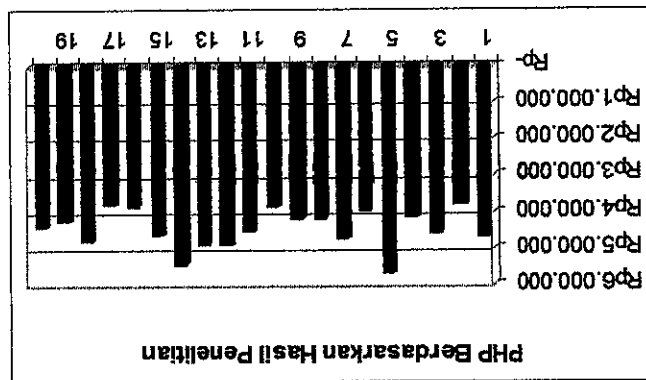
$$\text{PFP} = 2,5\% \times \text{produktivitas} \times \text{harga patokan ikan}$$

Dimana produktivitas merupakan hasil dari 1,5 ton dikalikan dengan bobot kapal. Nilai 1,5 ton merupakan nilai absolut yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dari hasil produktivitas tersebut ditentukan jumlah masing-masing jenis ikan dengan menurut kualitas ikan dengan berdasarkan pada komposisi ikan masing-masing. Dengan diketahui jumlah per jenis ikan menurut kualitas-ikan maka langkah selanjutnya adalah dengan mengalikan jumlah masing-masing ikan tersebut dengan harga patokan ikan yang telah ditentukan.

Dengan menggunakan rumus tersebut, dapat diketahui nilai PFP perhitungan menurut hasil penelitian mengenai komposisi jenis ikan dan harga ikan menurut kualitas (es dan garaman) seperti dapat dilihat pada Tabel 64.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan harga patokan ikan (HPI) Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001, maka nilai yang dibayar oleh pemegang SP1 atau 20 pemilik kapal *purse seine* (responden) dapat dilihat pada Tabel 65.

Ilustrasi 40. Diagram PHP Berdasarkan Hasil Penelitian

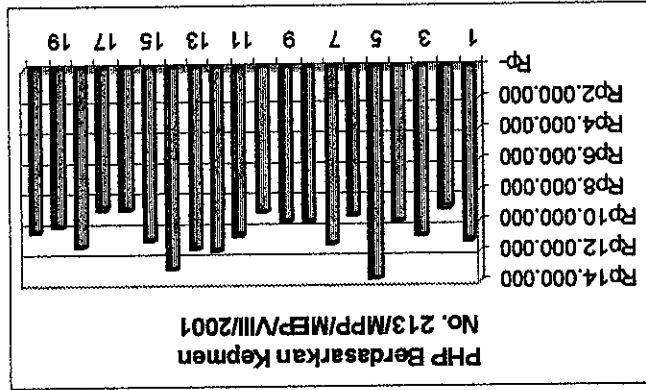


Sumber: Hasil penelitian diolah

Kapal Responden	Produktivitas (Ton)	Bobot Kapal (GT)	PHP (Rp)
1.	166,5	111	4.662.833
2.	135	90	3.780.675
3.	162	108	4.536.810
4.	147	98	4.116.735
5.	202,5	135	5.671.013
6.	141	94	3.948.705
7.	169,5	113	4.746.848
8.	148,5	99	4.158.743
9.	148,5	99	4.158.743
10.	138	92	3.864.690
11.	160,5	107	4.494.803
12.	175,5	117	4.914.878
13.	174	116	4.872.870
14.	193,5	129	5.418.968
15.	165	110	4.620.825
16.	136,5	91	3.822.683
17.	135	90	3.780.675
18.	171	114	4.788.855
19.	151,5	101	4.242.758
20.	157,5	105	4.410.788

Tabel 64  
PHP Berdasarkan Hasil Penelitian

Ilustrasi 41. Diagram PHP Berdasarkan Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001



adalah sebagai berikut:

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa besar PHP berdasarkan Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001 untuk masing-masing kapal tidak sama. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan bobot kapal untuk masing-masing kapal *purse seine*. Adapun gambar yang menunjukkan nilai PHP tersebut

Sumber: Hasil Perhitungan HPI Berdasarkan Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001

Kapal Responden	Produktivitas (Ton)	Bobot Kapal (GT)	PHP (Rp)
1	166,5	111	11.288.076
2	135	90	9.152.494
3	162	108	10.982.993
4	147	98	9.966.049
5	202,5	135	13.728.741
6	141	94	9.559.271
7	169,5	113	11.491.464
8	148,5	99	10.067.743
9	148,5	99	10.067.743
10	138	92	9.355.883
11	160,5	107	10.881.298
12	175,5	117	11.898.242
13	174	116	11.796.548
14	193,5	129	13.118.574
15	165	110	11.186.381
16	136,5	91	9.254.188
17	135	90	9.152.494
18	171	114	11.593.159
19	151,5	101	10.271.132
20	157,5	105	10.677.909

Tabel 65  
PHP Berdasarkan Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001

Di samping PHP hasil penelitian dan penetapan pemerintah tahun 2001, dalam penelitian ini juga akan dihitung besar nilai PHP dengan berdasarkan pada harga patokan ikan tahun 2002 yang ditetapkan dalam Kepmen Perindustrian dan Perdagangan No. 548/MP/Kept/2002.

Dari hasil perhitungan yang dilakukan untuk mengetahui besar nilai PHP berdasarkan pada penetapan pemerintah yang baru tersebut dapat dilihat pada

Tabel 66.

Tabel 66  
 PHP Berdasarkan Kepmen No. 548/MP/Kept/2002

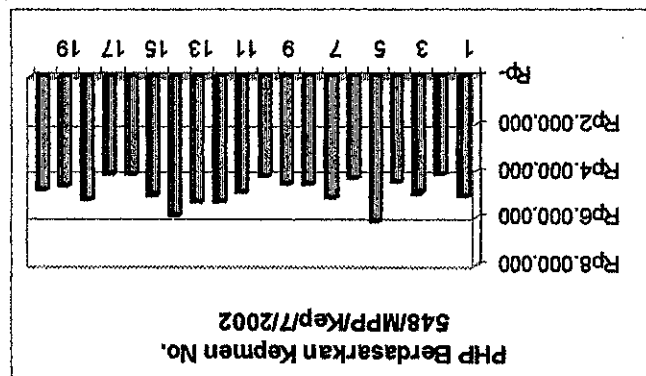
Kapal Responden	Produktivitas (Ton)	Bobot Kapal (GT)	PHP (Rp)
1.	166,5	111	5.060.185
2.	135	90	4.102.853
3.	162	108	4.923.423
4.	147	98	4.467.551
5.	202,5	135	6.154.279
6.	141	94	4.285.202
7.	169,5	113	5.151.359
8.	148,5	99	4.513.138
9.	148,5	99	4.513.138
10.	138	92	4.194.027
11.	160,5	107	4.877.836
12.	175,5	117	5.333.708
13.	174	116	5.288.121
14.	193,5	129	5.880.755
15.	165	110	5.014.598
16.	136,5	91	4.148.440
17.	135	90	4.102.853
18.	171	114	5.196.947
19.	151,5	101	4.604.312
20.	157,5	105	4.786.661

Sumber: Hasil Perhitungan HPI Berdasarkan Kepmen No. 548/MP/Kept/2002

Perbandingan antara nilai PHP berdasarkan ketetapan pemerintah tahun 2001, hasil penelitian dan PHP berdasarkan ketetapan pemerintah tahun 2002 dapat dilihat pada Tabel 67 dan ilustrasi diagram batang berikut ini.

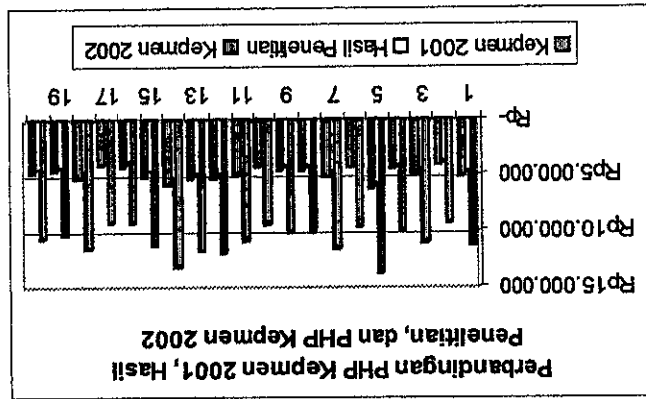
Dari ketiga tabel tentang nilai PHP berdasarkan ketetapan pemerintah tahun 2001, hasil penelitian, dan ketetapan pemerintah tahun 2002 diperoleh bahwa besar nilai PHP berdasarkan hasil penelitian lebih kecil atau rendah dibandingkan dengan PHP ketetapan pemerintah baik yang lama maupun yang baru. Besarnya nilai PHP berdasarkan ketetapan pemerintah yang lama disebabkan oleh penggunaan harga patokan ikan yang tinggi pada tahun 2001 dan tidak dibedakan harga ikan segar (es) dan garaman, sedangkan nilai PHP berdasarkan ketetapan pemerintah yang baru dihitung dengan menggunakan harga patokan ikan dengan memperhatikan jenis dan kualitas hasil tangkapan (es dan garaman).

**Ilustrasi 42. Diagram PHP Berdasarkan Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002**



Gambar diagram di atas memperlihatkan bahwa penerapan PHP antara pemerintah dengan di lapangan memiliki perbedaan, dimana yang sesungguhnya PHP yang dikenakan kepada pemilik atau pengusaha kapal menjadi lebih kecil.

**Ilustrasi 43. Diagram Perbandingan Antara PHP Kepmen Tahun 2001, PPH Hasil Penelitian, dan PPH Kepmen Tahun 2002**



Sumber: Hasil penelitian, Diolah

Kapal	Bobot Kapal (GT)	PHP dengan HPI 213/MPP/MEP/III/2001 (Rp)	PHP dengan HPI Hasil Penelitian (Rp)	PHP dengan HPI 548/MPP/KEP/II/2002 (Rp)
1.	111	11.288.076	4.662.833	5.060.185
2.	90	9.152.494	3.780.675	4.102.853
3.	108	10.982.993	4.536.810	4.923.423
4.	98	9.966.049	4.116.735	4.467.551
5.	135	13.728.741	5.671.013	6.154.279
6.	94	9.559.271	3.948.705	4.285.202
7.	113	11.491.464	4.746.848	5.151.359
8.	99	10.067.743	4.158.743	4.513.138
9.	99	10.067.743	4.158.743	4.513.138
10.	92	9.355.883	3.864.690	4.194.027
11.	107	10.881.298	4.494.803	4.877.836
12.	117	11.898.242	4.914.878	5.333.708
13.	116	11.796.548	4.872.870	5.288.121
14.	129	13.118.574	5.418.968	5.880.755
15.	110	11.186.381	4.620.825	5.014.598
16.	91	9.254.188	3.822.683	4.148.440
17.	90	9.152.494	3.780.675	4.102.853
18.	114	11.593.159	4.788.855	5.196.947
19.	101	10.271.132	4.242.758	4.604.312
20.	105	10.677.909	4.410.788	4.786.661

**Tabel 67**  
Perbandingan PHP Berdasarkan HPI Kepmen No. 213/MPP/MEP/III/2001, HPI Hasil Penelitian, dan HPI Kepmen No. 548/MPP/KEP/II/2002

Berdasarkan data tabel di atas memperlihatkan bahwa PHP hasil perhitungan berdasarkan HPI Kepmen No. 13 Tahun 2001 dibandingkan dengan PHP hasil penelitian, memiliki beda nyata. Hal itu didukung dengan hasil analisis uji t, dimana nilai signifikansi hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan pada penelitian yakni sig. hitung  $0,002 < 0,05$  yang dipersyaratkan dalam penelitian, dengan nilai t hitung =  $20,404 > t$  tabel pada  $df = 38$ , dengan nilai 2,021. Jika nilai signifikansi hitung lebih kecil dari signifikansi yang dipersyaratkan dan nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, maka  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat beda nyata. Dengan demikian, PHP yang dihasilkan berdasarkan Kepmen No. 213 Tahun 2001 berbeda nyata dengan PHP hasil penelitian (lihat lampiran hal. 180). Itu berarti, bahwa PHP pemerintah tahun 2001 tersebut lebih besar dibandingkan dengan PHP hasil penelitian.

Selanjutnya, PHP penelitian dibandingkan dengan PHP pemerintah berdasarkan perhitungan HPI Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002, tidak memiliki

Tingkat Kepercayaan 95% = 0,05  
 $df : 38 = 2,021$  (nilai t tabel)

Sumber: Hasil olah data penelitian

Kesimpulan	Tingkat signifikansi	Hitung Penelitian	Nilai t	Keterangan	
				Hitung	Penelitian
Beda nyata	0,002	0,05	20,404	2,021	Beda nyata
Tidak beda nyata	0,722	0,05	-2,172	2,021	Tidak beda nyata
	0,003	0,05	18,937	2,021	Beda nyata

**Tabel 68**  
**Hasil Uji Beda Terhadap PHP Berdasarkan HPI Kepmen No. 213/MPP/MEP/III/2001, HPI Hasil Penelitian, dan HPI Kepmen No. 548/MPP/Kep/7/2002**

hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil uji beda yang dilakukan terhadap PHP berdasarkan HPI lama Tahun 2001 dengan PHP hasil penelitian, PHP berdasarkan hasil penelitian dengan PHP berdasarkan HPI baru Tahun 2002, dan PHP berdasarkan HPI lama Tahun 2001 dengan PHP berdasarkan HPI baru Tahun 2002 diperoleh

diharapkan.  
 No. 213/MP/MEP/III/2001 dibandingkan dengan PHP hasil perhitungan berdasarkan HPI Kepmen No. 548/MP/KEP/7/2002, terdapat perbedaan nyata. Hal itu didukung dengan hasil uji beda yang dilakukan, dimana nilai signifikansi hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan pada penelitian yakni sig. hitung  $0,003 > 0,05$  yang dipersyaratkan dalam penelitian, dengan nilai  $t$  hitung =  $18,937 > t$  tabel pada  $df = 38$ , dengan nilai  $2,021$ . Jika nilai signifikansi hitung lebih kecil dari signifikansi yang dipersyaratkan dan nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  tabel, maka  $H_0$  ditolak, yang berarti terdapat beda nyata (lihat lampiran hal. 182). Dengan demikian, PHP yang dihasilkan berdasarkan Kepmen No. 213 Tahun 2001 berbeda nyata dengan PHP yang dihasilkan berdasarkan Kepmen tahun 2002. Itu berarti, bahwa PHP pemerintah tahun 2001 tersebut lebih besar dibandingkan dengan PHP berdasarkan Kepmen tahun 2002. Penerapan PHP tahun 2001, jelas akan lebih memberatkan nelayan *purse seine*, jika dibandingkan dengan PHP tahun 2002 yang jauh lebih rendah dan telah mendekati PHP hasil penelitian.

PHP hasil perhitungan berdasarkan HPI Kepmen No. 213/MP/MEP/III/2001 dibandingkan dengan PHP hasil perhitungan berdasarkan HPI Kepmen No. 548/MP/KEP/7/2002, terdapat perbedaan nyata. Hal itu didukung dengan hasil uji beda yang dilakukan, dimana nilai signifikansi hitung lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan pada penelitian yakni sig. hitung  $0,722 > 0,05$  yang dipersyaratkan dalam penelitian, dengan nilai  $t$  hitung =  $-2,172 < t$  tabel pada  $df = 38$ , dengan nilai  $2,021$ . Jika nilai signifikansi hitung lebih besar dari signifikansi yang dipersyaratkan dan nilai  $t$  hitung lebih kecil dari nilai  $t$  tabel, maka  $H_0$  diterima, yang berarti tidak terdapat beda nyata (lihat lampiran hal. 181). Dengan demikian, PHP yang dihasilkan berdasarkan Kepmen Tahun 2002 tidak terdapat beda nyata dengan PHP hasil penelitian. Itu berarti, bahwa PHP pemerintah tahun 2002 tersebut jika dibandingkan dengan PHP hasil penelitian tidak mengalami perbedaan yang cukup signifikan, yang berarti ketetapan pemerintah sudah sesuai dengan yang

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa komposisi dan jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dengan kapasitas ukuran 30 GT ke atas di Kota Pekalongan selama lima tahun yakni antara tahun 1997-2001 menunjukkan adanya fluktuasi produksi ikan hasil tangkapan. Jenis ikan hasil tangkapan yang diperoleh nelayan umumnya adalah ikan banyar, tembang, layang, lemuru, dan ikan selar. Komposisi ikan hasil tangkapan merupakan produktivitas yang menunjukkan tingkat kemampuan kapal penangkap ikan untuk memperoleh hasil tangkapan ikan (Kepmen No. 23, 2001). Adapun komposisi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* yang ditetapkan menurut Kepmen tersebut adalah sebesar 40 persen untuk ikan layang, ikan banyar atau kembung sebesar 20 persen, kemudian ikan selar sebesar 15 persen, dan untuk ikan lemuru dan tembang memiliki komposisi yang sama yakni 10 persen, sedangkan pada ikan jenis lainnya ditentukan sebesar 5 persen. Hasil produksi ikan hasil tangkapan dengan kelima jenis ikan tersebut pada tahun 1997 mencapai 75.072 ton per tahun, tahun 1998 mengalami peningkatan menjadi sebesar 78.475 ton per tahun. Untuk tahun 1999 dan tahun 2000, jumlah produksi ikan hasil

#### **4.3.1. Komposisi dan Jenis Ikan Hasil Tangkapan**

Kota Pekalongan merupakan salah satu sumber perikanan yang cukup besar terutama karena di kota tersebut terdapat pelabuhan. Hasil ikan tangkapan selama lima 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa di kota tersebut terdapat peningkatan yang cukup signifikan khususnya dengan menggunakan kapal *purse seine* dengan kapasitas ukuran 30 GT ke atas. Hasil ikan tangkapan tersebut terdiri dari bermacam-macam jenis ikan dengan kualitas segar dan garaman.

#### **4.3. Pembahasan**

Ukuran dan jenis alat tangkap yang digunakan untuk melakukan kegiatan melaut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil tangkapan (Mulyono, 1986), dimana ukuran alat tangkap yang semakin besar maka akan mampu menghasilkan ikan lebih banyak dibandingkan dengan ukuran alat tangkap yang lebih kecil. Untuk jenis alat tangkap *purse seine* sendiri diklasifikasikan menjadi tiga yakni mini, sedang, dan besar. Kapal dengan alat tangkap *purse seine* yang tergolong dalam ukuran besar pada umumnya memiliki bobot kapal lebih dari 30 GT (PP No. 141, 2000). Adapun ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* lebih banyak dibandingkan dengan hasil ikan tangkapan kapal dengan alat tangkap lainnya. Hal ini disebabkan oleh banyaknya nelayan di Kota Pekalongan yang menggunakan alat tangkap *purse seine*. Di samping itu, dengan adanya perkembangan alat tangkap *purse seine* menjadikan daerah penangkapan ikan semakin luas sehingga peluang untuk mendapatkan hasil yang banyak lebih besar dibandingkan dengan hasil yang dapat diperoleh dengan menggunakan alat tangkap lain baik berupa jaring *gillnet* maupun *long line*. Perluasan daerah operasi para nelayan kapal *purse seine* akibat berkembangnya ukuran alat tangkap khususnya nelayan di Kota Pekalongan meliputi daerah Bawean, utara Pulau Lombok, perairan Karimun Jawa, dan Masalemba (Mulyono, 1986).

dengan komposisi 17,7 persen.

tangkapan mengalami penurunan yakni masing-masing menjadi 60.971 ton per tahun dan 60.610 ton per tahun untuk tahun 2000. Pada tahun 2001, jumlah produksi ikan hasil tangkapan mengalami kenaikan kembali menjadi sebesar 67.514 ton per tahun. Selama lima tahun terakhir tersebut, jumlah hasil produksi ikan dan komposisi terbesar diperoleh pada tahun 1998 yaitu 78.475 ton dengan komposisi sebesar 22,9 persen, sedangkan jumlah hasil produksi dengan komposisi paling rendah terdapat pada tahun 2000 yaitu hanya sebanyak 60.610

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa waktu yang dibutuhkan untuk melaut dalam satu trip adalah antara 35 hingga 40 hari. Lamanya waktu yang dibutuhkan akan berpengaruh terhadap kualitas ikan hasil tangkapan apabila tidak diawetkan. Berdasarkan pada uraian tersebut, maka kualitas ikan

seine tersebut akan berpengaruh terhadap proses perhitungan besar nilai PHP. Menteri tahun 2001. Perbedaan komposisi jenis ikan hasil tangkapan kapal purse seine atau memiliki perbedaan dengan komposisi ikan berdasarkan Ketetapan tangkapan kapal purse seine tahun 2001 berdasarkan hasil penelitian tidak hasil tangkapan. Dengan demikian dapat diketahui bahwa komposisi ikan hasil 17.134 ton dengan rata-rata 3.427 ton atau sebesar 5 persen dari komposisi ikan 8 persen, sedangkan paling rendah adalah jenis ikan lainnya yakni sebesar 27.412 ton dengan rata-rata 5.482 ton atau 9 persen, dan jenis ikan selar sebesar 30.839 ton dengan rata-rata sebesar 6.167 atau 9 persen, kemudian sebesar 41.118 ton dengan rata-rata 8.224 atau sebesar 12 persen, disusul banyar sebesar 51.397 ton dengan rata-rata 10.279 ton atau sebesar 15 persen, disusul sebesar 174.747 ton dengan rata-rata 34.949 ton atau 51 persen dari komposisi hasil ikan tangkapan, disusul lemuru sebesar ikan layang dengan total sebesar 174.747 ton dengan rata-rata 34.949 ton atau Komposisi jenis ikan hasil tangkapan terbesar selama lima tahun adalah alat tangkap lain.

produksi kapal purse seine sebesar 28,6 kali lipat hasil produksi kapal dengan perbandingan sebesar 28,6 : 1 yang berarti bahwa pada tahun tersebut hasil besar, terutama pada tahun 1998 dimana hasil produksinya memiliki rasio atau kapal yang menggunakan alat tangkap lain memiliki perbandingan yang cukup bahwa antara hasil produksi kapal dengan alat tangkap purse seine dengan bulan atau 30 hari (Purbiantoro, 2001). Dari hasil penelitian memperhatikan dibutuhkan untuk melaut semakin lama yang dapat mencapai lebih dari satu Dengan semakin luasnya daerah operasi sehingga mengakibatkan waktu yang

HPI (Harga Patokan Ikan) ditentukan dengan menggunakan rumus  $ax + by$ , dimana a adalah volume penjualan ikan dalam negeri yang dinyatakan dalam persen, b adalah volume penjualan ikan untuk ekspor yang dinyatakan dalam persen, x adalah harga rata-rata terimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri yang dinyatakan dalam rupiah, dan y adalah harga rata-rata terimbang per jenis ikan untuk ekspor yang juga dinyatakan dalam rupiah (Kepmen No. 213, 2001). Pada tahun 2001, harga ikan tidak dibedakan kualitasnya sehingga HPI pada tahun tersebut dinilai terlahu tinggi yang ditunjukkan oleh harga jenis ikan layang sebesar Rp 3.926,-/kg, ikan banyar atau kembung sebesar Rp 3.365,-/kg, ikan selar sebesar Rp 1.683,-/kg, dan harga untuk jenis ikan lemuru dan ikan tembang adalah sama yakni sebesar Rp 574,-/kg, sedangkan untuk jenis ikan lainnya sebesar Rp 7.291,-/kg. Dengan tingginya harga ikan yang ditetapkan maka akan berimplikasi terhadap harga ikan di pasar yang tinggi pula, sehingga hal ini akan

#### 4.3.2. Harga Ikan Berdasarkan IHK (Indeks Harga Konsumen)

hasil tangkapan kapal *purse seine* dibedakan menjadi dua yakni ikan segar dan ikan asin. Ikan segar diawetkan dengan menggunakan es, sedangkan ikan asin diawetkan dengan menggunakan garam (Kepmen No. 548, 2002). Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa kualitas ikan segar selama lima tahun terakhir merupakan yang paling rendah jika dibandingkan dengan ikan asin. Dilihat dari rata-ratanya, maka diperoleh hasil bahwa ikan segar selama lima tahun terakhir, mencapai total 119.924 ton dengan rata-rata 23.985 ton atau sebesar 35 persen dari total hasil tangkapan. Untuk ikan asin mencapai total 222.718 ton dengan rata-rata 68.528 ton atau sebesar 65 persen dari total hasil tangkapan.

semakin meningkat nilai pungutan perikanan yang dikenakan kepada nelayan khususnya pemilik kapal *purse seine* yang bertindak sebagai pengusaha.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa harga ikan rata-rata selama lima tahun terakhir yakni untuk berbagai jenis ikan hasil tangkapan adalah sebesar Rp. 8.290.-/kg untuk ikan Banyar (*Mackerels*) segar dan asin sebesar Rp. 3.020.-, ikan Layang (*Scads*) segar sebesar Rp. 7.740.-/kg dan asin sebesar Rp. 2.780.-/kg, ikan Lemuru (*Indian Oil Sardinella*) segar sebesar Rp. 2.380.-/kg dan asin sebesar Rp. 1.490.-/kg, ikan Selar (*Trevallies*) segar sebesar Rp. 6.750.- dan asin sebesar Rp. 4.830.-/kg, ikan Tembang (*Rainbow Sardines*) segar sebesar Rp. 2.240.-/kg, dan asin sebesar Rp. 1.250.-/kg, dan ikan lainnya yang segar Rp. 5.540.-/kg, dan asin Rp. 2.730.-/kg (lihat lampiran hal. 147).

Data rata-rata harga ikan di atas memperlihatkan adanya fluktuasi harga ikan pada tahun yang berbeda-beda. Berdasarkan harga ikan rata-rata tersebut, setelah dikalikan dengan indeks harga konsumen dalam hal ini harga ikan pada tahun 2001 (John Dixon, 1989), maka diperoleh harga per jenis ikan pada tahun 2001 yakni untuk ikan Banyar segar sebesar Rp. 2.350.-/kg, dan asin sebesar Rp. 850.-/kg, ikan Layang segar sebesar Rp. 2.200.-/kg, dan asin sebesar 800.-/kg, Lemuru segar sebesar Rp. 700.-/kg, dan asin sebesar Rp. 450.-, Selar segar sebesar Rp. 1.900.-/kg, dan asin sebesar Rp. 1.350.-/kg, Tembang sebesar Rp. 650.-/kg, dan asin sebesar Rp. 350.-/kg, dan ikan lainnya yang segar sebesar Rp. 1.560.-/kg dan asin sebesar Rp. 770.-/kg (lihat lampiran hal. 147-148).

Berdasarkan data di atas memperlihatkan bahwa harga ikan pada tahun 2001 jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Turunnya harga per jenis ikan pada tahun 2001, disertai dengan indek harga

konsumen yang tinggi, sehingga dengan harga tersebut, pendapatan nelayan menjadi rendah.

Harga ikan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan implikasi dari tingginya harga patokan ikan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepmen No. 213 tahun 2001. Tingginya harga ikan seharusnya mampu memberikan keuntungan bagi para nelayan, namun dengan adanya penerapan pungutan perikanan, harga ikan yang tinggi juga akan mempengaruhi nilai dari pungutan perikanan yang berupa PHP yang harus dibayarkan oleh pemilik kapal satu tahun sekali. Dengan demikian, pendapatan pemilik kapal *purse seine* cenderung akan berkurang.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pemerintah melalui Menteri Perindustrian dan Perdagangan merumuskan keputusan baru mengenai penetapan harga patokan ikan yang diatur dalam Kepmen No. 548/MP/Kep/7/2001. Dalam keputusan tersebut HPI yang ditetapkan telah berdasarkan pada kualitas ikan, dimana harga ikan segar yaitu ikan yang diawetkan dengan es lebih tinggi dibandingkan harga ikan asin yaitu ikan yang atau banyar pada kualitas segar dan asin adalah sama yakni sebesar Rp 2.000,-/kg untuk ikan segarnya dan sebesar Rp 700,-/kg untuk ikan asinya. Pada jenis ikan selar dengan kualitas segar ditetapkan sebesar Rp 1.683,-/kg dan kualitas asin sebesar Rp 1.122,-/kg. Untuk kualitas segar dan asin untuk jenis ikan lemuru adalah sebesar Rp 574,-/kg dan Rp 275,-/kg. Pada jenis ikan tembang ditetapkan sebesar Rp 400,-/kg untuk kualitas segarnya dan untuk kualitas asinya sebesar Rp 200,-/kg, sedangkan untuk ikan jenis lainnya ditetapkan sebesar Rp 7.291,-/kg untuk kualitas segar dan sebesar Rp 5.608,- untuk

Adanya penerapan PPP dan PHP memberikan pengaruh negatif terhadap pemilik kapal, terutama karena pembayaran dilakukan pada awal tahun. Hal ini menjadi sangat terasa karena pada trip pertama untuk pemilik kapal akan mengalami kerugian sebesar PPP dan PHP yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh waktu pembayaran PPP dan PHP ditetapkan pada awal tahun sebagai pembayaran pungutan dari hasil tangkapan ikan pada tahun sebelumnya. Sementara untuk pemilik kapal yang belum membayar PPP dan PHP tidak akan mengalami kerugian karena hasil yang diperoleh pada trip pertama merupakan penghasilan murni. Jika dibandingkan dengan total trip selama satu tahun antara pemilik kapal yang sudah membayar dan yang belum membayar, memperlihatkan bahwa pendapatan pemilik kapal yang sudah

para nelayan terutama para pemilik kapal.

Penerapan PPP dan PHP adalah merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menambah penerimaan negara dari sektor kelautan. Hal itu sesuai dengan PP No. 142 tahun 2000 yang menerapkan adanya PPP dan PHP terhadap setiap pelaku penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hal itu juga berlaku di Kota Pekalongan sebagai salah satu daerah penghasil ikan yang cukup besar. Sehubungan dengan adanya pemberlakuan PPP dan PHP tersebut di Kota Pekalongan, pada kenyataan telah mempengaruhi tingkat pendapatan

#### **4.3.3. Pengaruh PPP dan PHP terhadap Pendapatan Nelayan**

atas tampak bahwa HPI pada tahun 2002 lebih rendah dibandingkan dengan HPI pada tahun 2001. Dengan demikian diharapkan akan berimplikasi terhadap rendahnya harga di pasar.

membayar lebih rendah daripada pemilik kapal yang belum membayar PPP dan PHP.

Adapun rata-rata pendapatan bersih pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP, hanya mencapai sebesar Rp. 32.848.229 per tahun, sedangkan untuk pemilik kapal yang belum membayar PPP dan PHP mencapai sebesar Rp. 48.306.853.- per tahun (lihat lampiran hal. 146). Data ini menunjukkan adanya perbedaan nyata terhadap pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP dengan pemilik kapal yang belum membayar.

Adanya penerapan PPP dan PHP terhadap kegiatan penangkakan ikan, secara langsung tidak memberikan pengaruh terhadap nahkoda, motornis, juru dan ABK kapal. Hal ini disebabkan bahwa yang dibebani pembayaran PPP dan PHP adalah untuk setiap pemegang surat izin penangkakan ikan dalam hal ini pemilik kapal. Oleh sebab itu, maka pihak yang paling merasakan dampak penerapan PPP dan PHP tersebut adalah pemilik kapal seperti yang diperoleh dari hasil penelitian terutama yang sudah membayar PPP dan PHP. Besarnya pendapatan nahkoda, motornis, juru, dan ABK pada pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP, tidak memiliki perbedaan yang nyata (lihat lampiran hal. 146). Dampak yang terjadi terhadap pendapatan nahkoda, motornis, juru, dan ABK adalah adanya sistem pembagian yang kurang adil antara pemilik kapal dengan para ABK tersebut. Pemilik kapal pada kenyataannya telah membebankan seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan selama melaut, sehingga pembagian hasil dirasakan menjadi kurang adil. Sistem bagi hasil yang kurang adil tersebut didukung dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Mubarto (1984) yang menemukan bahwa penghasilan dibagi setelah dikurangi biaya-biaya operasional dan cadangan untuk kerusakan.

Pendapatan ABK baik untuk pemilik kapal yang sudah membayar PPP dan PHP maupun yang belum membayar, masing-masing tergolong cukup rendah. Sistem bagi hasil yang menerapkan bahwa para ABK hanya memperoleh 1 bagian di satu sisi telah memberatkan para ABK tersebut. Untuk mengatasi kecilnya bagian yang diperoleh ABK, maka biasanya mereka melakukan kegiatan memancing yang bisa memberikan pemasukan di samping bagian yang diperolehnya. Hasil pancingan yang diperoleh tersebut umumnya mencapai 3-4 juta per trip dan hasil tersebut dibagi seluruh ABK yang rata-rata memperoleh Rp. 50.000.- – Rp. 150.000.-/orang.

#### **4.3.4. Perbandingan PHP Ketetapan Pemerintah dengan PHP Hasil Penelitian**

Penerapan PHP yang diberlakukan oleh pemerintah adalah merupakan pungutan yang dikenakan kepada pemegang Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang dalam hal ini adalah pemilik kapal. Adapun besar nilai PHP ditentukan dalam PP No. 142/2000 sebesar 2,5% dari hasil produksi dikalikan dengan harga patokan ikan.

Dalam menentukan besar nilai PHP berdasarkan ketetapan pemerintah digunakan 2 (dua) harga patokan ikan (HPI) yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu No. 213/MP/MEP/III/2001 yang kemudian disebut sebagai HPI lama dan No. 548/MP/KEP/7/2002 yang kemudian disebut sebagai HPI baru. HPI baru dikeluarkan pada bulan Agustus 2002, sehingga penentuan PHP berdasarkan HPI yang baru bertujuan untuk mengetahui besar nilai PHP yang dikenakan oleh pemilik kapal untuk tahun yang akan datang. Di samping itu pula untuk mengetahui perbedaan nilai PHP dengan hasil penelitian dan ketetapan pemerintah berdasarkan HPI lama.

Harga patokan ikan lama tidak membedakan jenis ikan berdasarkan kualitasnya yaitu ikan segar dan ikan garaman dan nilainya tergolong relatif tinggi, sedangkan HPI baru sudah ditetapkan dengan memperhatikan atau membedakan kualitas ikan dan nilainya relatif rendah. Adapun nilai HPI baru untuk jenis ikan Banyak atau Kembung dengan kualitas segar dan garaman adalah Rp 2.000,-/kg dan Rp 700,-/kg; untuk jenis ikan Layang dengan kualitas segar sebesar Rp 2.000,-/kg dan kualitas garaman Rp 700,-/kg; HPI untuk jenis ikan Selar kualitas segar adalah Rp 1.683,-/kg dan garaman Rp 1.122,-/kg; HPI untuk jenis ikan Lemuru dengan kualitas segar adalah Rp 574,-/kg dan garaman Rp 275,-/kg; untuk jenis ikan Tembang dengan kualitas segar Rp 400,-/kg dan garamannya seharga Rp 200,-/kg; sedangkan untuk HPI jenis ikan lain-lain dengan kualitas segar adalah Rp 7.291,-/kg dan garaman Rp 5.608,-/kg (lihat lampiran hal. 149).

Besar nilai PHP yang ditetapkan pemerintah dibandingkan dengan PHP yang dihitung dengan menggunakan rumus yang sama tetapi dengan patokan harga hasil penelitian sangat berbeda. Nilai perhitungan PHP Tahun 2001 yang ditetapkan pemerintah ternyata lebih besar dibandingkan dengan PHP perhitungan hasil penelitian (lihat lampiran hal. 151). Untuk PHP tahun 2002 jika dibandingkan dengan PHP hasil penelitian, tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Itu berarti bahwa hasil perhitungan PHP tahun 2002, sudah mendekati PHP hasil penelitian (lihat lampiran 154 dan 157).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### 5.1. Kesimpulan

1. Komposisi ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* dengan bobot ukuran lebih dari 30 GT selama lima tahun terakhir yakni tahun 1997-2001 di Pekalongan, memperhatikan adanya fluktuasi jumlah produksi. Dari rata-rata jumlah produksi selama lima tahun untuk masing-masing jenis ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* diperoleh komposisi jenis ikan paling besar adalah jenis ikan Layang sebesar 51%, disusul oleh jenis ikan Lemuru sebesar 15%, kemudian ikan Banyar sebesar 10%, ikan Tembang sebesar 9%, ikan Selar sebesar 8%, dan ikan dengan jenis lainnya memiliki komposisi paling kecil yakni hanya sebesar 5% saja. Dari jenis ikan tersebut dibedakan kualitasnya menjadi ikan segar atau es dan ikan asin atau garaman. Komposisi ikan asin atau garaman lebih besar dibandingkan dengan komposisi ikan segar atau es yakni 65% untuk kualitas garaman dan 35% untuk ikan berkualitas segar.
2. Harga ikan hasil tangkapan kapal *purse seine* yang memiliki harga tertinggi adalah jenis ikan Banyar/Kembung dan harga terendah adalah ikan jenis Tembang. Berdasarkan pada kualitas ikan, harga ikan segar atau es lebih tinggi dibandingkan dengan harga ikan asin atau garaman. Untuk harga ikan yang berkualitas segar menurut masing-masing jenis

ikan Tembang, dan sebesar Rp 770,- untuk jenis ikan lainnya.

3. Pungutan perikanan yang berupa PFP dan PHP mempengaruhi pendapatan nelayan khususnya pemilik kapal *purse seine*. Pada pendapatan trip pertama, pendapatan pemilik kapal yang sudah membayar PFP dan PHP bernilai negatif atau pemilik kapal tersebut mengalami kerugian dengan rata-rata sebesar minus Rp 6.254.660,-, sedangkan untuk pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PFP dan PHP memiliki pendapatan per trip yang tinggi dengan rata-rata sebesar Rp 8.097.880,-. Untuk pendapatan per trip nahkoda, motoris, juru, dan ABK baik yang sudah membayar maupun belum membayar PFP dan PHP tidak dipengaruhi oleh besar pungutan perikanan tersebut. Pendapatan selama satu tahun untuk pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar PFP dan PHP lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PFP dan PHP yang ditunjukkan dengan rata-rata sebesar Rp 32.848.229,- untuk kelompok pemilik kapal *purse seine* yang sudah membayar dan rata-rata kelompok pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PFP dan PHP sebesar Rp 48.306.853,- untuk kelompok pemilik kapal *purse seine* yang belum membayar PFP dan PHP. Adapun pendapatan nahkoda, motoris, juru, dan ABK biasa selama satu tahun,

- antara kapal yang sudah membayar dan belum membayar PPP dan PHP tidak berbeda jauh.
4. Nilai PHP berdasarkan perhitungan pemerintah pada tahun 2001 jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai PHP berdasarkan perhitungan hasil penelitian dan nilai PHP berdasarkan perhitungan pemerintah tahun 2002, sedangkan nilai PHP berdasarkan perhitungan pemerintah tahun 2002 tidak berbeda jauh dengan nilai PHP hasil perhitungan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata nilai PHP berdasarkan perhitungan pemerintah tahun 2001 yakni sebesar Rp 10.774.519,-; untuk rata-rata nilai PHP pemerintah tahun 2002 sebesar Rp 4.829.969,-; sedangkan rata-rata nilai PHP hasil penelitian adalah sebesar Rp 4.450.695,-.
- 5.2. Saran
1. Dari komposisi ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap *purse seine* yang diperoleh dari hasil penelitian, kiranya dapat dipergunakan sebagai pertimbangan pemerintah untuk meninjau kembali ketetapan komposisi hasil tangkapan *purse seine* baik mengenai jenis ikan maupun kualitas (segar atau garaman) ikan.
  2. Harga Patokan Ikan (HPI) yang telah ditetapkan pemerintah kiranya dapat ditinjau setahun sekali dengan mempertimbangkan harga ikan selama lebih kurang lima tahun sebelumnya.
  3. Perlu terus ditingkatkan pemahaman penerapan PHP dengan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat nelayan, karena PHP merupakan salah satu penerimaan negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakat termasuk masyarakat nelayan.

UPT-POSTAK-IMP

4. Untuk memaksimalkan tingkat kesegaran ikan hasil tangkapan kapal *purse seine*, perlu ada penelitian lanjut mengenai waktu yang ideal dalam setiap trip.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Ayodhyoa, A.U. 1985. *Metode Penangkapan Ikan*. Yayasan Dewi Sri, Bogor.
- Conover, W.J. 1980. *Practical Nonparametric Statistics*. John Wiley and Sons, New York.
- Dahuri, Rokhmim. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Media Presindo, Yogyakarta.
- Departemen Pertanian RI. 1985. *UU RI No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, Jakarta.
- 1990. *Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan*, Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. 1999. *UU RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- 1999. *UU RI No. 25 Tahun 1999 tentang Perkembangan Keuangan Pusat Dan Daerah*, Jakarta.
- Departemen Perikanan dan Kelautan RI. 2000. *Peraturan Pemerintah No. 141 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan*, Jakarta.
- 2000. *Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan*, Jakarta.
- 2001. *Keputusan Menteri No. 23 Tahun 2001 tentang Produktivitas Kapal Penangkapan Ikan*, Jakarta.
- 2001. *Keputusan Menteri No. 45 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pemungutan Pungutan Perikanan yang Tertuang*, Jakarta.
- Departemen Perindustrian dan Perdagangan. 2001. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 213 Tahun 2001 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Pungutan Hasil Perikanan*, Jakarta.
- 2002. *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 548 Tahun 2002 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan untuk Perhitungan Pungutan Hasil Perikanan*, Jakarta.
- Dinas Perikanan Propinsi Jawa Tengah. 2001. *Pengelolaan TPI dan Prospeknya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Semarang.

- Direktorat Jenderal Perikanan. 1999. *Laporan Akhir: Identifikasi Keperluan Ekonomi dalam Rangka Penghapusan Kemiskinan*. PT Karsa Haryamulya, Semarang.
- , 2000. *Prospek Pembangunan Perikanan*. Makalah untuk Seminar Maritim Nasional 2000.
- Dixon, John A., Maynard M., Hufschmidt. *Teknik Penilaian Ekonomi Terhadap Lingkungan*. Suatu Buku Kerja Studi Kasus. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Hardhani. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan*. Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang (Tidak dipublikasikan).
- Hutabarat, Budiman. 1999. *Penelitian dan Penerapan Teknologi Khas Lokasi untuk Peningkatan Sumber Daya Pertanian dalam Mengatasi Krisis Ekonomi*. Makalah untuk Seminar Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelestarian Lingkungan, Yogyakarta.
- Jawa Pos. *Kebijakan PHP, Memberdayakan atau Membina Nelayan*. Edisi 4 Februari 2002.
- Jawa Pos. *Minta TNI AL Tak Tangkap Kapal Nelayan*. Edisi 15 Februari 2002.
- Jaya, A., S., E. 2000. *Keragaan Wanita Pekerja pada Industri Pengolahan Hasil Perikanan Tradisional (PHPT) Muara Angke, Kelurahan Puit Kecamatan Penjaringan DKI Jakarta*. Skripsi Program Studi Sosial Ekonomi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, Bogor (Tidak dipublikasikan).
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2000. *Kebijakan Eksplorasi Laut dan Perikanan Nasional dalam Kerangka Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Pidato Rakornas, Jakarta.
- Mintardjo, Kisto. 2001. *Konsep Pengembangan Pemodalan dan Pemasaran dalam Mendukung Pengembangan Kawasan dan Sistem Usaha*. Makalah dalam Pertemuan Lintas UPT Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, Yogyakarta.
- Mubyarto, Loekman Soetrisno, Michael Dove. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan (Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantal, C.V Rajawali, Jakarta*.
- Mulyono, 1986. *Alat-alat Penangkapan Ikan*. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I, Jawa Tengah.
- Nasoetion, Andi Hakim. 1980. *Metode Statistik*. PT. Gramedia, Jakarta.

- Nurjana, Made L. 2001. *Kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap*. Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Nontji, Anugrah dan Dedy Setiapermana. 2000. *Arah Kebijakan Iptek Kelautan*. Makalah pada Rakornas Kelautan 2000, Jakarta.
- Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah. 1999. *Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan*, Semarang.
- Pollet, A dan Nasrullah. 1994. *Penggunaan Metode Statistika Untuk Ilmu Hayati*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Purbiantoro. 2001. *Kajian Produksi Perikanan Purse Seine Dalam Kaitannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan Di Kota Pekalongan*. Tesis Universitas Diponegoro, Semarang (Tidak dipublikasikan).
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES, Jakarta.
- Soejoeti, Zanzawi. 1986. *Metode Statistik 2*. Penerbit Karunika UT, Jakarta.
- Suara Merdeka. *Dikeluhkan Pungutan Hasil Perikanan*. Edisi 21 November 2001.
- Surakhmad, W. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*. Tarsito, Bandung.
- Tindjate, Christian. 2000. *Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan (Studi Tentang Proses Pemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Nelayan Tradisional di Daerah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah*. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).